



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
( LKjIP )**

**KECAMATAN PLANDAAN  
KABUPATEN JOMBANG  
TAHUN 2022**

**KECAMATAN PLANDAAN  
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
TAHUN 2023**

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Plandaan sebagai Organisasi Pemerintah Daerah, dituntut untuk selalu melakukan pembenahan kinerja. Dengan pembenahan kinerja diharapkan dapat meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang selalu berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan Kecamatan Plandaan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan dilakukan dengan berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Jombang serta selaras dengan tujuan dan sasaran Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik (good governance) memiliki 3 landasan utama, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi merupakan harapan seluruh pihak. Oleh karena itu

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate. Sehubungan hal tersebut, Kecamatan Plandaan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

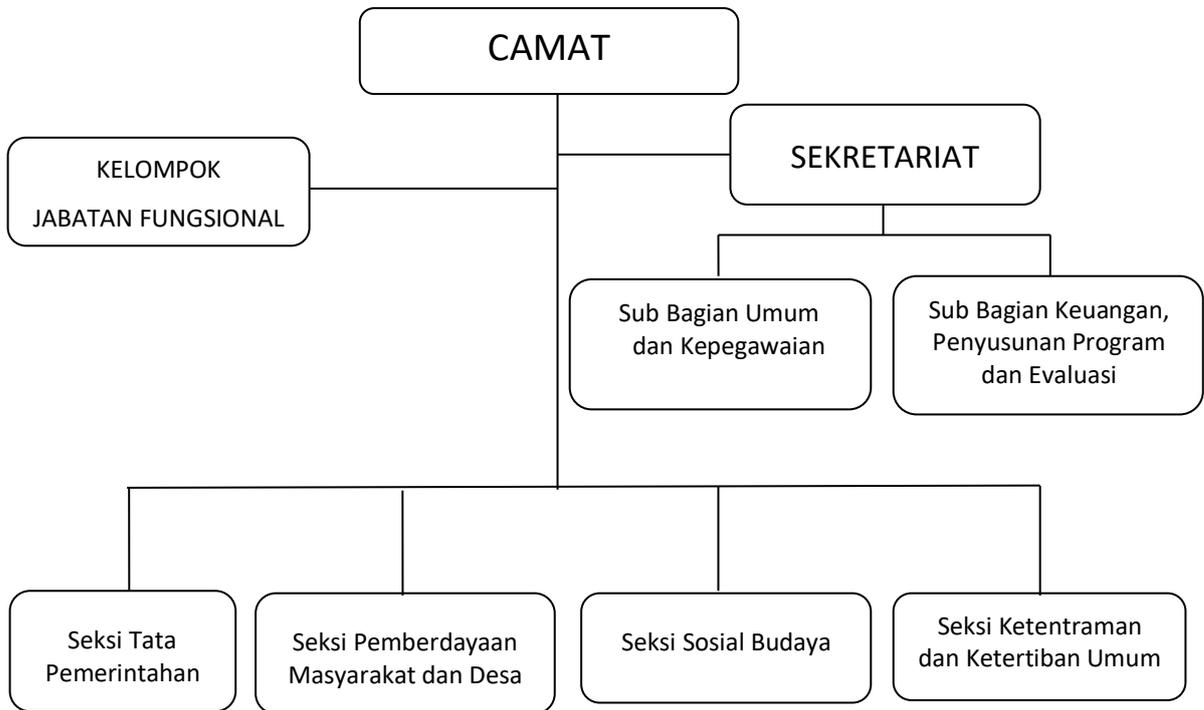
### **1.1 STRUKTUR ORGANISASI**

Keberadaan Kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang.

Susunan Organisasi Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang sebagaimana Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019, terdiri dari:

- a. Camat.
- b. Sekretariat, membawahi:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi
- c. Seksi Tata Pemerintahan.
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan desa.
- e. Seksi Sosial Budaya
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi Kecamatan Plandaan**



Rincian personil pegawai Kantor Kecamatan Plandaan, mulai dari jabatan eselon III dan IV, serta staf pada Kantor Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.1  
Pegawai Jabatan Struktural Eselon III dan IV Kecamatan Plandaan

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan</b>
1	Suparno, SH	19670510 199302 1003	Camat
2	Khoirul Huda, S.Sos	19720105 199302 1003	Sekcam
3	Lina Agustien, SE	19790823 200112 2002	Kasi Tapem
4	Yayuk Dwi Hartatik, Amd.Keb.	19740215 199301 2001	Kasi Sosbud
5	Daniel Danang Darmawan, SE	19790828 200901 1012	Kasi PMD
6	Solikin, S.Pd	19651105 199403 1008	Kasi Trantib
7	Sutatik, SE	19650328 198803 2010	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

8	Rany Yulita, SE	198307242015052001	Kasubbag Sungram
---	-----------------	--------------------	---------------------

Tabel 1.2  
Staf Kecamatan Plandaan

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Muslan, S.Sos	19760304 200801 1006	Staf
2.	Yunita Setyo Utami	19830307 201505 2001	Staf
3.	Sutrisno	19670415 200604 1008	Staf
4.	Edi Setiyono	19690406 200906 1003	Staf
5.	Kusyanto	19650528 198709 1001	Staf

## 1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Tahun 2018, bahwa kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

### 1. Camat

Tugas pokok Camat adalah menyelenggarakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- e. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

## **2. Sekretaris Kecamatan**

Tugas pokok Sekretaris Kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program dan evaluasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

1. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
2. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
3. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
4. Pengelolaan urusan rumah tangga;
5. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
6. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Seksi;
7. Pengelolaan kearsipan;
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
9. Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan;
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretaris Kecamatan, membawahi ;

**a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian, dan tata kearsipan;
- c. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- d. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai dilingkungan kecamatan;
- e. Menghimpun data asset dan melaksanakan ketatausahaan barang;
- f. Mengkoordinasikan dan menyusun Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan dibidang informasi dan komunikasi;
- h. Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi dan dokumentasi; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**b. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi**

Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;

- d. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
- e. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- g. Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### **3. Seksi Tata Pemerintahan**

Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas :

1. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal serta instansi di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
2. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
3. Melaksanakan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;
4. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;
5. Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
6. Melaksanakan evaluasi dan laporan penyelenggaran kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
7. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
8. Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat di Kecamatan;

9. Melaksanakan tugas pembantuan; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

#### **4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas :

1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa / Kelurahan dan Kecamatan;
2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat Desa dan Kelurahan serta tertib administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan diwilayah kerja Kecamatan;
3. Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
6. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

#### **5. Seksi Sosial Budaya**

Seksi Sosial Budaya, mempunyai tugas :

1. Melaksanakan penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;

2. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat dibidang sosial budaya;
3. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi dibidang sosial budaya;
4. Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olahraga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;
5. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan;
6. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat kecamatan; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

#### **6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas :

1. Melaksanakan penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;
2. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana;
3. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan Bangsa dan perlindungan masyarakat;
4. Melaksanakan penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;
5. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, pihak lain termasuk Polri/TNI dan Pemuka Agama diwilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
6. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
7. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

8. Melaksanakan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum diwilayah Kecamatan dengan Bupati;
9. Melaksanakan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

### **1.3 ISU STRATEGIS**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional.

Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi PD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh PD sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh PD karena keterbatasan kewenangannya.

Isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang serta berdasarkan dinamika lingkungan strategis adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah kecamatan.
2. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Jombang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, efektif, ramah, inovatif dan akuntabel, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada Standart Operasional Prosedur (SOP) serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif dikomunikasikan kepada masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali

kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan terhadap pelayanan publik.

### 3. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur.

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima (service excelent) harus diimbangi dengan citra organisasi dengan kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan publik. Sumber Daya Aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan Good Goverment, mewujudkan budaya kerja aparatur dengan penekanan kepada semangat kerja serta aparatur sebagai “pelayanan masyarakat”.

Sumber Daya Aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menekankan pada transparansi dan akuntabilitas.

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Plandaan juga mencakup pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi upaya pembinaan, penyempurnaan, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur.

### 4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Manajemen keuangan dan barang daerah menjadi hal strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan, karena sebagai salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan melalui pelaksanaan manajemen keuangan dan pengelolaan asset daerah yang berorientasi kepada kinerja untuk mendukung terciptanya *Good Goverment* di Kecamatan.

Melalui penataan perencanaan, penganggaran dan pengeluaran, agar pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan konsep *Valur for Money* sehingga tercipta akuntabilitas publik. Demikian pula dengan manajemen barang daerah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan dan penghapusan harus diketahui dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Meningkatkan fungsi kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mengkoordinir kegiatan yang dilaksanakan di desa.
6. Kecamatan Plandaan merupakan kawasan dengan tipologi pertanian menuju pengembangan wilayah industri. Hal ini menjadi potensi ke depan bagi masyarakat dalam mencari lapangan kerja.

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, tidak terlepas dari beberapa masalah utama yang dihadapi, diantaranya adalah:

1. Keterbatasan anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Plandaan menjadikan kebutuhan Kecamatan Plandaan belum bisa terakomodasi seluruhnya;
2. Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor dan peralatan lainnya masih kurang;
3. Sumber daya manusia yang akan menjalankan pelayanan dan pembangunan yang ada di Kecamatan Plandaan masih terbatas;
4. Perlu adanya koordinasi dengan dinas terkait apabila terdapat program yang berkaitan dengan dinas, sehingga pihak kecamatan tidak mengalami kesulitan dalam perencanaan dan pelaksanaan program;
5. Perlu adanya limpahan kewenangan dari dinas terkait program tertentu sehingga kecamatan mampu melaksanakan program secara maksimal dan tidak terjadi tumpang tindih.

#### **1.4 CASCADING**

Tujuan dan sasaran RPJMD ditindaklanjuti kedalam tujuan dan sasaran Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang. Berdasarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang terkait dengan pencapaian misi pertama yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan professional dengan tujuan meningkatkan tata kelola

pemerintahan yang professional, akuntabel, inovatif, transparan, dan efektif serta penyelenggaraan layanan publik yang berkualitas. Indikator tujuan RPJMD dari misi pertama ini adalah Indeks Good Governance.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

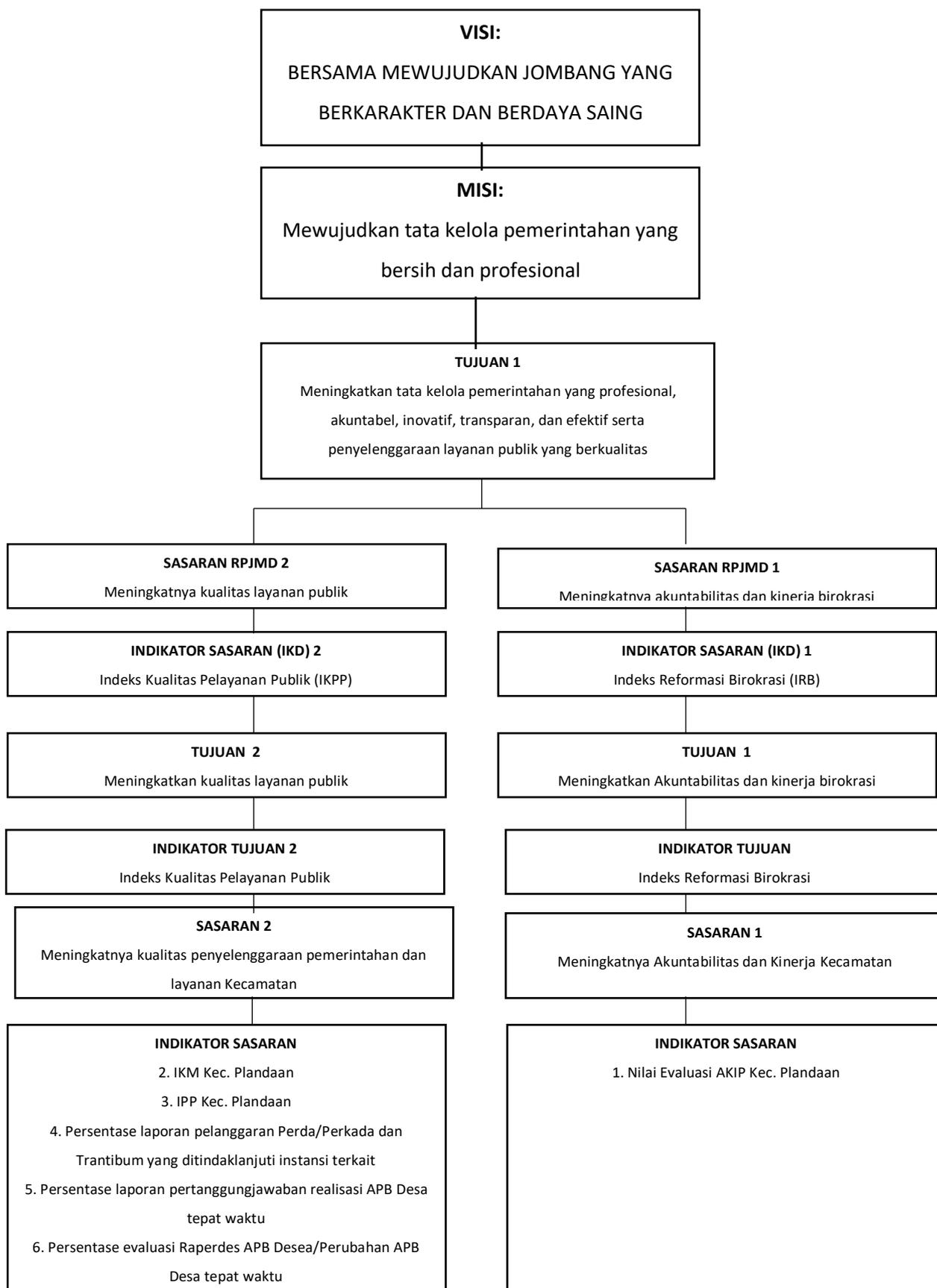
Tujuan Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi
2. Meningkatkan kualitas layanan publik

Adapun sasaran strategis dari tujuan meliputi :

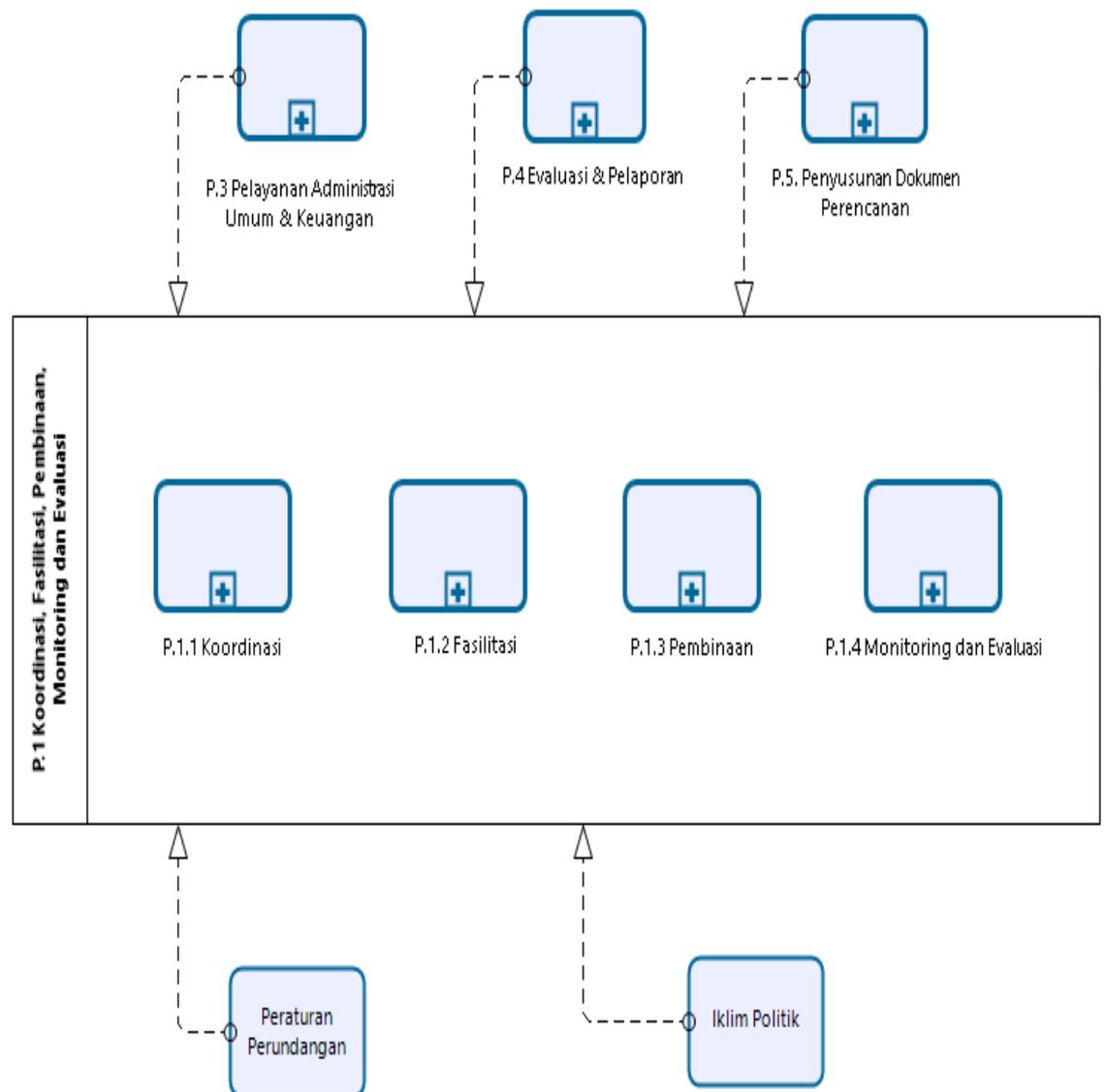
1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja kecamatan
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kecamatan.

Adapun keterkaitan Perubahan RPJMD Kabupaten Jombang dengan Perubahan Renstra Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang sebagai berikut :



## 1.5 PETA PROSES BISNIS

Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang telah menetapkan Proses Bisnis supaya tercipta kejelasan dan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja dalam instansi guna pencapaian tujuan organisasi. Proses bisnis Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang dapat digambarkan sebagaimana berikut:



P.0 Proses Utama Kecamatan merupakan Core utama dari proses bisnis kecamatan yaitu meliputi :

#### 1. Manajerial

Dalam core manajerial terdapat 3 bagian penting dalam prosesnya meliputi :

- Pelayanan administrasi Umum dan Keuangan, merupakan bagian proses bisnis yang mencakup tentang administrasi umum seperti surat menyurat, urusan kepegawaian dan lain-lain. Serta Keuangan mencakup proses urusan gaji, pencairan keuangan seperti kebutuhan alat kantor, listrik dan lain-lain.
- Evaluasi dan Pelaporan, merupakan bagian proses bisnis yang mencakup kinerja dan realisasi dari program dan kegiatan yang dijalankan dari DPA Perangkat Daerah, seperti tingkat realisasi keuangan atau tingkat kinerja dari capaian target masing-masing program/kegiatan.
- Penyusunan Dokumen Perencanaan, yaitu proses bisnis yang mencakup kegiatan perencanaan keuangan atau kinerja yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah selama 1 tahun ke depan seperti pembuatan Renstra, Rencana Kinerja dan Rencana Keuangan Anggaran Perangkat Daerah.

#### 2. Core Utama

- Koordinasi, Fasilitasi, Pembinaan Monitoring dan Evaluasi, merupakan bagian utama dari proses bisnis Kecamatan yang merujuk dari tasi kecamatan seperti pembinaan kepada perangkat desa, sebagai fasilitator kegiatan serta monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan instansi dibawahnya / desa.
- Pelayanan, merupakan bagian proses bisnis yang mencakup kegiatan pelayanan kepada masyarakat seperti pembuatan KTP, KK atau urusan kependudukan

### 3. Core Lainnya

- Core lainnya merupakan faktor yang dapat mempengaruhi Core Utama dari proses bisnis Kecamatan yaitu Perubahan Perundang-Undangan dan iklim politik.

## 1.6 RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI

Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Jombang Nomor: X.700/322/415.15/2022 tanggal 30 September 2022 perihal laporan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kecamatan Plandaan Tahun 2022, nilai akuntabilitas kinerja Kecamatan Plandaan Tahun 2022 adalah 70,17 termasuk kategori BB dengan predikat “Sangat Baik” dengan catatan hasil evaluasi sebagai berikut :

1. Evaluasi atas perencanaan kinerja dengan nilai 24,27 dari bobot 30% atau dengan capaian 80,89% (BB) yang berarti bahwa pemenuhan kualitas kriteria telah terpenuhi seluruhnya sesuai mandat kebijakan, namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah:
  - a. Standar kualitas monitoring jangka menengah belum terpenuhi dengan optimal. Hal tersebut dikarenakan pada mekanisme belum diatur pihak/bagian yang bertanggungjawab untuk melaporkan dan memonitor kinerja secara periodik serta atas monitoring yang dilakukan belum dilakukan tindak lanjut.
  - b. Target kinerja yang telah diperjanjikan pada masing-masing pengukuran kinerja belum dijadikan dasar untuk pemberian Reward and Punishment, karena berdasarkan Keputusan Camat Plandaan Kabupaten Jombang Nomor : 188/09/415.61/2022 indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah nilai sinergitas, sedangkan pada dokumen pengukuran kinerja tidak menggunakan indikator tersebut.
2. Evaluasi atas pengukuran kinerja dengan nilai 18,93 dari bobot 30% atau dengan capaian 63,10% (CC) yang berarti bahwa kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi, namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah :

- a. Belum terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan karena berdasarkan hasil evaluasi, SOP yang ada belum memenuhi 2 dari 5 kriteria yaitu jelas waktu pengumpulannya dan ada kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan.
  - b. Pengumpulan data kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).
  - c. Pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).
  - d. Pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan sebagaimana penggunaan aplikasi e-office kabupaten. Namun berdasarkan rekapitulasi penilaian kinerja pegawai yang dilampirkan dalam rangka pemberian reward dan punishment, tidak didapati standar yang jelas dalam pengukuran kualitas kinerja yang dihasilkan oleh individu pegawai sebagai salah satu parameter dalam pemberian tunjangan kinerja/penghasilan.
  - e. Pengukuran kinerja yang telah dilakukan sampai dengan tribulan 2 belum didapati bukti yang cukup bahwa hasil evaluasi atas pengukuran kinerja berdampak secara maksimal atas penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas, dan anggaran dalam mencapai kinerja pada periode berikutnya.
3. Evaluasi atas pelaporan kinerja dengan nilai 7,16 dari bobot 15% atau dengan capaian 47,74% (D) yang berarti bahwa kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai terpenuhi dan terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah :
- a. Dokumen Laporan kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)
  - b. Dokumen laporan kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, namun belum memenuhi kualitas kriteria yang ditetapkan yaitu belum menyajikan efisiensi atas sumber daya manusia yang kompeten

dan sarana dan prasarana yang menjelaskan kondisi perbandingan antara kebutuhan standar SDM dan sarana dan prasarana dengan kondisi pada Kecamatan Plandaan.

- c. Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan sebagai dasar dilakukan penyesuaian aktivitas, anggaran, maupun perencanaan kinerja sebagai contoh dalam melakukan penyesuaian anggaran namun didasarkan pada adanya kebijakan dari pemerintah. Adanya target kinerja yang telah tercapai tidak dijadikan dasar dalam melakukan penyesuaian anggaran.
4. Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja instansi dengan nilai 19,81 dari bobot 25% atau dengan capaian 79,25% (B) yang berarti bahwa kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi, namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah :
  - a. Evaluasi akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).
  - b. Hasil evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja terutama dalam penetapan target kinerja.

Dalam rangka meningkatkan manajemen kinerja, dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi atas mekanisme monitoring target jangka menengah dengan menyajikan pihak yang bertanggungjawab melaporkan dan memonitoring kinerja secara periodik serta melaksanakan rekomendasi atas monitoring yang dilakukan.
2. Melakukan evaluasi atas mekanisme reward and punishment dengan menggunakan indikator kinerja terbaru sebagai parameter penilaian kinerja.
3. Memperbaiki SOP pengumpulan data kinerja dengan menambahkan dua kriteria yaitu batas waktu pengumpulan yang jelas dan harus terdapat kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan.
4. Menggunakan teknologi informasi (Aplikasi) untuk melakukan pengumpulan data kinerja.

5. Menggunakan teknologi informasi (Aplikasi) untuk melakukan pengukuran capaian kinerja.
6. Meningkatkan kualitas evaluasi pengukuran kinerja untuk selanjutnya memanfaatkan hasil evaluasi pengukuran kinerja sebagai bahan untuk penyusunan strategi, kebijakan, aktivitas, dan anggaran dalam mencapai kinerja.
7. Melakukan evaluasi pada dokumen LKjIP dengan menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) pada dokumen LKjIP OPD Kecamatan.
8. Menambahkan informasi efisiensi atas Sumber Daya Manusia yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai dalam laporan kinerja.
9. Menjadikan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar untuk penyesuaian aktivitas anggaran maupun perencanaan kinerja.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1 RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA**

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program dan kegiatannya, maka perencanaan suatu instansi pemerintah harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan berupa rencana strategis dan rencana kinerja, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

##### **2.1.1 RENCANA STRATEGIS**

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredesain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap lingkungan strategis.

Guna menghadapi tantangan tersebut perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan. Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Program-program yang tercantum dalam Rencana Strategis ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Plandaan pada periode Tahun 2018-2023.

Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review Rencana Strategis menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang.

Tujuan dan sasaran Kecamatan Plandaan mendukung Misi ke 1 (satu) Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018 – 2023 adalah merupakan cita-cita atau sesuatu yang akan dicapai dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat secara optimal. Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Plandaan tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Tujuan yang akan diwujudkan dalam mencapai misi tersebut adalah:

1. Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi
2. Meningkatkan kualitas layanan publik

dengan sasaran:

1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja kecamatan
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan.

Guna mendukung pencapaian sasaran strategis sehingga nantinya dapat meraih tujuan yang telah ditetapkan, maka dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan:

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan:

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan:

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya.

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan:

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan:

1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan:

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan:

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan

2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## **2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Kegiatan:

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub kegiatan:

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

## **3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub kegiatan:

1. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

## **4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Kegiatan:

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Sub kegiatan:

1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

## **5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Kegiatan:

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub kegiatan:

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

## **6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Kegiatan:

## Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub kegiatan:

1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

### **2.1.2 RENCANA KERJA TAHUN 2022**

Rencana kinerja tahun 2022 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2022. Rencana kerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2022. Adapun rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Renja 2022 dapat dilihat pada lampiran Rencana Kinerja Tahun 2022.

### **2.2 PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati Jombang dan Camat Plandaan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja

(outcome) yang seharusnya terwujud pada kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Plandaan Tahun 2022 mengacu pada dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Plandaan Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 serta perubahannya.

Tujuan dari Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati Jombang dan Camat Plandaan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi terjadinya pergantian atau mutasi pejabat, dikarenakan :

- a. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- b. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

**Tabel 2.1**  
**Perjanjian Kinerja Kecamatan Plandaan**  
**Tahun 2022**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	1. Nilai Evaluasi AKIP Kec. Plandaan	71
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	1. IKM Kecamatan Plandaan	93,80
		2. IPP Kecamatan Plandaan	3,30
		3. Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%
		4. Persentase Laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu	100%
		5. Persentase evaluasi Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa tepat waktu	100%

NO.	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja Aparatur	100%	2.134.044.723
2.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	83,25	4.733.000
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA yang dilaksanakan	100%	900.000
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	
			Persentase kegiatan sosial budaya yang ditindaklanjuti	100%	
4.	Meningkatnya Koordinasi dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke instansi terkait	100%	4.766.700

5.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaporkan pertanggungjawaban realisasi APBDesa	100%	10.510.000
			Persentase rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDesa yang ditindaklanjuti	100%	
6.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APBDesa/ Perubahan APBDesa yang di evaluasi	100%	18.356.000
			Jumlah Lembaga/ Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan yang aktif	26 lembaga	
<b>Jumlah</b>					<b>2.173.310.423</b>

## **A. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Capaian kinerja merupakan peningkatan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan Instansi di lingkungan pemerintahan serta merupakan wacana proses yang akan memberikan prespektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan, Rencana Kinerja Tahunan yang dilakukan oleh Instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan Instansi yang tidak terarah sesuai pilihan prioritas.

Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang merupakan Rencana Kerja yang disusun secara periodik setiap tahun merupakan uraian lebih lanjut dari Sasaran strategis. Indikator Kinerja dan Target Tahunan sebagaimana diketahui merupakan rencana lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut kedalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terarah.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik maka berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Plandaan dengan pemerintah, ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kec. Plandaan	Nilai Evaluasi AKIP tahun n	Hasil Evaluasi AKIP Kec. Plandaan
		Definisi Operasional: Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi 4 komponen utama: yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Plandaan	IKM Kecamatan Plandaan tahun n	Hasil Survey IKM Kec. Plandaan
		Definisi Operasional: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat atas pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. IKM berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan		

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
		<p>Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik meliputi 9 unsur yaitu: Persyaratan, Sistem/Mekanisme/Prosedur, Waktu Penyelesaian, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan/Saran/Masukan, dan Sarana/ Prasarana</p>		
		<p>Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Plandaan</p>	<p>IPP Kecamatan Plandaan tahun n</p>	<p>Hasil Survey IPP Kec. Plandaan</p>
		<p>Definisi Operasional: Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan</p>		

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
		Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi (Permenpan RB No. 17 Tahun 2017)		
		Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait}}{\text{Jumlah laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke instansi terkait}} \times 100 \%$	Laporan Pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum
		Definisi Operasional: Laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang telah ditindaklanjuti instansi terkait setelah laporan pelanggaran Perda/Perkada dan trantibum dikoordinasikan ke instansi terkait		
		Persentase laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu}}{\text{Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa}} \times 100 \%$	Laporan Evaluasi LRA Desa
		Definisi Operasional: Setiap desa wajib menyusun laporan pertanggungjawaban APBDes yaitu dokumen (LRA beserta Perdesnya) paling		

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
		<p>lambat akhir Bulan Januari setelah Tahun Anggaran berakhir. Laporan Pertanggungjawaban APBDes dievaluasi oleh Tim Verifikator dan Pembina APBDes Kecamatan</p>		
		<p>Persentase evaluasi Raperdes APBDes /Perubahan APBDes tepat waktu</p>	<p>Jumlah laporan Raperdes APB Desa dan Perubahan APB Desa tepat waktu ----- x 100 % Jumlah laporan Raperdes APB Desa dan Perubahan APB Desa</p>	<p>Laporan Evaluasi Raperdes APB Desa</p>
		<p>Definisi Operasional: Desa wajib menyusun Raperdes APBDes/ Perubahan APBDes. Raperdes ini dievaluasi oleh Tim Verifikator dan Pembina APBDes Kecamatan. Raperdes APBDes disusun Desa sebanyak 2x untuk Raperdes APBDes disusun pada bulan Desember-Januari, sedangkan Perubahan APBDes disusun pada bulan SeptemberOktober</p>		

Sebagai upaya merealisasikan Indikator Kinerja Utama tersebut, telah dirumuskan Sasaran Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Plandaan, yaitu:

**Tabel 2.3**  
**Sasaran, Indikator, Target dan Pengukuran Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	Capaian (%)
1.	<b>Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota</b>	<b>Meningkatnya capaian kinerja aparatur</b>	<b>Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan	100%	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	5 Laporan	5 Laporan
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	100%
			Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Kec. Plandaan yang di fasilitasi	14 bulan	14 bulan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	Capaian (%)
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 kali	12 kali
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kec Plandaan	100%	100%
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi	13 stel	13 stel
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan Administrasi perkantoran	100%	100%
	Penyediaan komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi	4 jenis	4 jenis
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	2 jenis	2 jenis
	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	N/A	N/A
	Penyediaan Barang Cetak dan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetak	1 buku	1 buku

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>Capaian (%)</b>
	Penggandaan		Jumlah pemenuhan barang penggandaan	10.257 lembar	10.257 lembar
	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	1 jenis	1 jenis
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3 kali	3 kali
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor	3 unit	3 unit
	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	N/A	N/A
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	12 bulan	12 bulan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	Capaian (%)
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa umum pelayanan kantor	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum	2 jenis	2 jenis
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	85%	85%
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terlaksananya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara	1 unit	1 unit
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya	10 unit	9 unit
	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara	15 unit	15 unit
	Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Tersedianya Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Plandaan yang dipelihara	N/A	N/A
2.	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Nilai PATEN Kecamatan</b>	<b>83,25</b>	<b>86,31</b>

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	Capaian (%)
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	100%
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi	100%	100%
			Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi	100%	100%
3.	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Persentase PHBN/ PHBA yang dilaksanakan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
			<b>Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
3.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan PHBN/ PHBA	1 laporan	1 laporan
			Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	4 dokumen
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	Jumlah Kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	Capaian (%)
		Nasional			
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi Forkopimcam	4 laporan	4 laporan
4.	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda / Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi terkait</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
4.1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum	12 Laporan	12 Laporan
	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	12 Kegiatan	12 Kegiatan
5.	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Desa yang melaporkan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
			<b>Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDesa yang</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	Capaian (%)
			<b>ditindaklanjuti</b>		
5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	26 Dokumen	26 Dokumen
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDesa	26 Laporan	26 Laporan
6.	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa yang di evaluasi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
			<b>Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif</b>	<b>26 Lembaga</b>	<b>26 Lembaga</b>
6.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu	26 Dokumen	26 Dokumen
			Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	26 Lembaga	26 Lembaga
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pengajuan Raperdes APBDesa/ Perubahan APBDesa	26 Dokumen	26 Dokumen

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>Capaian (%)</b>
			Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan	13 BUMDes	13 BUMDes
			Jumlah TP-PKK yang dikoordinasikan	13 TP PKK	13 TP PKK

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kecamatan Plandaan sebagai SKPD pengemban misi organisasi melaksanakan kewajiban mempertanggungjawabkan melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP dan keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

<b>KATEGORI</b>	<b>NILAI ANGKA</b>	<b>INTERPRETASI</b>
AA	> 90 s/d 100	: Sangat Memuaskan
A	> 80 s/d 90	: Memuaskan
BB	> 70 s/d 80	: Sangat Baik
B	> 60 s/d 70	: Baik
CC	> 50 s/d 60	: Cukup Baik
C	> 40 s/d 50	: Agak Kurang
D	0 s/d 40	: Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil

persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab tercapai atau tidaknya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Plandaan memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing – masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra tahun 2018-2023 serta Renja Perubahan tahun 2022.

### **3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Plandaan diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan strategi yang tertuang dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra). Sehubungan hal tersebut, pada Tahun 2022, Kecamatan Plandaan memiliki 2 (dua) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Plandaan tahun 2022 diperoleh dari perbandingan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dengan realisasinya.

Selanjutnya dilaksanakan Evaluasi untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang ditemui agar dalam pencapaian tujuan organisasi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa mendatang. Selain hal tersebut, dalam evaluasi kinerja dilaksanakan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh input tertentu.

Di dalam evaluasi kinerja, perlu untuk menggunakan beberapa pembanding, meliputi:

#### **1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022**

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Plandaan Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tujuan Kecamatan :

1. Meningkatkan akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi
2. Meningkatkan kualitas layanan publik

**Tabel 3.1**  
**Pencapaian Kinerja**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Plandaan	71,00	70,17	98,83%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Plandaan	93,80	94,22	100,45%
	IPP Kecamatan Plandaan	3,30	3,49	105,76%
	Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100%
	Persentase laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tepat waktu	100%	100%	100%
	Persentase evaluasi Raperdes APBDesa /Perubahan APBDesa tepat waktu	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian IKU				100,84%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Plandaan Tahun 2022 telah berhasil dan melebihi target sebesar 100,84% (predikat sangat memuaskan) dengan rincian sebagai berikut:

Sasaran I : Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Kecamatan.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui sasaran meningkatnya kualitas akuntabilitas dan kinerja Kecamatan Plandaan dengan indikator Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Plandaan dengan target tahun 2022 adalah

71,00 terealisasi 70,17 (tercapai 98,83%) berdasarkan hasil LHE SAKIP Nomor X.700/322/415.15/2022 tanggal 30 September 2022. Tidak tercapainya nilai AKIP tersebut disebabkan karena ada beberapa komponen AKIP yang masih belum bisa dipenuhi yang kami uraikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2

## Data Pendukung Pencapaian Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Plandaan

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1.	Perencanaan Kinerja	30%	24,27	Standar kualitas monitoring jangka menengah belum terpenuhi dengan optimal. Hal tersebut dikarenakan pada mekanisme belum diatur pihak/bagian yang bertanggungjawab untuk melaporkan dan memonitor kinerja secara periodik serta atas monitoring yang dilakukan belum dilakukan tindak lanjut

2.	Pengukuran Kinerja	30%	18,93	<p>a. Belum terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan karena berdasarkan hasil evaluasi, SOP yang ada belum memenuhi 2 dari 5 kriteria yaitu jelas waktu pengumpulannya dan ada kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan.</p> <p>b. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).</p> <p>c. Tidak didapati standar yang jelas dalam pengukuran kualitas kinerja yang dihasilkan oleh individu pegawai sebagai salah satu parameter dalam pemberian tunjangan kinerja/penghasilan.</p>
3.	Pelaporan Kinerja	15%	7,16	<p>a. Dokumen Laporan kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)</p> <p>b. Dokumen laporan kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, namun belum memenuhi kualitas kriteria yang ditetapkan yaitu belum menyajikan efisiensi atas sumber daya manusia yang kompeten</p>

				dan sarana dan prasarana yang menjelaskan kondisi perbandingan antara kebutuhan standar SDM dan sarana dan prasarana dengan kondisi pada Kecamatan Plandaan.
4.	Evaluasi Kinerja	25%	19,81	a. Evaluasi akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi). b. Hasil evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja terutama dalam penetapan target kinerja.
Jumlah		100%	70,17	

Berdasarkan pada tabel diatas, Kecamatan Plandaan pada tahun 2023 akan melakukan strategi perbaikan AKIP sebagai berikut :

1. Menyusun monitoring jangka menengah dengan menyajikan pihak yang bertanggungjawab untuk melaporkan dan memonitor kinerja secara periodik serta melakukan rekomendasi atas monitoring yang dilakukan :
  - Melakukan rapat monitoring evaluasi target jangka menengah renstra
  - Menyusun SK Tim monitoring evaluasi target jangka menengah renstra
  - Menyusun SOP monitoring evaluasi target jangka menengah renstra
  - Menyusun Berita Acara monitoring jangka menengah
2. Melaksanakan reward punishment dengan menggunakan indikator penilaian :
  1. Penilaian Integritas dan Loyalitas :
    - a. Penyelesaian pekerjaan sesuai rencana kerja;
    - b. Kepatuhan terhadap penugasan yang diberikan pimpinan.
  2. Penilaian Capaian Kinerja
    - a. Capaian Kinerja sesuai target kinerja SKP
  3. Penilaian Disiplin :
    - a. Ketaatan terhadap ketentuan pakaian dan atribut dinas;
    - b. Evaluasi kehadiran (finger print);
    - c. Evaluasi keberadaan selama jam kerja;
    - d. Tidak sedang menerima hukuman disiplin dalam 2 (dua) tahun terakhir
3. Melakukan perbaikan SOP pengumpulan data kinerja dengan menambahkan batas waktu pengumpulan yang jelas dan kemudahan akses data bagi pihak yang berkepentingan.
  - SOP pengumpulan data kinerja melalui google drive
  - Tahapan pelaksanaan pengumpulan kinerja melalui google drive
  - Bukti pendukung kemudahan mengakses data melalui google drive
4. Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) yaitu geogle drive dengan alamat [bit.ly/kinerjaplandaan2022dan2023](https://bit.ly/kinerjaplandaan2022dan2023)
5. Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) yaitu Sipedal Cantig dengan alamat [jos.jombangkab.go.id](https://jos.jombangkab.go.id)
6. Meningkatkan kualitas evaluasi pengukuran kinerja agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan strategi, kebijakan, aktivitas, dan anggaran dalam mencapai kinerja.

7. Menyusun LKjIP dengan menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) serta menambahkan informasi efisiensi atas sumber daya manusia yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai.
- Dokumen LKjIP Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja (SAKIP, IPP dan IKM) Kecamatan Plandaan dengan realisasi nasional
  - Dokumen LKjIP Tabel 3.10 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran II : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Plandaan

Berdasarkan tabel Pencapaian Kinerja diatas dapat diketahui sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Plandaan dengan indikator kinerja :

1. IKM Kecamatan Plandaan

IKM Kecamatan Plandaan target tahun 2022 adalah 93,80 terealisasi 94,22 (tercapai 100,45%). Nilai IKM Kecamatan Plandaan telah berhasil mencapai target yang ditetapkan. Namun demikian untuk meningkatkan kinerja berdasarkan hasil IKM tahun 2022 akan dilakukan perbaikan pada unsur sarana dan prasarana dan kompetensi petugas berdasarkan PermenpanRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.

Berikut kami sajikan data pendukung IKM Kecamatan Plandaan per jenis layanan :

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>IKM 2022</b>
1.	KTP	93,46
2.	KK	93,82
3.	SKCK	92,13
4.	Mutasi / Pindah Kependudukan	91,67
5.	Surat Keterangan Lainnya	100
<b>IKM Unit Layanan</b>		<b>94,22</b>

2. IPP Kecamatan Plandaan

IPP Kecamatan Plandaan target tahun 2022 adalah 3,30 terealisasi 3,49 (tercapai 105,76%). Nilai IPP Kecamatan Plandaan telah berhasil mencapai target yang ditetapkan. Untuk meningkatkan kinerja

berdasarkan hasil IPP tahun 2022 akan dilakukan perbaikan pada unsur sarana dan prasarana PATEN yaitu dengan pengajuan anggaran PAK 2023 untuk perluasan gedung PATEN, pengadaan gedung pos pelayanan, tempat parkir pelayanan, pengadaan playground, papan nama PATEN, kursi tunggu pelayanan, meja operator dan lain-lain.

Berikut kami sajikan data pendukung IPP Kecamatan Plandaan :

NO	ASPEK DAN INDIKATOR	BOBOT	JUMLAH NILAI INDIKATOR	NILAI ASPEK
1.	Aspek Kebijakan Pelayanan	30%	3,557	1,0671
2.	Aspek Profesionalisme SDM	18%	3,50	0,63
3.	Aspek Sarana dan Prasarana	15%	3,33	0,4995
4.	Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik	15%	2,75	0,4125
5.	Konsultasi dan Pengaduan	15%	4,50	0,675
6.	Inovasi	7%	3,00	0,21
<b>Indeks Pelayanan Publik</b>		<b>100%</b>	<b>20,637</b>	<b>3,49</b>

3. Persentase laporan pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait.

Persentase laporan pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait target tahun 2022 adalah 100% dapat terealisasi 100% (tercapai 100%) berkat kerjasama yang baik antar stakeholder. Setiap kasus pelanggaran Perda dan Trantibum yang membutuhkan tindak lanjut dilaporkan dan dikoordinasikan ke instansi tepat waktu untuk segera ditindaklanjuti.

4. Persentase laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tepat waktu.

Persentase laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tepat waktu target tahun 2022 adalah 100% dapat terealisasi 100% (tercapai 100%) berkat kerjasama yang baik dengan desa. Setiap desa di Kecamatan Plandaan telah melaporkan realisasi APB Desa tepat waktu berupa LRA Smt 1 berserta Perdesnya dan LRA akhir tahun beserta perdesnya tepat waktu sebanyak 26 dokumen.

5. Persentase evaluasi Raperdes APBDesa /Perubahan APBDesa tepat waktu. Persentase evaluasi Raperdes APBDesa /Perubahan APBDesa tepat waktu target tahun 2022 adalah 100% dapat terealisasi 100% (tercapai 100%). Setiap Desa di Kecamatan Plandaan telah menyusun Raperdes dan Raperdes Perubahan tepat waktu sebanyak 26 dokumen.

Untuk mencapai kinerja tersebut harus dilandasi semangat sesuai pada pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah harus berpedoman pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan keadilan. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diatas diperoleh data dan informasi, sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran**  
**Kecamatan Plandaan Tahun 2022**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>CAPAIAN</b>
1.	Melebihi/melampaui target	100,84%
2.	Sesuai target	-
3.	Tidak mencapai target	-

Dari tabel diatas, terlihat bahwa tingkat pencapaian indikator kinerja utama telah mencerminkan **keberhasilan** dalam pelaksanaannya dan masuk dalam kategori **SANGAT MEMUASKAN**. Selanjutnya sebagai pendukung keberhasilan capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Plandaan Tahun 2022 berikut disajikan capaian kinerja masing-masing kegiatan dengan indikator yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Capaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2022**

NO	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
<b>1</b>	<b>Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota</b>	<b>Meningkatnya capaian kinerja aparatur</b>	<b>Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Telaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	5 laporan	5 laporan	100%
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	100%	100%
			Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Kec. Plandaan yang di fasilitasi	14 bulan	14 bulan	100%
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 kali	12 kali	100%
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kec Plandaan	100%	100%	100%
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi	13 stel	13 stel	100%
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan Administrasi perkantoran	100%	100%	100%
	Penyediaan komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi	4 jenis	4 jenis	100%
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	2 jenis	2 jenis	100%
	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	N/A	N/A	N/A
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Jumlah Pemenuhan barang cetak	1 buku	1 buku	100%
			Jumlah Pemenuhan barang penggandaan	10.257 lembar	10.257 lembar	100%
	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	1 jenis	1 jenis	100%
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3 kali	3 kali	100%
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase realisasi Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Daerah	Pemerintahan Daerah				
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor	3 unit	3 unit	100%
	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	N/A	N/A	N/A
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	12 bulan	12 bulan	100%
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa umum pelayanan kantor	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum	2 jenis	2 jenis	100%
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	85%	85%	100%
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terlaksananya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara	1 unit	1 unit	100%
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya	10 unit	9 unit	90%
	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara	15 unit	15 unit	100%
	Pemeliharaan / Rehabilitasi	Tersedianya Pemeliharaan / Rehabilitasi	Jumlah gedung kantor dan	N/A	N/A	N/A

NO	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	gedung kantor dan bangunan lainnya	gedung kantor dan bangunan lainnya	bangunan lainnya PD Kec. Plandaan yang dipelihara			
<b>2</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Nilai PATEN Kecamatan</b>	<b>83,25</b>	<b>86,31</b>	<b>103,68%</b>
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	100%	100%
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi	100%	100%	100%
			Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi	100%	100%	100%
<b>3</b>	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Persentase PHBN/ PHBA yang dilaksanakan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
			<b>Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
3.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan PHBN/ PHBA	1 laporan	1 laporan	100%
			Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	4 dokumen	100%
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi Forkopimcam	4 laporan	4 laporan	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Kecamatan					
4	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda / Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi terkait</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
4.1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100%
5	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Desa yang melaporkan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
			<b>Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDesa yang ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	26 dokumen	26 dokumen	100%
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDesa	26 Laporan	26 Laporan	100%
6	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa yang</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

NO	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
			<b>di evaluasi</b>			
			<b>Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif</b>	<b>26 lembaga</b>	<b>26 lembaga</b>	<b>100%</b>
6.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu	26 dokumen	26 dokumen	100%
			Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	26 lembaga	26 lembaga	100%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pengajuan Raperdes APBDesa/ Perubahan APBDesa	26 dokumen	26 dokumen	100%
			Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan	13 BUMDes	13 BUMDes	100%
			Jumlah TP-PKK yang dikoordinasikan	13 TP PKK	13 TP PKK	100%

**2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja**

**1. Sebelum Perubahan Renstra PD tahun 2018-2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		% Capaian
			Target	Realisasi	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Plandaan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan Plandaan Minimal Baik	Nilai	76	68,55	90,20%
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi AKIP Kec. Plandaan	Nilai	62,50	60,60	96,96%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Tahun 2020</b>					<b>93,58</b>

**2. Setelah Perubahan Renstra PD tahun 2018-2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		% Capaian	Tahun 2022		% Capaian
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Plandaan	Nilai	70,01	70,09	100,11%	71,00	70,17	98,83%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Plandaan	IKM Kecamatan Plandaan	Nilai	92,67	92,54	99,86%	93,80	94,22	100,45%
	IPP Kecamatan Plandaan	Nilai	3,27	3,23	98,78%	3,30	3,49	105,76%

Persentase laporan pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase evaluasi Raperdes APBDesa / Perubahan APBDesa tepat waktu	Nilai	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>		<b>Tahun 2021</b>		<b>99,79%</b>	<b>Tahun 2022</b>		<b>100,84%</b>

Rata-rata capaian kinerja mulai tahun 2020, 2021, dan 2022

Rata-rata capaian kinerja :

- Tahun 2020 adalah = 93,58%
- Tahun 2021 adalah = 99,79%
- Tahun 2022 adalah = 100,84%

Dari tabel diatas rata-rata capaian kinerja mulai tahun 2020, 2021, dan 2022 mengalami trend kenaikan. Pada tahun 2020-2021 meningkat 6,64%. Pada tahun 2021-2022 meningkat 1,05%.

Berikut kami sajikan capaian kinerja dari masing-masing indikator sasaran :

Sasaran I : Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai evaluasi AKIP Kecamatan Plandaan dari tahun 2020, 2021 dan 2022 selalu mengalami trend kenaikan. Pada tahun 2020-2021 meningkat 15,66%. Tahun 2021-2022 meningkat 0,11% namun tidak dapat mencapai target yang ditetapkan karena ada beberapa komponen SAKIP yang memerlukan perbaikan diantaranya yaitu pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi). Strategi yang akan digunakan untuk mencapai target nilai AKIP adalah dengan melakukan perbaikan dokumen SAKIP sesuai rekomendasi dari Tim Evaluator Inspektorat Kabupaten Jombang, antara lain :

1. Menyusun monitoring jangka menengah dengan menyajikan pihak yang bertanggungjawab untuk melaporkan dan memonitor kinerja secara periodik serta melakukan rekomendasi atas monitoring yang dilakukan :
  - Melakukan rapat monitoring evaluasi target jangka menengah renstra
  - Menyusun SK Tim monitoring evaluasi target jangka menengah renstra
  - Menyusun SOP monitoring evaluasi target jangka menengah renstra
  - Menyusun Berita Acara monitoring jangka menengah
2. Melaksanakan reward punishment dengan menggunakan indikator penilaian :
  1. Penilaian Integritas dan Loyalitas :
    - a. Penyelesaian pekerjaan sesuai rencana kerja;
    - b. Kepatuhan terhadap penugasan yang diberikan pimpinan.
  2. Penilaian Capaian Kinerja
    - a. Capaian Kinerja sesuai target kinerja SKP

3. Penilaian Disiplin :
  - a. Ketaatan terhadap ketentuan pakaian dan atribut dinas;
  - b. Evaluasi kehadiran (finger print);
  - c. Evaluasi keberadaan selama jam kerja;
  - d. Tidak sedang menerima hukuman disiplin dalam 2 (dua) tahun terakhir
3. Melakukan perbaikan SOP pengumpulan data kinerja dengan menambahkan batas waktu pengumpulan yang jelas dan kemudahan akses data bagi pihak yang berkepentingan.
  - SOP pengumpulan data kinerja melalui google drive
  - Tahapan pelaksanaan pengumpulan kinerja melalui google drive
  - Bukti pendukung kemudahan mengakses data melalui google drive
4. Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) yaitu geogle drive dengan alamat [bit.ly/kinerjaplanaan2022dan2023](https://bit.ly/kinerjaplanaan2022dan2023)
5. Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) yaitu Sipedal Cantig dengan alamat [jos.jombangkab.go.id](https://jos.jombangkab.go.id)
6. Meningkatkan kualitas evaluasi pengukuran kinerja agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan strategi, kebijakan, aktivitas, dan anggaran dalam mencapai kinerja.
7. Menyusun LKjIP dengan menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) serta menambahkan informasi efisiensi atas sumber daya manusia yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai.
  - Dokumen LKjIP Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja (SAKIP, IPP dan IKM) Kecamatan Plandaan dengan realisasi nasional
  - Dokumen LKjIP Tabel 3.10 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran II : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Plandaan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator sasaran :

1. IKM Kecamatan Plandaan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa IKM Kecamatan Plandaan tahun 2021-2022 meningkat 1,82%. Untuk meningkatkan nilai IKM yaitu dengan perbaikan seperti sarpras dan kompetensi petugas pelayanan.

2. IPP Kecamatan Plandaan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa IPP Kecamatan Plandaan tahun 2021-2022 meningkat 8,05%. Untuk meningkatkan nilai IPP yaitu dengan perbaikan pada unsur sarana dan prasarana PATEN yaitu dengan pengajuan tambahan anggaran PAK 2023 untuk perluasan gedung PATEN, pengadaan gedung pos pelayanan, tempat parkir pelayanan, pengadaan playground, papan nama PATEN, kursi tunggu pelayanan, meja operator dan lain-lain.

3. Persentase laporan pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Persentase laporan pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait tahun 2021-2022 tercapai 100%. Setiap kasus pelanggaran Perda dan Trantibum yang membutuhkan tindak lanjut dilaporkan dan dikoordinasikan ke instansi tepat waktu untuk segera ditindaklanjuti.

4. Persentase Laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase Laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu tahun 2021-2022 tercapai 100%. Setiap desa di Kecamatan Plandaan telah melaporkan realisasi APB Desa tepat waktu berupa LRA Smt 1 beserta Perdesnya dan LRA akhir tahun beserta perdesnya tepat waktu sebanyak 26 dokumen.

5. Persentase evaluasi Raperdes APBDesa / Perubahan APBDesa tepat waktu.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Persentase evaluasi Raperdes APBDesa / Perubahan APBDesa tepat waktu tahun 2021-2022 tercapai 100%. Setiap Desa di Kecamatan Plandaan telah menyusun Raperdes dan Raperdes Perubahan tepat waktu sebanyak 26 dokumen.

**Tabel 3.6**

**Realisasi kinerja serta capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2021 dan 2022**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja (%)	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
<b>Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota</b>	<b>Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	3 dok	2 dok	3 dok	2 dok	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	5 lap	5 lap	5 lap	5 lap	100%	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	<i>Persentase dokumen laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN lingkup Kecamatan Plandaan yang difasilitasi	14 bln	14 bln	14 bln	14 bln	100%	100%
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	100%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	N/A	12 kali	N/A	12 kali	N/A	100%

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja (%)	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Plandaan</i>	N/A	100%	N/A	100%	N/A	100%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi	N/A	13 stel	N/A	13 stel	N/A	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100%	100%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	3 jenis	2 jenis	3 jenis	2 jenis	100%	100%
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	11 bulan	N/A	11 bulan	N/A	100%	N/A
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetak	N/A	1 buku	N/A	1 buku	N/A	100%
	Jumlah pemenuhan barang penggandaan	N/A	10.257	N/A	10.257	N/A	100%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Pemenuhan Bahan Bacaan	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100%	100%
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	100%	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja (%)	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	2 gedung	N/A	2 gedung	N/A	100%	N/A
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor	4 unit	3 unit	4 unit	3 unit	100%	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Pemenuhan jenis Pelayanan Umum	5 jenis	2 jenis	5 jenis	2 jenis	100%	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</i>	85%	85%	85%	85%	100%	100%
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	100%
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya.	20 unit	10 unit	20 unit	9 unit	100%	90%

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja (%)	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Plandaan yang dipelihara	1	N/A	1	N/A	100%	N/A
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	19 unit	15 unit	19 unit	15 unit	100%	100%
<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Nilai Paten Kecamatan</b>	83,10	83,25	82,42	86,31	99,18%	103,68 %
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	<b>Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti</b>	N/A	100%	N/A	100%	N/A	100%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA</i>	3 lap	1 lap	3 lap	1 lap	100%	100%
	<i>Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam</i>	N/A	4 dok	N/A	4 dok	N/A	100%

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja (%)	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan	3 keg	1 keg	3 keg	1 keg	100%	100%
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Forkopimcam	N/A	4 lap	N/A	4 lap	N/A	100%
<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	<i>Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum</i>	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	100%	100%
Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	12 keg	12 keg	12 keg	12 keg	100%	100%
<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	<b>Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja (%)	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa</i>	26 dok	26 dok	26 dok	26 dok	100%	100%
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	26 lap	26 lap	26 lap	26 lap	100%	100%
<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	<b>Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif</b>	26 lembaga	26 lembaga	26 lembaga	26 lembaga	100%	100%
	<i>Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu</i>	26 dok	26 dok	26 dok	26 dok	100%	100%
	<i>Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina</i>	26 lembaga	26 lembaga	26 lembaga	26 lembaga	100%	100%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa	26 dok	26 dok	26 dok	26 dok	100%	100%
	Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan	13 BUMDes	13 BUMDes	13 BUMDes	13 BUMDes	100%	100%
	Jumlah TP PKK yang dikoordinasikan	13 TP PKK	13 TP PKK	13 TP PKK	13 TP PKK	100%	100%

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja Kecamatan Plandaan tahun 2020, 2021 dan 2022 mengalami peningkatan terjadi karena ada beberapa faktor seperti faktor peningkatan skill SDM, faktor perubahan target kinerja dan juga terkait dengan fasilitas sarana prasarana yang mendukung pelayanan publik kepada masyarakat. Diharapkan untuk tahun-tahun kedepannya, Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dapat menjadi tolak ukur adanya peningkatan akuntabilitas kinerja unit organisasi yakni Kecamatan Plandaan, utamanya dalam proses pelayanan kepada masyarakat yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya hasil survey kepuasan masyarakat.

**3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :**

**Tabel 3.7**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RENSTRA**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Plandaan	72	70,17	97,46%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Plandaan	IKM Kecamatan Plandaan	93,85	94,22	100,39%
	IPP Kecamatan Plandaan	3,35	3,49	104,18%
	Persentase laporan pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100%
	Persentase Laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu	100%	100%	100%
	Persentase evaluasi Raperdes APBDesa / Perubahan APBDesa tepat waktu	100%	100%	100%
<b>RATA - RATA TINGKAT KEMAJUAN</b>				<b>100,34%</b>

Tahun 2022 merupakan tahun keempat periode Renstra 2018-2023 dengan 2 sasaran strategis kecamatan dan 6 indikator kinerja utama yang capaiannya kami jabarkan sebagai berikut :

Sasaran I : Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan

Nilai Evaluasi AKIP telah mencapai tingkat kemajuan 97,46%, target periode akhir renstra 72, pada tahun 2022 telah tercapai 70,17.

Sasaran II : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Plandaan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator sasaran :

1. IKM Kecamatan Plandaan, realisasi tahun 2022 adalah 94,22 dari target akhir Renstra sebesar 93,85. Dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Plandaan telah mencapai tingkat kemajuan 100,39% yang berarti Target akhir Renstra Kecamatan Plandaan telah tercapai melebihi target di tahun 2022.
2. IPP Kecamatan Plandaan, realisasi tahun 2022 adalah 3,49 dari target akhir Renstra sebesar 3,35. Dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Plandaan telah mencapai tingkat kemajuan 104,18% yang berarti Target akhir Renstra Kecamatan Plandaan telah tercapai melebihi target di tahun 2022.
3. Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%.
4. Persentase laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%.
5. Persentase evaluasi Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa tepat waktu telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 target sasaran strategis renstra Kecamatan Plandaan dapat tercapai dengan rata – rata capaian kinerja 100,34%.

4. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)**

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.8**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja (SAKIP, IPP dan IKM) Kecamatan Plandaan dengan Realisasi Nasional**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi tahun 2022	Realisasi Nasional	% Perbandingan dengan Nasional
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Plandaan	70,17	67,93	103,30
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Plandaan	IKM Kecamatan Plandaan	94,22	Tidak ada rujukan	Tidak ada rujukan
		IPP Kecamatan Plandaan	3,49	3,88	89,95

Sumber: - LAKIP Kementerian PAN RB Tahun 2022

Berdasarkan Tabel diatas didapati Capaian Kinerja Kecamatan Plandaan tahun 2022 dibandingkan dengan Capaian kinerja tahun 2022 Standar Nasional nilainya sudah mendekati dengan rincian pada tahun 2022 Nilai SAKIP Kecamatan 70,17 (BB) sedangkan nilai SAKIP Nasional rata-rata 67,93 ada selisih lebih sekitar 2,24 Poin. Untuk capaian nilai IPP Kecamatan Plandaan Tahun 2022 adalah 3,49 sedangkan Nilai IPP rata rata nasional sebesar 3,88 dengan selisih kurang sebesar 0,39 poin. Sedangkan untuk Pencapaian Nilai IKM/SKM Kecamatan Plandaan tahun 2022 sebesar 94,22 dan tidak bisa dibandingkan dikarenakan tidak ada rujukan Nasional dari Standar IKM Pemerintah Kabupaten/Kota.

## **5. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Secara umum berdasarkan capaian kinerja pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang tercermin dengan terlampauinya target yang telah ditetapkan berdasarkan indikator kinerja, meskipun dari 6 (enam) indikator kinerja utama kecamatan ada satu yang belum mencapai target yaitu nilai AKIP Kecamatan dengan capaian persentase sebesar 98,83% tetapi persentase realisasi capaian keseluruhan indikator kinerja utama telah melebihi target yaitu sebesar 100,84%.

Nilai AKIP Kecamatan Plandaan tidak dapat memenuhi target disebabkan karena :

1. Standar kualitas monitoring jangka menengah belum terpenuhi dengan optimal. Hal tersebut dikarenakan pada mekanisme belum diatur pihak/bagian yang bertanggungjawab untuk melaporkan dan memonitor kinerja secara periodik serta atas monitoring yang dilakukan belum dilakukan tindak lanjut.
2. Belum terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang diandalkan karena berdasarkan hasil evaluasi, SOP yang ada belum memenuhi 2 dari 5 kriteria yaitu jelas waktu pengumpulannya dan ada kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan.
3. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).
4. Tidak didapati standar yang jelas dalam pengukuran kualitas kinerja yang dihasilkan oleh individu pegawai sebagai salah satu parameter dalam pemberian tunjangan kinerja/penghasilan
5. Dokumen Laporan kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)
6. Dokumen laporan kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, namun belum memenuhi kualitas kriteria yang ditetapkan yaitu belum menyajikan efisiensi atas sumber daya manusia yang kompeten dan sarana dan prasarana yang menjelaskan kondisi perbandingan antara kebutuhan standar SDM dan sarana dan prasarana dengan kondisi pada Kecamatan Plandaan.

7. Hasil evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja terutama dalam penetapan target kinerja.

Strategi untuk meningkatkan nilai AKIP adalah dengan melakukan :

1. Menyusun monitoring jangka menengah dengan menyajikan pihak yang bertanggungjawab untuk melaporkan dan memonitor kinerja secara periodik serta melakukan rekomendasi atas monitoring yang dilakukan :

- Melakukan rapat monitoring evaluasi target jangka menengah renstra
- Menyusun SK Tim monitoring evaluasi target jangka menengah renstra
- Menyusun SOP monitoring evaluasi target jangka menengah renstra
- Menyusun Berita Acara monitoring jangka menengah

2. Melaksanakan reward punishment dengan menggunakan indikator penilaian :

1. Penilaian Integritas dan Loyalitas :

- a. Penyelesaian pekerjaan sesuai rencana kerja;
- b. Kepatuhan terhadap penugasan yang diberikan pimpinan.

2. Penilaian Capaian Kinerja

- a. Capaian Kinerja sesuai target kinerja SKP

3. Penilaian Disiplin :

- a. Ketaatan terhadap ketentuan pakaian dan atribut dinas;
- b. Evaluasi kehadiran (finger print);
- c. Evaluasi keberadaan selama jam kerja;
- d. Tidak sedang menerima hukuman disiplin dalam 2 (dua) tahun terakhir

3. Melakukan perbaikan SOP pengumpulan data kinerja dengan menambahkan batas waktu pengumpulan yang jelas dan kemudahan akses data bagi pihak yang berkepentingan.

- SOP pengumpulan data kinerja melalui google drive
- Tahapan pelaksanaan pengumpulan kinerja melalui google drive
- Bukti pendukung kemudahan mengakses data melalui google drive

4. Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) yaitu geogle drive dengan alamat

[bit.ly/kinerjaplanaan2022dan2023](https://bit.ly/kinerjaplanaan2022dan2023)

5. Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) yaitu Sipedal Cantig dengan alamat [jos.jombangkab.go.id](http://jos.jombangkab.go.id)
6. Meningkatkan kualitas evaluasi pengukuran kinerja agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan strategi, kebijakan, aktivitas, dan anggaran dalam mencapai kinerja.
7. Menyusun LKjIP dengan menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) serta menambahkan informasi efisiensi atas sumber daya manusia yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai.
  - Dokumen LKjIP Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja (SAKIP, IPP dan IKM) Kecamatan Plandaan dengan realisasi nasional
  - Dokumen LKjIP Tabel 3.10 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Secara rinci pencapaian kinerja dan anggaran Kecamatan Plandaan tahun 2022 tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.9

## PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN KECAMATAN PLANDAAN TAHUN 2022

NO	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN		
				TARGET TAHUNAN	REALISASI TAHUN 2022	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI TAHUN 2022	PERSEN TASE (%) CAPAIAN
1	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%	2,134,044,723.00	2,002,041,515.00	93,81%
1.1	Telaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%	2,951,900.00	2,787,500.00	94.43%
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	2 dokumen	2 dokumen	100%	1,584,400.00	1,530,000.00	96.57%
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	5 laporan	5 laporan	100%	1,367,500.00	1,257,500.00	91.96%

NO	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN		
				TARGET TAHUNAN	REALISASI TAHUN 2022	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI TAHUN 2022	PERSEN TASE (%) CAPAIAN
1.2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	100%	100%	1,877,391,123.00	1,748,055,603.00	93,11%
			Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%			
	Terlaksananya pembayaran Gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Kec. Plandaan yang di fasilitasi	14 bulan	14 bulan	100%	1,818,731,123.00	1,689,395,603.00	92,89%
	Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	460,000.00	460,000.00	100.00%
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 kali	12 kali	100%	58,200,000.00	58,200,000.00	100.00%

NO	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN		
				TARGET TAHUNAN	REALISASI TAHUN 2022	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI TAHUN 2022	PERSEN TASE (%) CAPAIAN
1.3	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kec Plandaan	100%	100%	100%	3,900,000.00	3,900,000.00	100.00%
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi	13 stel	13 stel	100%	3,900,000.00	3,900,000.00	100.00%
1.4	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan Administrasi perkantoran	100%	100%	100%	23,083,800.00	22,849,300.00	98.98%
	Tersedianya komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi	4 jenis	4 jenis	100%	1,338,000.00	1,338,000.00	100.00%
	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	2 jenis	2 jenis	100%	13,629,800.00	13,626,300.00	99.97%

NO	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN		
				TARGET TAHUNAN	REALISASI TAHUN 2022	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI TAHUN 2022	PERSEN TASE (%) CAPAIAN
	Tersedianya bahan logistik kantor	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	N/A	N/A	<b>N/A</b>	N/A	N/A	<b>N/A</b>
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetak	1 buku	1 buku	<b>100%</b>	1,050,000.00	1,050,000.00	<b>100.00%</b>
			Jumlah pemenuhan barang penggandaan	10.257 lembar	10.257 lembar	<b>100%</b>			
	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	1 jenis	1 jenis	<b>100%</b>	2,352,000.00	2,275,000.00	<b>96.73%</b>
	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3 kali	3 kali	<b>100%</b>	4,714,000.00	4,560,000.00	<b>96.73%</b>

NO	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN		
				TARGET TAHUNAN	REALISASI TAHUN 2022	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI TAHUN 2022	PERSEN TASE (%) CAPAIAN
1.5	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	<b>100%</b>	56,650,000.00	56,500,000.00	<b>99.74%</b>
	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor	3 unit	3 unit	<b>100%</b>	56,650,000.00	56,500,000.00	<b>99.74%</b>
	Terlaksananya Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	N/A	N/A	<b>N/A</b>	N/A	N/A	<b>N/A</b>
1.6	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	<b>100%</b>	132,000,000.00	131,730,592.00	<b>99.80%</b>

NO	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN		
				TARGET TAHUNAN	REALISASI TAHUN 2022	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI TAHUN 2022	PERSEN TASE (%) CAPAIAN
	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	12 bulan	12 bulan	100%	30,000,000.00	29,943,940.00	99.81%
	Tersedianya jasa umum pelayanan kantor	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum	2 jenis	2 jenis	100%	102,000,000.00	101,786,652.00	99.79%
1.7	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	85%	85%	100%	38,067,900.00	36,218,520.00	95.14%
	Terlaksananya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara	1 unit	1 unit	100%	27,957,900.00	26,121,020.00	93.43%
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya	10 unit	9 unit	90%			

NO	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN		
				TARGET TAHUNAN	REALISASI TAHUN 2022	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI TAHUN 2022	PERSEN TASE (%) CAPAIAN
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara	15 unit	15 unit	<b>100%</b>	10,110,000.00	10,097,500.00	<b>99.88%</b>
	Tersedianya Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Plandaan yang dipelihara	N/A	N/A	<b>N/A</b>	N/A	N/A	<b>N/A</b>
<b>2</b>	<b>Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Nilai PATEN Kecamatan</b>	<b>83.25</b>	<b>86.31</b>	<b>103.68%</b>	<b>4,733,000.00</b>	<b>4,733,000.00</b>	<b>100.00%</b>
1.1	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	100%	<b>100%</b>	4,733,000.00	4,733,000.00	<b>100.00%</b>

NO	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN		
				TARGET TAHUNAN	REALISASI TAHUN 2022	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI TAHUN 2022	PERSEN TASE (%) CAPAIAN
	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi	100%	100%	100%	4,733,000.00	4,733,000.00	100.00%
			Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi	100%	100%	100%			
3	<b>Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Persentase PHBN/ PHBA yang dilaksanakan</b>	100%	100%	100%	900,000.00	700,000.00	77.78%
			<b>Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti</b>	100%	100%	100%			
3.1	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan PHBN/ PHBA	1 laporan	1 laporan	100%	900,000.00	700,000.00	77.78%

NO	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN		
				TARGET TAHUNAN	REALISASI TAHUN 2022	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI TAHUN 2022	PERSEN TASE (%) CAPAIAN
			Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	4 dokumen	100%			
	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	700,000.00	700,000.00	100.00%
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi Forkopimcam	4 laporan	4 laporan	100%	200,000.00	-	0.00%

NO	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN		
				TARGET TAHUNAN	REALISASI TAHUN 2022	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI TAHUN 2022	PERSEN TASE (%) CAPAIAN
4	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda / Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi terkait	100%	100%	100%	4,766,700.00	4,754,000.00	99.73%
4.1	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum	12 Laporan	12 Laporan	100%	4,766,700.00	4,754,000.00	99.73%
	Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100%	4,766,700.00	4,754,000.00	99.73%

NO	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN		
				TARGET TAHUNAN	REALISASI TAHUN 2022	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI TAHUN 2022	PERSEN TASE (%) CAPAIAN
5.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa	100%	100%	100%	10,510,000.00	10,510,000.00	100.00%
			Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDesa yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%			
5.1	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	26 dokumen	26 dokumen	100%	10,510,000.00	10,510,000.00	100.00%
	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDesa	26 Laporan	26 Laporan	100%	10,510,000.00	10,510,000.00	100.00%

NO	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN		
				TARGET TAHUNAN	REALISASI TAHUN 2022	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI TAHUN 2022	PERSEN TASE (%) CAPAIAN
6	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa yang di evaluasi	100%	100%	100%	18,356,000.00	16,353,400.00	89.09%
			Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	26 lembaga	26 lembaga	100%			
6.1	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu	26 dokumen	26 dokumen	100%	18,356,000.00	16,353,400.00	89.09%
			Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	26 lembaga	26 lembaga	100%			

NO	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN		
				TARGET TAHUNAN	REALISASI TAHUN 2022	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI TAHUN 2022	PERSEN TASE (%) CAPAIAN
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pengajuan Raperdes APBDesa/ Perubahan APBDesa	26 dokumen	26 dokumen	100%	18,356,000.00	16,353,400.00	89.09%
Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan			13 BUMDes	13 BUMDes	100%				
Jumlah TP-PKK yang dikoordinasikan			13 TP PKK	13 TP PKK	100%				
<b>RATA-RATA CAPAIAN REALISASI ANGGARAN</b>							<b>2,173,310,423.00</b>	<b>2,039,091,915.00</b>	<b>93,82%</b>

Namun demikian bukan berarti tidak ada kendala ataupun hambatan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran tersebut.

Berikut ini kami sajikan Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

**5.1. Faktor penunjang/penyebab keberhasilan pencapaian kinerja :**

2. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan mengisyaratkan pentingnya Kecamatan dalam pemerintahan dan penyelenggaraan otonomi daerah. Implementasi kebijakan tersebut, telah mendorong terjadinya perubahan baik secara struktural fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yakni menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi.
3. Dengan posisi kecamatan yang strategis, sejalan dengan terbitnya Permendagri Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) maka dapat diterapkan demi kelancaran pelayanan kepada masyarakat melalui dukungan pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat.
4. Pelayanan non perijinan yaitu cetak KK dan KTP el sudah bisa dilayani di Kantor Kecamatan Plandaan. Hal ini sangat membantu menunjang pelayanan kepada masyarakat karena selama ini cetak KK dan KTP el hanya bisa dilakukan di Dispendukcapil.
5. Dukungan dan komitmen Camat Plandaan, Kepala UPTD/B se Kecamatan, Kepala Desa serta stakeholder lain dalam mendukung pencapaian target pelaksanaan program pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Plandaan untuk mencapai tujuan organisasi.

**5.2. Faktor penghambat / permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja :**

- a. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dalam implementasi beberapa kebijakan/peraturan yang ada di masing-masing stakeholder.
- b. Masih adanya tumpang tindih peraturan per Undang-undangan yang berlaku.
- c. Kompetensi SDM aparatur yang kurang memadai
- e. Kurangnya pemahaman stakeholder terhadap penerapan SAKIP dalam menjalankan tupoksi.
- f. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pendukung pelayanan yang perlu dipenuhi seperti arena bermain anak, tempat parkir dll.

**5.3 Langkah-langkah yang diambil dalam pemecahan masalah**

- a. Melaksanakan inventarisasi data yang akurat terkait kebijakan/peraturan perundangan terkait Pemerintahan Daerah utamanya Kecamatan.
- b. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kepada seluruh stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan/peraturan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam implementasinya.
- c. Pengiriman aparatur Kecamatan dalam pelaksanaan diklat/bimbingan teknis/rakor/seminar dalam rangka peningkatan kompetensi SDM.
- d. Mengkoordinasikan dengan pihak yang terkait dengan penerbitan regulasi adanya revisi beberapa point pada regulasi Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat yang kurang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.
- e. Diinstruksikan kepada para kasi untuk lebih sering terjun ke desa-desa. Disamping menjaga keharmonisan antara Desa dengan kecamatan, selain itu agar kecukupan data-data bisa segera dipenuhi oleh desa.
- f. Melakukan evaluasi internal setiap akhir tribulan terkait tanggung jawab penerapan SAKIP dalam menjalankan tupoksi agar semua stakeholder memahami bahwasanya SAKIP adalah tanggung jawab bersama.

#### 4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Kecamatan Plandaan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui peningkatan pelayanan dari seluruh aspek kepada masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra 2018-2023 Kecamatan Plandaan yakni:

1. Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi
  2. Meningkatkan kualitas layanan publik
- sehingga sangat diperlukan analisis untuk pemenuhan dan penggunaan sumber daya.

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Rumus yang digunakan untuk mencari tingkat efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \text{Input Target} / \text{Input Aktual} \geq 1$$

- Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi.
- Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai.
- Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target indikator kinerja pada periode tersebut tercapai.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan diharapkan dapat terlaksana dengan efisien yaitu penggunaan sumber daya khususnya anggaran seminimal mungkin dengan hasil kinerja yang berdaya guna tercapai sesuai yang telah direncanakan.

Pemenuhan dan penggunaan sumberdaya berkaitan dengan sumber dana (anggaran). Dalam pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Kecamatan Plandaan melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumberdaya maupun sumberdana.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Kecamatan Plandaan langsung memberi

tanggungjawab kepada seksi yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut berusaha dengan mengedepankan prinsip:

a. Transparan

Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi utamanya bidang pelayanan secara benar, dan tidak diskriminatif dengan tetap berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

b. Responsif

Dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi.

c. Efisien

Dalam pelaksanaan tugas mengarah kepada penggunaan sumberdaya yang dimiliki agar dapat memberikan hasil yang maksimal kepada publik.

d. Efektif

Merupakan kemampuan mencapai target berdasarkan sumberdaya yang ada dengan cara atau proses yang paling optimal.

e. Akuntabel

Bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-Undangan.

f. Terukur

Yakni penetapan target kinerja yang akan dicapai berikut cara untuk mencapainya.

Selanjutnya untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran), Kecamatan Plandaan melaksanakan setiap kinerjanya dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja (output dan outcome) yang tercapai sesuai target. Prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan serta penyesuaian anggaran pada beberapa kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output atau outcome yang dihasilkan. Selengkapnya tersaji dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.10**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

<b>NO</b>	<b>SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN/KINERJA</b>	<b>% CAPAIAN KINERJA</b>	<b>% PENYERAPAN ANGGARAN</b>	<b>TINGKAT EFISIENSI</b>
	<b>SASARAN: Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja kecamatan</b>	<b>Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Plandaan</b>	<b>98,83%</b>	<b>96,38%</b>	<b>1,02</b>
<b>1</b>	<b>Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota</b>	<b>Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>96.38%</b>	<b>1,04</b>
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan	<b>100%</b>	<b>94.43%</b>	<b>1,06</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	<b>100%</b>	<b>96.57%</b>	<b>1,04</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	<b>100%</b>	<b>91.96%</b>	<b>1,09</b>
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	<b>100%</b>	<b>96.02%</b>	<b>1,04</b>
		Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	<b>100%</b>		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Kec. Plandaan yang di fasilitasi	<b>100%</b>	<b>95.90%</b>	<b>1,04</b>
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	<b>100%</b>	<b>100.00%</b>	<b>1</b>
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<b>100%</b>	<b>100.00%</b>	<b>1</b>
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kec Plandaan	<b>100%</b>	<b>100.00%</b>	<b>1</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi	<b>100%</b>	<b>100.00%</b>	<b>1</b>
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan Administrasi perkantoran	<b>100%</b>	<b>98.98%</b>	<b>1,01</b>
	Penyediaan komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi	<b>100%</b>	<b>100.00%</b>	<b>1</b>
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	<b>100%</b>	<b>99.97%</b>	<b>1</b>
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetak	<b>100%</b>	<b>100.00%</b>	<b>1</b>

NO	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
		Jumlah pemenuhan barang penggandaan	100%		
	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	100%	96.73%	1,03
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	96.73%	1,03
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	99.74%	1
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor	100%	99.74%	1
	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	N/A	N/A	N/A
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	99.80%	1
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	100%	99.81%	1
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum	100%	99.79%	1
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	95.14%	1,05
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara	100%	93.43%	1,02
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya	90%		
	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara	100%	99.88%	1
	Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Plandaan yang dipelihara	N/A	N/A	N/A
	<b>SASARAN: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kecamatan</b>				
		<b>IKM Kecamatan Plandaan</b>	<b>100,45%</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Nilai PATEN Kecamatan</b>	<b>103.68%</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,04</b>

NO	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	100.00%	1
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi	100%	100.00%	1
		Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi	100%		
		<b>IPP Kecamatan Plandaan</b>	<b>105,76%</b>	<b>77,78%</b>	<b>1,36</b>
3	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Persentase PHBN/ PHBA yang dilaksanakan</b>	100%	77.78%	1,29
		<b>Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti</b>	100%		
3.1	Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan PHBN/ PHBA	100%	77.78%	1,29
		Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam	100%		
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	100.00%	1
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi Forkopimcam	100%	0.00%	-
		<b>Persentase laporan pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait</b>	100%	99,73%	1
4	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda / Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi terkait</b>	100%	99.73%	1
4.1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum	100%	99.73%	1
	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	100%	99.73%	1
		<b>Persentase Laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu</b>	100%	100%	1

NO	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa	100%	100.00%	1
		Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDesa yang ditindaklanjuti	100%		
5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	100%	100.00%	1
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDesa	100%	100.00%	1
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	<b>Persentase evaluasi Raperdes APBDesa / Perubahan APBDesa tepat waktu</b>	100%	89,09%	1,12
		<b>Persentase Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa yang di evaluasi</b>	100%	89.09%	1,12
		<b>Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif</b>	100%		
6.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu	100%	89.09%	1,12
		Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	100%		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pengajuan Raperdes APBDesa/ Perubahan APBDesa	100%	89.09%	1,12
		Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan	100%		
		Jumlah TP-PKK yang dikoordinasikan	100%		
<b>TOTAL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA</b>			<b>99,98</b>	<b>96.34</b>	<b>1,04</b>

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat Efisiensi Sumber Daya dari Capaian kinerja dan realisasi anggaran sebesar 1,04. Hasil tersebut bisa dilihat dari Capaian Kinerja yang lebih besar dari realisasi anggaran. Selain itu, Sumber daya manusia juga merupakan salah satu aset dari sebuah organisasi, baik institusi pemerintah maupun swasta. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan organisasi. Pada hakikatnya, sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana

untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Tingkat efisiensi hasil Capaian indikator kinerja terhadap ketersediaan sumber daya manusia di Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.11**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia Kecamatan Plandaan**  
**Kabupaten Jombang Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2022			Sumber Daya Manusia Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Kebutuhan SDM (ABK)	Ketersediaan SDM	% Ketersediaan SDM
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Plandaan	71,00	70,17	98,83%	19	6	31,58%
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Plandaan	IKM Kecamatan Plandaan	93,80	94,22	100,45%	4	1	25%
		IPP Kecamatan Plandaan	3,30	3,49	105,76%	4	1	25%
		Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100%	5	3	60%
		Persentase Laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu	100%	100%	100%	3	1	33,33%
		Persentase evaluasi Raperdes APBDesa / Perubahan APBDesa tepat waktu	100%	100%	100%	4	1	25%
<b>PERSENTASE CAPAIAN KINERJA RATA-RATA</b>					<b>100,84%</b>		<b>33,32%</b>	
<b>TINGKAT EFISIENSI SDM</b>						<b>3,03 (efisiensi tercapai)</b>		

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia pada kisaran 3,03 dalam pencapaian indikator kinerja Kecamatan Plandaan.

Efisiensi penggunaan sarana dan prasarana di Kecamatan Plandaan pada kisaran 1,58 dimana dengan jumlah SDM PNS 13 orang dan honorer 6 orang, sarana dan prasarana (laptop dan PC ) telah tersedia 12 unit.

### 5. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis kinerja didasarkan pada hasil pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam suatu sasaran strategis yang diharapkan. Sasaran strategis yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai jika tidak didukung dengan program dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian sasaran tersebut.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan yakni :

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Layanan Kecamatan

Kecamatan Plandaan menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.12

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Anggaran, Outcome/Output Yang Dihasilkan

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN ANGGARAN	MENUNJANG/ KURANG
<b>Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota</b>	<b>Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>2,002,041,515.00</b>	<b>93,81%</b>	Sangat Menunjang
Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan	100%	<b>100%</b>	2,787,500.00	<b>94.43%</b>	Sangat Menunjang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	2 dokumen	<b>100%</b>	1,530,000.00	<b>96.57%</b>	Sangat Menunjang

<b>PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)</b>	<b>REALISASI KINERJA</b>	<b>% CAPAIAN KINERJA</b>	<b>REALISASI ANGGARAN</b>	<b>% CAPAIAN ANGGARAN</b>	<b>MENUNJANG/ KURANG</b>
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	5 laporan	<b>100%</b>	1,257,500.00	<b>91.96%</b>	Sangat Menunjang
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	<b>100%</b>	1,748,055,603.00	<b>93.11%</b>	Sangat Menunjang
	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	<b>100%</b>			Sangat Menunjang
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Kec. Plandaan yang difasilitasi	14 bulan	<b>100%</b>	1,689,395,603.00	<b>92,89%</b>	Sangat Menunjang
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	1 dokumen	<b>100%</b>	460,000.00	<b>100.00%</b>	Sangat Menunjang
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 kali	<b>100%</b>	58,200,000.00	<b>100.00%</b>	Sangat Menunjang
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kec Plandaan	100%	<b>100%</b>	3,900,000.00	<b>100.00%</b>	Sangat Menunjang
Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi	13 stel	<b>100%</b>	3,900,000.00	<b>100.00%</b>	Sangat Menunjang
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan Administrasi perkantoran	100%	<b>100%</b>	22,849,300.00	<b>98.98%</b>	Sangat Menunjang
Penyediaan komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi	4 jenis	<b>100%</b>	1,338,000.00	<b>100.00%</b>	Sangat Menunjang
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	2 jenis	<b>100%</b>	13,626,300.00	<b>99.97%</b>	Sangat Menunjang
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetak	1 buku	<b>100%</b>	1,050,000.00	<b>100.00%</b>	Sangat Menunjang

<b>PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)</b>	<b>REALISASI KINERJA</b>	<b>% CAPAIAN KINERJA</b>	<b>REALISASI ANGGARAN</b>	<b>% CAPAIAN ANGGARAN</b>	<b>MENUNJANG/ KURANG</b>
	Jumlah pemenuhan barang penggandaan	10.257 lembar	<b>100%</b>			Sangat Menunjang
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	1 jenis	<b>100%</b>	2,275,000.00	<b>96.73%</b>	Sangat Menunjang
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3 kali	<b>100%</b>	4,560,000.00	<b>96.73%</b>	Sangat Menunjang
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	<b>100%</b>	56,500,000.00	<b>99.74%</b>	Sangat Menunjang
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor	3 unit	<b>100%</b>	56,500,000.00	<b>99.74%</b>	Sangat Menunjang
Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	<b>100%</b>	131,730,592.00	<b>99.80%</b>	Sangat Menunjang
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	12 bulan	<b>100%</b>	29,943,940.00	<b>99.81%</b>	Sangat Menunjang
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum	2 jenis	<b>100%</b>	101,786,652.00	<b>99.79%</b>	Sangat Menunjang
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	85%	<b>100%</b>	36,218,520.00	<b>95.14%</b>	Sangat Menunjang
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara	1 unit	<b>100%</b>	26,121,020.00	<b>93.43%</b>	Sangat Menunjang
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya	9 unit	<b>90%</b>			Sangat Menunjang

<b>PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)</b>	<b>REALISA SI KINERJA</b>	<b>% CAPAIAN KINERJA</b>	<b>REALISASI ANGGARAN</b>	<b>% CAPAIAN ANGGARAN</b>	<b>MENUNJA NG/ KURANG</b>
Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara	15 unit	<b>100%</b>	10,097,500.00	<b>99.88%</b>	Sangat Menunjang
Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Plandaan yang dipelihara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Nilai PATEN Kecamatan</b>	<b>86.31</b>	<b>103.68%</b>	<b>4,733,000.00</b>	<b>100.00%</b>	Sangat Menunjang
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	<b>100%</b>	4,733,000.00	<b>100.00%</b>	Sangat Menunjang
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi	100%	<b>100%</b>	4,733,000.00	<b>100.00%</b>	Sangat Menunjang
	Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi	100%	<b>100%</b>			Sangat Menunjang
<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Persentase PHBN/ PHBA yang dilaksanakan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>700,000.00</b>	<b>77.78%</b>	Sangat Menunjang
	<b>Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			Sangat Menunjang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan PHBN/ PHBA	1 laporan	<b>100%</b>	700,000.00	<b>77.78%</b>	Sangat Menunjang
	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	<b>100%</b>			Sangat Menunjang
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan	1 Kegiatan	<b>100%</b>	700,000.00	<b>100.00%</b>	Sangat Menunjang

<b>PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)</b>	<b>REALISA SI KINERJA</b>	<b>% CAPAIAN KINERJA</b>	<b>REALISASI ANGGARAN</b>	<b>% CAPAIAN ANGGARAN</b>	<b>MENUNJA NG/ KURANG</b>
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi Forkopimcam	4 laporan	<b>100%</b>	-	<b>0.00%</b>	Sangat Menunjang
<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda / Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi terkait</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>4,754,000.00</b>	<b>99.73%</b>	Sangat Menunjang
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum	12 Laporan	<b>100%</b>	4,754,000.00	<b>99.73%</b>	Sangat Menunjang
Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	12 Kegiatan	<b>100%</b>	4,754,000.00	<b>99.73%</b>	Sangat Menunjang
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa	100%	<b>100%</b>	10,510,000.00	<b>100.00%</b>	Sangat Menunjang
	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDesa yang ditindaklanjuti	100%	<b>100%</b>			Sangat Menunjang
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	26 dokumen	<b>100%</b>	10,510,000.00	<b>100.00%</b>	Sangat Menunjang
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDesa	26 Laporan	<b>100%</b>	10,510,000.00	<b>100.00%</b>	Sangat Menunjang
<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa yang di evaluasi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>16,353,400.00</b>	<b>89.09%</b>	Sangat Menunjang

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN ANGGARAN	MENUNJANG/ KURANG
	<b>Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif</b>	<b>26 lembaga</b>	<b>100%</b>			Sangat Menunjang
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu	26 dokumen	<b>100%</b>	16,353,400.00	<b>89.09%</b>	Sangat Menunjang
	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	26 lembaga	<b>100%</b>			Sangat Menunjang
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pengajuan Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa	26 dokumen	<b>100%</b>	16,353,400.00	<b>89.09%</b>	Sangat Menunjang
	Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan	13 BUMDes	<b>100%</b>			Sangat Menunjang
	Jumlah TP-PKK yang dikoordinasikan	13 TP PKK	<b>100%</b>			Sangat Menunjang
<b>REALISASI</b>				<b>2,039,091,915.00</b>	<b>93,82%</b>	Sangat Menunjang

### 3.2 CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Plandaan Tahun 2022, bahwa untuk mendukung tujuan organisasi ditetapkan 2 sasaran strategis Kecamatan dan untuk mencapai sasaran ditetapkan 6 (enam) indikator kinerja yang dalam pelaksanaannya didukung oleh 6 Program, 12 kegiatan dan 22 sub kegiatan.

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut maka dibutuhkan anggaran yang merupakan input dari terlaksananya kegiatan dimaksud dan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja.

Pada tahun 2022 ini Kecamatan Plandaan mendapatkan anggaran sebesar Rp. 2.173.310.423 dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.039.091.915 atau serapan dana APBD mencapai 93,82% sehingga dapat diketahui pada tahun 2022 kondisi anggaran Silpa Rp.134.218.508. Dimana sisa anggaran paling banyak terdapat pada sub kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN

sebesar Rp. 129.335.520. Selanjutnya ditampilkan alokasi anggaran yang menunjang pencapaian sasaran strategis sebagai berikut:

**Tabel 3.13**  
**Alokasi Per Sasaran Pembangunan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Plandaan	2.134.044.723	98,19%
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Plandaan	IKM Kecamatan Plandaan	5.633.000	0,26%
		IPP Kecamatan Plandaan		
		Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	4.766.700	0,22%
		Persentase Laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu	10.510.000	0,48%
		Persentase evaluasi Raperdes APBDesa / Perubahan APBDesa tepat waktu	18.356.000	0,85%
TOTAL			2.173.310.423	100%

Selanjutnya secara rinci pencapaian kinerja dan anggaran sasaran adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.14**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Plandaan	71,00	70,17	98,83%	2.134.044.723,00	2.002.041.515,00	93,81%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Plandaan	IKM Kecamatan Plandaan	93,80	94,22	100,45%	4.733.000,00	4.733.000,00	100%
	IPP Kecamatan Plandaan	3,30	3,49	105,76%	900.000,00	700.000,00	77,78%
	Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100%	4.766.700,00	4.754.000,00	99,73%
	Persentase Laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu	100%	100%	100%	10.510.000,00	10.510.000,00	100%
	Persentase evaluasi Raperdes APBDesa / Perubahan APBDesa tepat waktu	100%	100%	100%	18.356.000,00	16.353.400,00	89,09%
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN</b>				<b>100,84%</b>	<b>2.173.310.423,00</b>	<b>2.039.091.915,00</b>	<b>93,82%</b>

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa secara umum terdapat efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Strategis guna mencapai tujuan OPD yaitu meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi serta meningkatkan kualitas layanan publik, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja organisasi, yakni melalui penyerapan anggaran kinerja sebesar 93,82% telah menghasilkan kinerja sebesar 100,84% dari target sebesar 100% terjadi efisiensi sebesar **7,02%**

Selanjutnya secara rinci pencapaian kinerja dan anggaran Kecamatan Plandaan dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 3.15**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran Kecamatan Plandaan Tahun 2022**

SASARAN/ PROGRAM/KEGIT AN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Plandaan	71,00	70,17	98,83%	2.134.044.723	2.002.041.515	93,81%
Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%	2.134.044.723	2.002.041.515	93,81%

SASARAN/ PROGRAM/KEGIT AN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%	2.951.900	2.787.500	94,43%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	3 dokumen	3 dokumen	100%	1.584.400	1.530.000	96,57%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	5 laporan	5 laporan	100%	1.367.500	1.257.500	91,96%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	100%	100%	1.877.391.123	1.748.055.603	93,11%
	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%			

SASARAN/ PROGRAM/KEGIT AN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Kec. Plandaan yang di fasilitasi	14 bulan	14 bulan	100%	1,818,731,123.00	1,689.395.603.00	<b>92,89%</b>
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	460,000.00	460,000.00	<b>100.00%</b>
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 kali	12 kali	100%	58,200,000.00	58,200,000.00	<b>100.00%</b>
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kec Plandaan	100%	100%	<b>100%</b>	3,900,000.00	3,900,000.00	<b>100.00%</b>
Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi	13 stel	13 stel	<b>100%</b>	3,900,000.00	3,900,000.00	<b>100.00%</b>
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan Administrasi perkantoran	100%	100%	<b>100%</b>	23,083,800.00	22,849,300.00	<b>98.98%</b>

SASARAN/ PROGRAM/KEGIT AN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Penyediaan komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi	4 jenis	4 jenis	<b>100%</b>	1,338,000.00	1,338,000.00	<b>100.00%</b>
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	2 jenis	2 jenis	<b>100%</b>	13,629,800.00	13,626,300.00	<b>99.97%</b>
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyediaan Barang dan Peggandaan Cetak	Jumlah pemenuhan barang cetak	1 buku	1 buku	<b>100%</b>	1,050,000.00	1,050,000.00	<b>100.00%</b>
	Jumlah pemenuhan barang peggandaan	10.257 lembar	10.257 lembar	<b>100%</b>			
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	1 jenis	1 jenis	<b>100%</b>	2,352,000.00	2,275,000.00	<b>96.73%</b>

SASARAN/ PROGRAM/KEGIT AN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3 kali	3 kali	<b>100%</b>	4,714,000.00	4,560,000.00	<b>96.73%</b>
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	<b>100%</b>	56,650,000.00	56,500,000.00	<b>99.74%</b>
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor	3 unit	3 unit	<b>100%</b>	56,650,000.00	56,500,000.00	<b>99.74%</b>
Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	132,000,000.00	131,730,592.00	<b>99.80%</b>
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	12 bulan	12 bulan	100%	30,000,000.00	29,943,940.00	<b>99.81%</b>

SASARAN/ PROGRAM/KEGIT AN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum	2 jenis	2 jenis	100%	102,000,000.00	101,786,652.00	<b>99.79%</b>
Pemeliharaan Barang Milik Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	85%	85%	<b>100%</b>	38,067,900.00	36,218,520.00	<b>95.14%</b>
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara	1 unit	1 unit	<b>100%</b>	27,957,900.00	26,121,020.00	<b>93.43%</b>
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya	10 unit	9 unit	<b>90%</b>			
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara	15 unit	15 unit	<b>100%</b>	10,110,000.00	10,097,500.00	<b>99.88%</b>
Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Plandaan yang dipelihara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

SASARAN/ PROGRAM/KEGIT AN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Plandaan	IKM Kecamatan Plandaan	92,67	92,54	99,86%	39.766.100	29.864.850	75,10%
	IPP Kecamatan Plandaan	3,27	3,23	98,78%			
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	83.25	86.31	103.68%	4,733,000.00	4,733,000.00	100.00%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	100%	100%	4,733,000.00	4,733,000.00	100.00%
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi	100%	100%	100%	4,733,000.00	4,733,000.00	100.00%
	Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi	100%	100%	100%			

SASARAN/ PROGRAM/KEGIT AN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Persentase PHBN/ PHBA yang dilaksanakan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>900,000.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>77.78%</b>
	<b>Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan PHBN/ PHBA	1 laporan	1 laporan	<b>100%</b>	900,000.00	700,000.00	<b>77.78%</b>
	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	4 dokumen	<b>100%</b>			
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	<b>100%</b>	700,000.00	700,000.00	<b>100.00%</b>

SASARAN/ PROGRAM/KEGIT AN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi Forkopimcam	4 laporan	4 laporan	<b>100%</b>	200,000.00	-	<b>0.00%</b>
	<b>Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>4,766,700.00</b>	<b>4,754,000.00</b>	<b>99.73%</b>
<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda / Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi terkait</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>4,766,700.00</b>	<b>4,754,000.00</b>	<b>99.73%</b>
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	12 Laporan	12 Laporan	<b>100%</b>	4,766,700.00	4,754,000.00	<b>99.73%</b>

SASARAN/ PROGRAM/KEGIT AN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	<b>100%</b>	4,766,700.00	4,754,000.00	<b>99.73%</b>
	<b>Persentase Laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tapat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	10,510,000.00	10,510,000.00	<b>100.00%</b>
<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Desa yang melaporkan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa</b>	100%	100%	<b>100%</b>	10,510,000.00	10,510,000.00	<b>100.00%</b>
	<b>Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDesa yang ditindaklanjuti</b>	100%	100%	<b>100%</b>			

SASARAN/ PROGRAM/KEGIT AN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	26 dokumen	26 dokumen	<b>100%</b>	10,510,000.00	10,510,000.00	<b>100.00%</b>
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDesa	26 Laporan	26 Laporan	<b>100%</b>	10,510,000.00	10,510,000.00	<b>100.00%</b>
<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase evaluasi Raperdes APBDesa / Perubahan APBDesa tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>18,356,000.00</b>	<b>16,353,400.00</b>	<b>89.09%</b>
	<b>Persentase Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa yang di evaluasi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>18,356,000.00</b>	<b>16,353,400.00</b>	<b>89.09%</b>
	<b>Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif</b>	<b>26 lembaga</b>	<b>26 lembaga</b>	<b>100%</b>			

SASARAN/ PROGRAM/KEGIT AN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu	26 dokumen	26 dokumen	<b>100%</b>	18,356,000.00	16,353,400.00	<b>89.09%</b>
	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	26 lembaga	26 lembaga	<b>100%</b>			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pengajuan Raperdes APBDesa/ Perubahan APBDesa	26 dokumen	26 dokumen	<b>100%</b>	18,356,000.00	16,353,400.00	<b>89.09%</b>
	Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan	13 BUMDes	13 BUMDes	<b>100%</b>			
	Jumlah TP-PKK yang dikoordinasikan	13 TP PKK	13 TP PKK	<b>100%</b>			
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN</b>				<b>99,98%</b>	<b>2.173.310.423,00</b>	<b>2.039.091.915,00</b>	<b>93,82%</b>

### **3.3 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI**

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja serta menumbuhkembangkan budaya kinerja, selama tahun 2022 Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang telah melakukan beberapa upaya perbaikan implementasi SAKIP sesuai dengan rekomendasi Tim Evaluator SAKIP Kabupaten Jombang sebagai berikut :

**Tabel 3.16**  
**MATRIK TINDAK LANJUT**  
**HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2022**

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Hasil	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status/Progres
1	Melakukan evaluasi atas mekanisme monitoring target jangka menengah dengan menyajikan pihak yang bertanggungjawab melaporkan dan memonitoring kinerja secara periodik serta melaksanakan rekomendasi atas monitoring yang dilakukan.	Menyusun monitoring jangka menengah dengan menyajikan pihak yang bertanggungjawab untuk melaporkan dan memonitor kinerja secara periodik serta melakukan rekomendasi atas monitoring yang dilakukan : - Melakukan rapat monitoring evaluasi target jangka menengah renstra - Menyusun SK Tim monitoring evaluasi target jangka menengah renstra	Dokumen monitoring jangka menengah : - SK Tim monitoring evaluasi target jangka menengah renstra - SOP monitoring evaluasi target jangka menengah renstra - Berita Acara monitoring jangka menengah	Sampai Agustus 2023	Camat	Sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun SOP monitoring evaluasi target jangka menengah renstra</li> <li>- Menyusun Berita Acara monitoring jangka menengah</li> </ul>				
2	Melakukan evaluasi atas mekanisme reward punishment dengan menggunakan indikator kinerja terbaru sebagai parameter penilaian kinerja	<p>Melaksanakan reward punishment dengan menggunakan indikator penilaian :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian Integritas dan Loyalitas <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelesaian pekerjaan sesuai rencana kerja;</li> <li>b. Kepatuhan terhadap penugasan yang diberikan pimpinan.</li> </ol> </li> <li>2. Capaian Kinerja : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Capaian Kinerja sesuai target kinerja SKP.</li> </ol> </li> <li>3. Penilaian Disiplin :</li> </ol>	<p>Dokumen Reward Punishment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SK Reward Punishment</li> <li>- Berita Acara Reward Punishment</li> <li>- Piagam Penghargaan dan Dokumentasi</li> <li>- Data dukung tidak dijatuhi hukuman disiplin</li> </ul>	Januari 2023	Camat	Sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi

		<p>a. Ketaatan terhadap ketentuan pakaian dan atribut dinas;</p> <p>b. Evaluasi kehadiran (finger print);</p> <p>c. Evaluasi keberadaan selama jam kerja;</p> <p>d. Tidak sedang menerima hukuman disiplin dalam 2 (dua) tahun terakhir.</p>				
3	Memperbaiki SOP pengumpulan data kinerja dengan menambahkan dua kriteria yaitu batas waktu pengumpulan yang jelas dan harus terdapat kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan.	<p>Melakukan perbaikan SOP pengumpulan data kinerja dengan menambahkan batas waktu pengumpulan dan kemudahan akses data bagi pihak yang berkepentingan.</p> <p>- SOP pengumpulan data kinerja melalui google drive</p> <p>- Tahapan pelaksanaan</p>	<p>- SOP pengumpulan data kinerja melalui google drive</p> <p>- Tahapan pelaksanaan pengumpulan kinerja melalui google drive</p> <p>- Bukti pendukung</p>	Sampai Januari 2023	Semua PNS Kecamatan Plandaan	Sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi

		<p>pengumpulan kinerja melalui google drive</p> <p>- Bukti pendukung kemudahan mengakses data melalui google drive</p>	<p>kemudahan mengakses data melalui google drive</p>			
4	Menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi) untuk melakukan pengumpulan data kinerja	<p>Pengumpulan data kinerja memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) yaitu geogle drive dengan alamat <a href="http://bit.ly/kinerjaplandaan2022dan2023">bit.ly/kinerjaplandaan2022dan2023</a></p>	<p>Pengumpulan data kinerja <a href="http://bit.ly/kinerjaplandaan2022dan2023">bit.ly/kinerjaplandaan2022dan2023</a></p>	Sampai Agustus 2023	Semua PNS Kecamatan Plandaan	Sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi
5	Menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi) untuk melakukan pengukuran capaian kinerja	<p>Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) yaitu Sipedal Cantig dengan alamat <a href="http://jos.jombangkab.go.id">jos.jombangkab.go.id</a></p>	<p>Aplikasi Sipedal Cantig dengan alamat <a href="http://joss.jombangkab.go.id">joss.jombangkab.go.id</a></p>	Sampai Agustus 2023	Semua PNS Kecamatan Plandaan	Sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi

6	Meningkatkan kualitas evaluasi pengukuran kinerja untuk selanjutnya memanfaatkan hasil evaluasi pengukuran kinerja sebagai bahan untuk penyusunan strategi, kebijakan, aktivitas, dan anggaran dalam mencapai kinerja	Meningkatkan kualitas evaluasi pengukuran kinerja untuk selanjutnya memanfaatkan hasil evaluasi pengukuran kinerja sebagai bahan untuk penyusunan strategi, kebijakan, aktivitas, dan anggaran dalam mencapai kinerja	Dokumen pengukuran kinerja	Sampai Agustus 2023	Semua PNS Kecamatan Plandaan	Sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi
7	Melakukan evaluasi pada dokumen LKjIP dengan menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) pada dokumen LKjIP OPD Kecamatan	Menyusun LKjIP dengan menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)	Dokumen LKjIP Tabel 3.8 Perbandingan realisasi kinerja (SAKIP, IPP dan IKM) Kecamatan Plandaan dengan realisasi nasional	Sampai Maret 2023	Semua PNS Kecamatan Plandaan	Sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi

8	Menambahkan informasi efisiensi atas sumber daya manusia yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai dalam laporan kinerja	Menyusun LKjIP dengan menambahkan informasi efisiensi atas sumber daya manusia yang kompeten dan sarana prasarana yang memadai.	Dokumen LKjIP Tabel 3.10 Efisiensi penggunaan sumberdaya	Sampai Maret 2023	Semua PNS Kecamatan Plandaan	Sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi
9	Menjadikan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar untuk penyesuaian aktivitas anggaran maupun perencanaan kinerja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjadikan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar untuk penyesuaian aktivitas anggaran maupun perencanaan kinerja</li> <li>- Melakukan koordinasi dengan semua stakeholder Kecamatan untuk optimalisasi ASN dalam melaksanakan akuntabilitas di Kecamatan</li> <li>- Mengikuti Bimtek yang dilaksanakan Pemkab. Jombang terkait SAKIP</li> </ul>	Dokumen laporan pengukuran kinerja	Sampai Agustus 2023	Semua PNS Kecamatan Plandaan	Sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Plandaan pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu Januari s/d Desember 2022. Adapun dari hasil evaluasi pelaksanaan program kerja yang bersifat rutin sebagaimana tersebut di atas bahwa program – program kegiatan Kecamatan Plandaan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada Tahun 2022, anggaran yang telah direncanakan juga bisa terserap dengan baik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti lagi untuk tahun 2022 yaitu perlu adanya tambahan personil dan peningkatan SDM personil guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai bagian penutup dari LKjIP Kecamatan Plandaan Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Plandaan telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang sangat baik karena pencapaian kinerjanya telah terealisasi 100,84% atas sasaran-sasarannya yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Plandaan Tahun 2022, dan hasilnya dapat mencapai target yang telah ditetapkan dengan penjelasan sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Capaian Kinerja Kecamatan Plandaan tahun 2022**

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>PERSENTASE CAPAIAN</b>
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Plandaan	71.00	70.17	98.83%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Plandaan	93.80	94.22	100.45%
	IPP Kecamatan Plandaan	3.30	3.49	105.76%

	Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100.00%
	Persentase laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tepat waktu	100%	100%	100.00%
	Persentase evaluasi Raperdes APBDesa /Perubahan APBDesa tepat waktu	100%	100%	100.00%
Rata-rata Capaian IKU				100,84%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran meningkatnya kualitas akuntabilitas dan kinerja Kecamatan Plandaan dengan indikator Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Plandaan dengan target tahun 2022 adalah 71,00 dapat terealisasi 70,17 (capaian 98,83%), belum dapat mencapai target yang ditetapkan.

Untuk sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Plandaan dengan indikator kinerja:

1. IKM Kecamatan Plandaan
  2. IPP Kecamatan Plandaan
  3. Persentase laporan pelanggaran Perda / Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait.
  4. Persentase laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tepat waktu
  5. Persentase evaluasi Raperdes APBDesa /Perubahan APBDesa tepat waktu
- Telah dapat mencapai target yang ditetapkan bahkan untuk capaian nilai IKM dan IPP capaiannya diatas 100%. Sehingga rata-rata capaian IKU Kecamatan Plandaan tahun 2022 adalah 100,84% dengan predikat **SANGAT MEMUASKAN**. Namun demikian prestasi tersebut harus dipertahankan dan

perlu ditingkatkan lagi agar sasaran strategis kecamatan dapat mencapai target yang ditentukan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

## **4.2 REKOMENDASI**

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat diketahui bahwa masih terdapat banyak kendala dan hambatan dalam proses pencapaian target kinerja Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang sehingga ke depan perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di antaranya sebagai berikut :

1. Indikator sasaran nilai evaluasi AKIP Kec. Plandaan, berdasarkan hasil reviu dari Inspektorat ada beberapa yang masih perlu dilakukan perbaikan untuk dokumen SAKIP untuk kedepannya yaitu:
  1. Menyusun monitoring jangka menengah dengan menyajikan pihak yang bertanggungjawab untuk melaporkan dan memonitor kinerja secara periodik serta melakukan rekomendasi atas monitoring yang dilakukan :
    - Melakukan rapat monitoring evaluasi target jangka menengah renstra
    - Menyusun SK Tim monitoring evaluasi target jangka menengah renstra
    - Menyusun SOP monitoring evaluasi target jangka menengah renstra
    - Menyusun Berita Acara monitoring jangka menengah
  2. Melaksanakan reward punishment dengan menggunakan indikator penilaian :
    1. Penilaian Integritas dan Loyalitas :
      - a. Penyelesaian pekerjaan sesuai rencana kerja;
      - b. Kepatuhan terhadap penugasan yang diberikan pimpinan.
    2. Penilaian Capaian Kinerja
      - a. Capaian Kinerja sesuai target kinerja SKP
    3. Penilaian Disiplin :
      - a. Ketaatan terhadap ketentuan pakaian dan atribut dinas;
      - b. Evaluasi kehadiran (finger print);
      - c. Evaluasi keberadaan selama jam kerja;
      - d. Tidak sedang menerima hukuman disiplin dalam 2 (dua) tahun terakhir

3. Melakukan perbaikan SOP pengumpulan data kinerja dengan menambahkan batas waktu pengumpulan yang jelas dan kemudahan akses data bagi pihak yang berkepentingan.
    - SOP pengumpulan data kinerja melalui google drive
    - Tahapan pelaksanaan pengumpulan kinerja melalui google drive
    - Bukti pendukung kemudahan mengakses data melalui google drive
  4. Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) yaitu geogle drive dengan alamat [bit.ly/kinerjaplanaan2022dan2023](https://bit.ly/kinerjaplanaan2022dan2023)
  5. Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) yaitu Sipedal Cantig dengan alamat [jos.jombangkab.go.id](https://jos.jombangkab.go.id)
  6. Meningkatkan kualitas evaluasi pengukuran kinerja agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan strategi, kebijakan, aktivitas, dan anggaran dalam mencapai kinerja.
  7. Menyusun LKjIP dengan menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) serta menambahkan informasi efisiensi atas sumber daya manusia yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai.
    - Dokumen LKjIP Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja (SAKIP, IPP dan IKM) Kecamatan Plandaan dengan realisasi nasional
    - Dokumen LKjIP Tabel 3.10 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
2. Indikator sasaran nilai IKM, berdasarkan Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yaitu pada unsur kompetensi petugas dan sarana/prasarana yaitu:
- a. Kompetensi petugas
    - Peningkatan budaya pelayanan dengan menyediakan segaram khusus dan mengenakan identitas nama.
    - Mengikutsertakan petugas pelayanan untuk mengikuti Bimtek pelayanan yang diadakan oleh Pemda Kab. Jombang
    - Mengoptimalkan pelayanan sesuai dengan standar SOP

yang telah disusun.

- Jika pelayanan tidak sesuai SOP (waktunya lebih panjang) maka petugas siap mengantar dokumen kependudukan ke alamat pemohon.
- Berkoordinasi dengan Dispendukcapil terkait perubahan-perubahan prosedur pelayanan.
- Berkoodinasi dengan Bagian Organisasi untuk monev survey IKM Kecamatan.

b. Sarana dan Prasarana

Mengajukan anggaran PAK 2023 untuk perluasan gedung PATEN, pengadaan gedung pos pelayanan, tempat parkir pelayanan, pengadaan playground, papan nama PATEN, kursi tunggu pelayanan, meja operator dan lain-lain.

3. Indikator sasaran nilai IPP Kecamatan Plandaan akan dilakukan beberapa alternatif perbaikan pada beberapa aspek penilaian IPP yaitu:

a. Aspek Kebijakan Pelayanan

- Menyusun dan menetapkan SP untuk semua jenis layanan, dipublikasikan dan dilakukan monev secara periodik.
- Telah dilakukan pengadaan mesin antrian.
- Maklumat Pelayanan telah dipublikasikan di area ruang pelayanan dan media sosial atau website “SIPADUKA”
- Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat dengan menyediakan kotak kepuasan pelayanan.
- Setiap unit layanan menindaklanjuti saran, kritik, dan rekomendasi SKM

b. Aspek Profesionalisme SDM

- Jam kerja layanan sesuai jam kerja dinas tanpa jeda waktu istirahat untuk seluruh layanan
- Penerapan sistem reward dan punishment untuk peningkatan kinerja pelayanan.
- Peningkatan budaya pelayanan dengan menyediakan segaram khusus dan mengenakan identitas nama.

c. Aspek Sarana dan Prasarana

- Telah diajukan tambahan anggaran PAK 2023 untuk perluasan gedung PATEN, pengadaan gedung pos pelayanan,

tempat parkir pelayanan, pengadaan playground, papan nama PATEN, kursi tunggu pelayanan, meja operator dan lain-lain.

d. Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik

- Sistem Informasi Layanan secara online telah dibuat yaitu “Ning Yaonah” (untuk pengurusan administrasi kependudukan secara online) dan “SIPADUKA” (untuk informasi layanan online)

e. Aspek Konsultasi dan Pengaduan

- Menyediakan petugas layanan pengaduan dengan menyediakan kotak saran/pengaduan
- Menyediakan website pengaduan secara online “SIPANDU”

f. INOVASI

- Pelayanan kecamatan Plandaan mengedepankan pelayanan cepat dan tepat, dimana apabila terdapat permohonan adminduk yang melebihi waktu SOP pelayanan, maka petugas akan mengantar berkas adminduk yang telah jadi ke rumah pemohon.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang Tahun 2022 yang dapat disajikan sebagai pertanggungjawaban pelaksana tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

**Plandaan, 24 Maret 2023**

  
CAMAT PLANDAAN  
KECAMATAN PLANDAAN  
JOMBANG  
SUPARNO, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 19670510 199302 1 003

**Tabel. 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah**  
**Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang**

Tujuan OPD	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penggabungan	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Plandaan	87,86	95,25	538,666,977	93,81	532,445,294	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CAMAT	Kec. Plandaan
Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Plandaan				Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan Plandaan Minimal BAIK	72,25	66,14	122.690.000	68,55	49.525.700	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CAMAT	Kec. Plandaan
		4.01.4.01.21.01.106	Program Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan	Nilai Sinergitas Kecamatan Plandaan Minimal BAIK	72,25	66,14	122.690.000	68,55	49.525.700	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CAMAT	Kec. Plandaan
		4.01.4.01.21.01.106.04	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa	Jumlah pemenuhan komponen sinergitas kinerja bidang pemerintahan umum dan desa	N/A	22	48.200.000	22	15.946.500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Kasi Pemerintahan	Kec. Plandaan

Tujuan OPD	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perenc anaan	Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerj a PD Pen ang gun gjaw ab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
						Realis asi	Rp	Realis ai	Rp	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4.01.4.01.2 1.01.106.0 1	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pemenuhan komponen sinergitas kinerja bidang ketentraman dan ketertiban umum	N/A	8	21.000.000	8	7.869.200	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Kasi Trantibu m	Kec. Planda an
		4.01.4.01.2 1.01.106.0 2	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah pemenuhan komponen sinergitas kinerja bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	N/A	11	30.100.000	11	17.350.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Kasi Pmd	Kec. Planda an
		4.01.4.01.2 1.01.106.0 3	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Sosial Budaya	Jumlah pemenuhan komponen sinergitas kinerja Bidang Sosial dan Budaya	N/A	16	23.390.000	16	8.360.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Kasi Sosbud	Kec. Planda an
	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			Nilai Evaluasi SAKIP	65,30	60,54	415,976,977	60,60	482,919,594	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CAMAT	Kec. Planda an
		4.01.4.01.2 1.01.01	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Persentase penunjang kelancaran administrasi perkantoran	N/A	100	189.836.977	100	152.871.294	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Sekcam	Kec. Planda an

Tujuan OPD	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perenc anaan	Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerj a PD Pen ang gun gjaw ab	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD				
						Realis asi	Rp	Realis ai	Rp	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4.01.4.01.2 1.01.01.24	Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	N/A	20	189.836.977	20	152.871.294	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Kasubag Umum dan Kepegaw aian	Kec. Plandaan
		4.01.4.01.2 1.01.02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan	N/A	100	199.470.000	100	318.340.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Secam	Kec. Plandaan
		4.01.4.01.2 1.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ operasional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Kasubag Umum dan Kepegaw aian	Kec. Plandaan
		4.01.4.01.2 1.01.02.45	Pembangunan gedung kantor / bangunan pendukungnya	Luas gedung kantor/ bangunan pendukungnya yang terbangun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Kasubag Umum dan Kepegaw aian	Kec. Plandaan
		4.01.4.01.2 1.01.02.46	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	N/A	108	65.250.000	109	77.406.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Kasubag Umum dan Kepegaw aian	Kec. Plandaan

Tujuan OPD	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perenc anaan	Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerj a PD Pen ang gun gjaw ab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
						Realis asi	Rp	Realis ai	Rp	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4.01.4.01.2 1.01.02.47	Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya	Luas gedung kantor/ bangunan pendukungnya yang dipelihara	N/A	4	111.820.000	3	237.834.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Kasubag Umum dan Kepegaw aian	Kec. Planda an
		4.01.4.01.2 1.01.02.48	Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	N/A	8	6.300.000	8	3.100.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Kasubag Umum dan Kepegaw aian	Kec. Planda an
		4.01.4.01.2 1.01.02.49	Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	N/A	1	8.100.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Kasubag Umum dan Kepegaw aian	Kec. Planda an
		4.01.4.01.2 1.01.02.64	Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya	Jumlah pengadaan pakaian olahraga dan Pakaian Dinas Harian	N/A	20	8.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Kasubag Umum dan Kepegaw aian	Kec. Planda an
		4.01.4.01.2 1.01.07	Program Perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan	N/A	100	26.670.000	100	11.708.300	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Sekcam	Kec. Planda an

Tujuan OPD	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perenc anaan	Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerj a PD Pen ang gun g jaw ab	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD				
						Realis asi	Rp	Realis ai	Rp	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4.01.4.01.2 1.01.07.01	Penyusunan rencana strategis SKPD	Jumlah Dokumen Renstra Kec. Plandaan yang tersusun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Kasubag Keuanga n, penyusu nan program dan Evaluasi	Kec. Plandaan
		4.01.4.01.2 1.01.07.02	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah Dokumen Renja Kec. Plandaan yang tersusun	N/A	2	14.370.000	2	7.500.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Kasubag Keuanga n, penyusu nan program dan Evaluasi	Kec. Plandaan
		4.01.4.01.2 1.01.07.03	Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan LKJIP yang tersusun	N/A	1	10.950.000	1	2.688.500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Kasubag Keuanga n, penyusu nan program dan Evaluasi	Kec. Plandaan
		4.01.4.01.2 1.01.07.04	Penyusunan laporan keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan Kec. Plandaan yang tersusun	N/A	2	1.350.000	2	1.519.800	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Kasubag Keuanga n, penyusu nan	Kec. Plandaan

Tujuan OPD	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perenc anaan	Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerj a PD Pen ang gun gjaw ab	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD				
						Realis asi	Rp	Realis ai	Rp	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
																			program dan Evaluasi	
Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi				1. Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	66	2.662.740.984	73,39	2.134.044.723	N/A	N/A	73,39	4.796.785,707	CAMAT	Kec. Plan daan	
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja kecamatan				1.Nilai evaluasi AKIP Kec. Plandaan	65,30	N/A	N/A	N/A	N/A	70,01	2.662.740.984	71	2.134.044.723	N/A	N/A	71	4.796.785,707	CAMAT	Kec. Plan daan	
		7.01.01	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	2.662.740.984	100	2.134.044.723	N/A	N/A	100	4.796.785,707	CAMAT	Kec. Plan daan	
		7.01.01.2.01	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai aturan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	16.847.500	100	2.951.900	N/A	N/A	100	19.799,400	Sekretaris Camat	Kec. Plandaan	

Tujuan OPD	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perenc anaan	Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerj a PD Pen ang gun gjaw ab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
						Realis asi	Rp	Realis ai	Rp	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7.01.01.2.0 1.01	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	13.296.000	2	1.584.400	N/A	N/A	5	14,880,400	Kasubba g Keuanga n, Sungram dan Evaluasi	Kec. Plandaan
		7.01.01.2.0 1.06	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	3.551.500	5	1.367.500	N/A	N/A	10	4,919,000	Kasubba g Keuanga n, Sungram dan Evaluasi	Kec. Plandaan
		7.01.01.2.0 2	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	2.230.975.684	100	1.877,391,123	N/A	N/A	100	4,108,366,807	Sekretari s Camat	Kec. Plandaan
				2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100		100		N/A	N/A	100		Sekretari s Camat	Kec. Plandaan
		7.01.01.2.0 2.01	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN lingkup Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14	2.229.925.684	14	1.818,731,123	N/A	N/A	14	4,048,656,807	Kasubba g Keuanga n, Sungram	Kec. Plandaan

Tujuan OPD	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perenc anaan	Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerj a PD Pen ang gun gjaw ab	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD				
						Realis asi	Rp	Realis ai	Rp	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Plandaan yang difasilitasi																
		7.01.01.2.02.03	2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12	58,200,000	N/A	N/A	12	58,200,000			
		7.01.01.2.02.05	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1.050.000	1	460,000	N/A	N/A	2	1,510,000			
		7.01.01.2.05	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Plandaan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13	3,900,000	N/A	N/A	N/A	3,900,000			

Tujuan OPD	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perenc anaan	Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerj a PD Pen ang gun g jab ab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
						Realis asi	Rp	Realis ai	Rp	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7.01.01.2.0 5.02	Sub Kegiatan : 1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13	3,900,000	N/A	N/A	N/A	3,900,000	Kasubba g Keuanga n, Sungram dan Evaluasi	Kec. Planda an
		7.01.01.2.0 6	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	72.999.800	100	23.083.800	N/A	N/A	100	96,083,600	Sekretari s Camat	Kec. Planda an
		7.01.01.2.0 6.02	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	3.039.800	2	13,629,800	N/A	N/A	2	16,669,600		Kec. Planda an
		7.01.01.2.0 6.04	Sub Kegiatan : 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11	52.360.000	N/A	N/A	N/A	N/A	11	52.360.000	Kasubba g Umum dan Kepew gaw aian	Kec. Planda an

Tujuan OPD	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perenc anaan	Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerj a PD Pen ang gun gjaw ab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
						Realis asi	Rp	Realis ai	Rp	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7.01.01.2.0 6.05	Sub Kegiatan : 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Jumlah pemuhan barang cetak	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1,050,000	N/A	N/A	1	1,050,000	Kasubba g Umum dan Kepegaw aian	Kec. Planda an
				2. Jumlah pemuhan barang penggandaan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		10,257		N/A		10,257		Kasubba g Umum dan Kepegaw aian	Kec. Planda an
		7.01.01.2.0 6.06	4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Pemuhan Bahan Bacaan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2,400,000	1	2,352,000	N/A	N/A	1	4,752,000	Kasubba g Umum dan Kepegaw aian	Kec. Planda an
		7.01.01.2.0 6.09	5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	15.000.000	6	4,714,000	N/A	N/A	3	19,714,000	Kasubba g Umum dan Kepegaw aian	Kec. Planda an
		7.01.01.2.0 6.01	6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	200,000	4	1,338,000	N/A	N/A	4	1,538,000	Kasubba g Umum dan Kepegaw aian	Kec. Planda an

Tujuan OPD	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perenc anaan	Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerj a PD Pen ang gun gjaw ab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
						Realis asi	Rp	Realis ai	Rp	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7.01.01.2.0 7	Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	80.970.000	100	56,650,000	N/A	N/A	100	137,620,000	Sekretari s Camat	Kec. Planda
		7.01.01.2.0 7.09	Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	48.720.000	N/A	N/A	N/A	N/A	2	48.720.000	Kasubba g Umum dan Kepegaw aian	Kec. Planda
		7.01.01.2.0 7.11	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana pengadaan sarana gedung kantor	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	32.250.000	3	56,650,000	N/A	N/A	4	88,900,000	Kasubba g Umum dan Kepegaw aian	Kec. Planda
		7.01.01.2.0 8	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	171.480.000	100	132,000,000	N/A	N/A	100	303,480,000	Sekretari s Camat	Kec. Planda
		7.01.01.2.0 8.02	Sub Kegiatan: 1.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12	30,000,000	12	30,000,000	N/A	N/A	12	60,000,000	Kasubba g Umum dan Kepegaw aian	Kec. Planda

Tujuan OPD	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perenc anaan	Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerj a PD Pen ang gun gjaw ab	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD				
						Realis asi	Rp	Realis ai	Rp	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				dan listrik yang terfasilitasi																
		7.01.01.2.0 8.04	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pemenuhan jenis Pelayanan Umum	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	141,480,000	2	102,000,000	N/A	N/A	2	243,480,000	Kasubba g Umum dan Kepegaw aian	Kec. Planda an	
		7.01.01.2.0 8.01	3. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan benda pos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Kasubba g Umum dan Kepegaw aian	Kec. Planda an
		7.01.01.2.0 9	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	85	89,468,000	85	38,067,900	N/A	N/A	85	127,535,900	Sekretari s Camat	Kec. Planda an	
		7.01.01.2.0 9.02	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas	1. Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	48,468,000	1	27,957,900	N/A	N/A	1	76,425,900	Kasubba g Umum dan Kepegaw aian	Kec. Planda an	

Tujuan OPD	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perenc anaan	Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerj a PD Pen ang gun gjaw ab	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD				
						Realis asi	Rp	Realis ai	Rp	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Operasional atau lapangan																	
				2. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20		10		N/A	N/A	10				Kec. Plandaan
		7.01.01.2.09.09	2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Plandaan yang dipelihara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	34.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A			Kec. Plandaan
		7.01.01.2.09.010	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	19	7.000.000	15	10,110,000	N/A	N/A	34	17,110,000			Kec. Plandaan
Meningkatkan kualitas layanan publik				Indeks kualitas pelayanan publik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7,90	98,124,100	7,99	39,265,700	N/A	N/A	7,99	137,389,800	CAMAT		Kec. Plandaan

Tujuan OPD	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perenc anaan	Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerj a PD Pen ang gun gjaw ab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
						Realis asi	Rp	Realis ai	Rp	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kecamatan			1. IKM Kecamatan Plandaan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	92,67	39,766,100	93,80	5,633,000	N/A	N/A	93,80	45,399,100	CAMAT	Kec. Plandaan
				2. IPP Kecamatan Plandaan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,27	39,766,100	3,30	5,633,000	N/A	N/A	3,30	45,399,100	CAMAT	Kec. Plandaan
		7.01.02	Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	83,10	13,041,100	83,25	4,733,000	N/A	N/A	83,25	17,774,100	CAMAT	Kec. Plandaan
		7.01.02.2.01	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	13,041,100	100	4,733,000	N/A	N/A	100	17,774,100	Kasi Tapem	Kec. Plandaan
		7.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	13,041,100	100	4,733,000	N/A	N/A	100	17,774,100	Kasi Tapem	Kec. Plandaan

Tujuan OPD	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perenc anaan	Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerj a PD Pen ang gun gjaw ab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
						Realis asi	Rp	Realis ai	Rp	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100		100		N/A	N/A	100	27,625,000	Kasi Tapem	Kec. Plandaan
		7.01.05	Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	26,725,000	100	900,000	N/A	N/A	100		CAMAT	Kec. Plandaan
				Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		100		N/A	N/A	100		CAMAT	Kec. Plandaan
		7.01.05.2.01	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	26,725,000	1	900,000	N/A	N/A	4	27,625,000	Kasi Sosbud	Kec. Plandaan
				Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		4		N/A	N/A	4		Kasi Sosbud	Kec. Plandaan
		7.01.05.2.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi)	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	26,725,000	1	700,000	N/A	N/A	4	27,425,000	Kasi Sosbud	Kec. Plandaan

Tujuan OPD	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perenc anaan	Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerj a PD Pen ang gun gjaw ab	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD				
						Realis asi	Rp	Realis ai	Rp	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																	
		7.01.05.2.0 1.08	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Forkopimcam	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	200,000	N/A	N/A	4	200,000		Kasi Sosbud	Kec. Planda
				3. Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	21,225,000	100	7,069,750	N/A	N/A	100	28,294,750	CAMAT	Kec. Planda	
		7.01.04	Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	21,225,000	100	7,069,750	N/A	N/A	100	28,294,750	CAMAT	Kec. Planda	

Tujuan OPD	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perenc anaan	Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerj a PD Pen ang gun gjaw ab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
						Realis asi	Rp	Realis ai	Rp	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7.01.04.2.0 2	Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12	21,225,000	12	7,069,750	N/A	N/A	36	28,294,750	Kasi Trantib	Kec. Plandaan
		7.01.04.2.0 2.01	Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12	21,225,000	12	7,069,750	N/A	N/A	36	28,294,750	Kasi Trantib	Kec. Plandaan
				4. Persentase Laporan Pertanggungjawab	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	15,412,500	100	10,510,000	N/A	N/A	100	25,922,500	Camat	Kec. Plandaan

Tujuan OPD	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perenc anaan	Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerj a PD Pen ang gun gjaw ab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
						Realis asi	Rp	Realis ai	Rp	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				an Realisasi APB Desa Tepat Waktu															
		7.01.06	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawab an Realisasi APB Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	15,412,500	100	10,510,000	N/A	N/A	100	25,922,500	Camat	Kec. Plandaan
				Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100		100		N/A	N/A	100		Camat	Kec. Plandaan
		7.01.06.2.0 1	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26	15,412,500	26	10,510,000	N/A	N/A	52	25,922,500	Kasi Tapem	Kec. Plandaan
		7.01.06.2.0 1.02	Sub Kegiatan: Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26	15,412,500	26	10,510,000	N/A	N/A	52	25,922,500	Kasi Tapem	Kec. Plandaan

Tujuan OPD	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perenc anaan	Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerj a PD Pen ang gun gjaw ab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
						Realis asi	Rp	Realis ai	Rp	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				5. Persentase Evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	19,720,500	100	18,356,000	N/A	N/A	100	38,076,500	CAMAT	Kec. Plandaan
		7.01.03	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	19,720,500	100	18,356,000	N/A	N/A	100	38,076,500	CAMAT	Kec. Plandaan
				2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26		26		N/A	N/A	26		CAMAT	Kec. Plandaan
		7.01.03.2.01.	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1. Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26	19,720,500	26	18,356,000	N/A	N/A	52	38,076,500	Kasi PMD	Kec. Plandaan
				2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26		26		N/A	N/A	26		Kasi PMD	Kec. Plandaan

Tujuan OPD	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penggabungan	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Masyarakat Desa yang dibina															
		7.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1. Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26	19,720,500	26	18,356,000	N/A	N/A	52	38,076,500	Kasi PMD	Kec. Plandaan
				2. Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan	N/A	N/A	N/A	N/A	13		13		N/A	N/A	13	Kasi PMD		Kec. Plandaan	
				3. Jumlah TP PKK yang dikoordinasikan	N/A	N/A	N/A	N/A	13		13		N/A	N/A	13	Kasi PMD		Kec. Plandaan	
Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi				1. Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	76	2,480,832,442	76	2,480,832,442	CAMAT	Kec. Plandaan
	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja kecamatan			1. Nilai evaluasi AKIP Kec. Plandaan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	72	2,480,832,442	72	2,480,832,442	CAMAT	Kec. Plandaan
		7.01.01	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	2,480,832,442	100	2,480,832,442	CAMAT	Kec. Plandaan

Tujuan OPD	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perenc anaan	Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerj a PD Pen ang gun gjaw ab	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD				
						Realis asi	Rp	Realis ai	Rp	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Daerah Kabupaten/ kota																	
		7.01.01.2.0 1	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	7,702,250	100	7,702,250	Sekretari s Camat	Kec. Planda	
		7.01.01.2.0 1.01	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	3,050,800	3	3,050,800	Kasubba g Keuanga n, Sungram dan Evaluasi	Kec. Planda	
		7.01.01.2.0 1.06	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	4,651,450	5	4,651,450	Kasubba g Keuanga n, Sungram dan Evaluasi	Kec. Planda	
		7.01.01.2.0 2	Kegiatan: Administrasi	1. Persentase pencairan gaji	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	2,204,963,49 2	100	2,204,963, 492	Sekretari s Camat	Kec. Planda	

Tujuan OPD	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perenc anaan	Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerj a PD Pen ang gun gjaw ab	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD				
						Realis asi	Rp	Realis ai	Rp	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Keuangan Perangkat Daerah	dan tunjangan ASN tepat waktu																
				2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100		100			Sekretari s Camat	Kec. Plandaan
		7.01.01.2.0 2.01	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13	2,137,758,49 2	13	2,137,758, 492		Kasubba g Keuanga n, Sungram dan Evaluasi	Kec. Plandaan
		7.01.01.2.0 2.03	2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifika si keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12	66,810,000	12	66,810,000		Kasubba g Keuanga n, Sungram dan Evaluasi	Kec. Plandaan
		7.01.01.2.0 2.05	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	395,000	1	395,000		Kasubba g Keuanga n, Sungram dan Evaluasi	Kec. Plandaan

Tujuan OPD	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perenc anaan	Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerj a PD Pen ang gun gjaw ab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
						Realis asi	Rp	Realis ai	Rp	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7.01.01.2.05	Kegiatan: Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	Persentase pemuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Plandaan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Sekretari s Camat	Kec. Plandaan
		7.01.01.2.05.02	Sub Kegiatan : 1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Kasubba g Umum dan Kepew gaw aian	Kec. Plandaan
		7.01.01.2.06	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemuhan pelayanan administrasi perkantoran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	92,559,340	100	92,559,340	Sekretari s Camat	Kec. Plandaan
		7.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40	16,474,300	40	16,474,300	Kasubba g Umum dan Kepew gaw aian	Kec. Plandaan
		7.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan : 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11	43,890,000	11	43,890,000	Kasubba g Umum dan	Kec. Plandaan

Tujuan OPD	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perenc anaan	Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerj a PD Pen ang gun gjaw ab	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD				
						Realis asi	Rp	Realis ai	Rp	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
																			Kepegaw aian	
		7.01.01.2.0 6.05	Sub Kegiatan : 3. Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak an dan Penggandaan yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	3,127,600	2	3,127,600	Kasubba g Umum dan Kepegaw aian	Kec. Planda an	
		7.01.01.2.0 6.06	4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2,220,000	1	2,220,000	Kasubba g Umum dan Kepegaw aian	Kec. Planda an	
		7.01.01.2.0 6.09	5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7	24,082,000	7	24,082,000	Kasubba g Umum dan Kepegaw aian	Kec. Planda an	
		7.01.01.2.0 6.01	6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6	2,765,440	6	2,765,440	Kasubba g Umum dan Kepegaw aian	Kec. Planda an	
		7.01.01.2.0 7	Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan	Persentase realisasi pengadaan sarana	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	17,167,000	100	17,167,000	Sekretari s Camat	Kec. Planda an	

Tujuan OPD	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perenc anaan	Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerj a PD Pen ang gun gjaw ab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
						Realis asi	Rp	Realis ai	Rp	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			pemerintah Daerah	dan prasarana aparat															
		7.01.01.2.07.09	Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Kasubba g Umum dan Kepegaw aian	Kec. Plandaan
		7.01.01.2.07.10	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	17,167,000	2	17,167,000	Kasubba g Umum dan Kepegaw aian	Kec. Plandaan
		7.01.01.2.08	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	122,700,360	100	122,700,360	Sekretari Os Camat	Kec. Plandaan
		7.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12	20,000,000	12	20,000,000	Kasubba g Umum dan Kepegaw aian	Kec. Plandaan
		7.01.01.2.08.04	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26	102,700,360	26	102,700,360	Kasubba g Umum dan	Kec. Plandaan

Tujuan OPD	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perenc anaan	Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerj a PD Pen ang gun gjaw ab	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD				
						Realis asi	Rp	Realis ai	Rp	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Kantor yang Disediakan															Kepegaw aian	
		7.01.01.2.0 8.01	3. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Kasubba g Umum dan Kepegaw aian	Kec. Planda
		7.01.01.2.0 9	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	85	35,740,000	85	35,740,000	Sekretari s Camat	Kec. Planda	
		7.01.01.2.0 9.02	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9	31,070,000	9	31,070,000	Kasubba g Umum dan Kepegaw aian	Kec. Planda	
		7.01.01.2.0 9.09	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Kasubba g Umum dan Kepegaw aian	Kec. Planda

Tujuan OPD	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penggabungan	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7.01.01.2.09.10	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7	4,670,000	7	4,670,000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kec. Plandaan
Meningkatkan kualitas layanan publik				Indeks kualitas pelayanan publik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8,04	69,317,450	8,04	69,317,450	CAMAT	Kec. Plandaan
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kecamatan			1. IKM Kecamatan Plandaan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	93,85	29,649,100	93,85	29,649,100	CAMAT	Kec. Plandaan
				2. IPP Kecamatan Plandaan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,35	29,649,100	3,35	29,649,100	CAMAT	Kec. Plandaan
		7.01.02	Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	84	3,460,800	84	3,460,800	CAMAT	Kec. Plandaan
		7.01.02.2.02	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	3,460,800	100	3,460,800	Kasi Tapem	Kec. Plandaan

Tujuan OPD	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penggabungan	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7.01.02.2.01.03	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12	3,460,800	12	3,460,800	Kasi Tapem	Kec. Plandaan
		7.01.05	Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	26,188,300	100	26,188,300	CAMAT	Kec. Plandaan
				Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	100		100		CAMAT	Kec. Plandaan
		7.01.05.2.01	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	26,188,300	1	26,188,300	Kasi Sosbud	Kec. Plandaan
				Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4		4		Kasi Sosbud	Kec. Plandaan
		7.01.05.2.01.03	Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	17,432,800	100	17,432,800	Kasi Sosbud	Kec. Plandaan

Tujuan OPD	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perenc anaan	Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerj a PD Pen ang gun gjaw ab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
						Realis asi	Rp	Realis ai	Rp	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Persatuan dan Kesatuan Bangsa															
		7.01.05.2.01.08	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	8,755,500	4	8,755,500	Kasi Sosbud	Kec. Plandaan
				3. Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	7,069,750	100	7,069,750	CAMAT	Kec. Plandaan
		7.01.04	Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	7,069,750	100	7,069,750	CAMAT	Kec. Plandaan
		7.01.04.2.02	Kegiatan: Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12	7,069,750	12	7,069,750	Kasi Trantib	Kec. Plandaan

Tujuan OPD	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perenc anaan	Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerj a PD Pen ang gun gjaw ab	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD				
						Realis asi	Rp	Realis ai	Rp	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		7.01.04.2.0 2.01	Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		12	7,069,750	12	7,069,750	Kasi Trantib	Kec. Planda
				4. Persentase Laporan Pertanggungjawab an Realisasi APB Desa Tepat Waktu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	2,055,300	100	2,055,300	Camat	Kec. Planda	
		7.01.06	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawab an Realisasi APB Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	2,055,300	100	2,055,300	Camat	Kec. Planda	
				Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100		100		Camat	Kec. Planda	

Tujuan OPD	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perenc anaan	Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerj a PD Pen ang gun gjaw ab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
						Realis asi	Rp	Realis ai	Rp	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Desa yang ditindaklanjuti															
		7.01.06.2.0 1	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26	2,055,300	26	2,055,300	Kasi Tapem	Kec. Plandaan
		7.01.06.2.0 1.03	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26	2,055,300	26	2,055,300	Kasi Tapem	Kec. Plandaan
				5. Persentase Evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	30,543,300	100	30,543,300	CAMAT	Kec. Plandaan
		7.01.03	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	30,543,300	100	30,543,300	CAMAT	Kec. Plandaan

Tujuan OPD	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perenc anaan	Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerj a PD Pen ang gun gjaw ab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
						Realis asi	Rp	Realis ai	Rp	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targe t	Rp.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26		26		CAMAT	Kec. Planda
		7.01.03.2.0 1.	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26	30,543,300	26	30,543,300	Kasi PMD	Kec. Planda
		7.01.03.2.0 1.03	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	30,543,300	4	30,543,300	Kasi PMD	Kec. Planda



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022 KECAMATAN PLANDAAN KABUPATEN JOMBANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **SUPARNO, SH**  
Jabatan : **CAMAT PLANDAAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Hj. MUNDJIDAH WAHAB**  
Jabatan : **BUPATI JOMBANG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
**BUPATI JOMBANG**

**Hj. MUNDJIDAH WAHAB**

Jombang, 23 September 2022  
Pihak Pertama

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN PLANDAAN  
  
**SUPARNO, SH**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19670510 199302 1 003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
KECAMATAN PLANDAAN KABUPATEN JOMBANG**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	1. Nilai Evaluasi AKIP Kec. Plandaan	71
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	1. IKM Kecamatan Plandaan	93,80
		2. IPP Kecamatan Plandaan	3,30
		3. Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%
		4. Persentase Laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu	100%
		5. Persentase evaluasi Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa tepat waktu	100%

NO.	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja Aparatur	100%	2.134.044.723
2.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	83,25	4.733.000
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA yang dilaksanakan	100%	900.000
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	
			Persentase kegiatan sosial budaya yang ditindaklanjuti	100%	
4.	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke instansi terkait	100%	4.766.700
5.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaporkan pertanggungjawaban realisasi APBDesa	100%	10.510.000

			Persentase rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDesa yang ditindaklanjuti	100%	
6.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APBDesa/ Perubahan APBDesa yang di evaluasi	100%	18.356.000
			Jumlah Lembaga/ Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan yang aktif	26 lembaga	
<b>Jumlah</b>					<b>2.173.310.423</b>

Pihak Kedua  
**BUPATI JOMBANG**

Hj. MUNDJIDAH WAHAB

Jombang, 23 September 2022  
Pihak Pertama

CAMAT PLANDAAN  
KECAMATAN PLANDAAN  
*Suparno SH*  
**SUPARNO, SH**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19670510 199302 1 003

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s.d. Tahun 2022**  
**Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang**

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2022	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD pada Renja 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan Renja)	
					Target Renja 2022		Realisasi Triwulan II (sesuai SPD)		K	Rp.
					K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>7.01.01</b>	<b>Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota</b>	<b>Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>50.00%</b>	<b>100%</b>	2.388.468.992	<b>50.00%</b>	<b>930.582.158</b>	<b>50.00%</b>	<b>930.582.158</b>
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Kegiatan:</b> Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	<b>57.00%</b>	100%	4.190.700	<b>57.00%</b>	<b>2.006.000</b>	<b>57.00%</b>	<b>2.006.000</b>
7.01.01.2.01.01	<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	2 dok	<b>1 dok</b>	2 dok	2.823.200	<b>1 dok</b>	<b>1.265.000</b>	<b>1 dok</b>	<b>1.265.000</b>
7.01.01.2.01.06	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	5 lap	<b>3 lap</b>	5 lap	1.367.500	<b>3 lap</b>	<b>741.000</b>	<b>3 lap</b>	<b>741.000</b>
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Kegiatan:</b> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase Pencairan Gaji dan Tunjangan ASN tepat waktu	100%	<b>50.00%</b>	100%	2.196.418.492	<b>50.00%</b>	<b>837.232.462</b>	<b>50.00%</b>	<b>837.232.462</b>

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2022	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD pada Renja 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan Renja)	
					Target Renja 2022		Realisasi Triwulan II (sesuai SPD)		K	Rp.
					K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	<b>100%</b>	100%		<b>100%</b>		<b>100%</b>	
7.01.01.2.02.01	<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN lingkup Kecamatan Plandaan yang difasilitasi	14 bln	<b>7 bln</b>	14 bln	2.137.758.492	<b>7 bln</b>	<b>807.672.462</b>	<b>8 bln</b>	<b>807.672.462</b>
7.01.01.2.02.05	2. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	1 lap	<b>1 lap</b>	1 lap	460.000	<b>1 lap</b>	<b>460.000</b>	<b>1 lap</b>	<b>460.000</b>
7.01.01.2.02.03	<b>3.</b> Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 kali	<b>6 kali</b>	12 kali	58.200.000	<b>6 kali</b>	<b>29.100.000</b>	<b>6 kali</b>	<b>29.100.000</b>
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Kegiatan:</b> Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	<b>50.00%</b>	100%	18.029.800	<b>50.00%</b>	<b>8.860.400</b>	<b>50.00%</b>	<b>8.860.400</b>
7.01.01.2.06.02	<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	2 jenis	<b>2 jenis</b>	2 jenis	13.629.800	<b>2 jenis</b>	<b>6.811.400</b>	<b>2 jenis</b>	<b>6.811.400</b>
7.01.01.2.06.04	<b>Sub Kegiatan :</b> 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.06.05	3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1. Jumlah pemenuhan barang cetak	1 buku	<b>1 buku</b>	1 buku	1.050.000	1 buku	500.000	1 buku	500.000
		2. Jumlah pemenuhan barang penggandaan	10.257 lembar	<b>3.500 lembar</b>	10.257 lembar		3.500 lembar		3.500 lembar	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2022	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD pada Renja 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan Renja)	
					Target Renja 2022		Realisasi Triwulan II (sesuai SPD)		K	Rp.
					K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01.2.06.06	4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pemenuhan Bahan Bacaan	1 jenis	1 jenis	1 jenis	2.352.000	1 jenis	1.050.000	1 jenis	1.050.000
7.01.01.2.06.09	5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.06.01	6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi	4 jenis	4 jenis	4 jenis	998.000	4 jenis	499.000	4 jenis	499.000
7.01.01.2.07	<b>Kegiatan:</b> Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.07.10	<b>Sub Kegiatan :</b> Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.08	<b>Kegiatan:</b> Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	50.00%	100%	132.000.000	50.00%	67.649.122	50.00%	67.649.122
7.01.01.2.08.02	<b>Sub Kegiatan:</b> 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	12 bln	6 bulan	12 bln	30.000.000	6 bulan	16.755.796	6 bulan	16.755.796
7.01.01.2.08.04	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pemenuhan jenis Pelayanan Umum Kantor	2 jenis	2 jenis	2 jenis	102.000.000	2 jenis	50.893.326	2 jenis	50.893.326

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2022	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD pada Renja 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan Renja)	
					Target Renja 2022		Realisasi Triwulan II (sesuai SPD)		K	Rp.
					K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01.2.08.01	3. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan surat menyurat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Kegiatan:</b> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	85.00%	<b>85.00%</b>	85.00%	37.830.000	<b>85.00%</b>	<b>14.834.174</b>	<b>85.00%</b>	<b>14.834.174</b>
7.01.01.2.09.02	<b>Sub Kegiatan:</b> 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	1 unit	<b>1 unit</b>	1 unit	27.720.000	<b>1 unit</b>	<b>9.841.674</b>	<b>1 unit</b>	<b>9.841.674</b>
		2. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya.	10 unit	<b>2 unit</b>	10 unit		<b>2 unit</b>		<b>2 unit</b>	
7.01.01.2.09.10	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	15 unit	<b>8 unit</b>	15 unit	10.110.000	<b>8 unit</b>	<b>4.992.500</b>	<b>8 unit</b>	<b>4.992.500</b>
<b>7.01.02</b>	<b>Program:</b> <b>Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Nilai Paten Kecamatan</b>	<b>83,25</b>	-	<b>83,25</b>	<b>4.733.000</b>	-	<b>2.216.250</b>	-	<b>2.216.250</b>
7.01.02.2.01	<b>Kegiatan :</b> Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	<b>100%</b>	100%	<b>4.733.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.216.250</b>	<b>100%</b>	<b>2.216.250</b>

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2022	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD pada Renja 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan Renja)	
					Target Renja 2022		Realisasi Triwulan II (sesuai SPD)			
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kecamatan									
7.01.02.2.01.02	<b>Sub Kegiatan:</b> Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi	100%	100%	100%	4.733.000	100%	2.216.250	100%	2.216.250
		Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi	100%	100%	100%		100%		100%	
<b>7.01.05</b>	<b>Program:</b> Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	<b>Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan</b>	100%	0.00%	100%		0.00%		0.00%	
		<b>Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti</b>	100%	50.00%	100%		50.00%		50.00%	
7.01.05.2.01	<b>Kegiatan:</b> Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	1 lap	0 lap	1 lap		0 lap		0 lap	
		Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	2 dokumen	4 dokumen		2 dokumen		2 dokumen	
7.01.05.2.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi)	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan	1 keg	0 keg	1 keg		0 keg		0 keg	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2022	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD pada Renja 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan Renja)	
					Target Renja 2022		Realisasi Triwulan II (sesuai SPD)			
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional									
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi Forkopimcam	4 laporan	2 laporan	4 laporan		2 laporan		2 laporan	
<b>7.01.04</b>	<b>Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait</b>	<b>100%</b>	<b>50.00%</b>	<b>100%</b>	<b>5.138.200</b>	<b>50.00%</b>	<b>2.825.000</b>	<b>50.00%</b>	<b>2.825.000</b>
7.01.04.2.02	<b>Kegiatan:</b> Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	12 lap	6 lap	12 lap	5.138.200	6 lap	2.825.000	6 lap	2.825.000
7.01.04.2.02.01	<b>Sub Kegiatan:</b> Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	12 keg	6 keg	12 keg	5.138.200	6 keg	2.825.000	6 keg	2.825.000
<b>7.01.06</b>	<b>Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa</b>	<b>100%</b>	<b>50.00%</b>	<b>100%</b>	<b>12.610.000</b>	<b>50.00%</b>	<b>6.730.000</b>	<b>50.00%</b>	<b>6.730.000</b>

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2022	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD pada Renja 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan Renja)	
					Target Renja 2022		Realisasi Triwulan II (sesuai SPD)		K	Rp.
					K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>	<b>50.00%</b>	<b>100%</b>		<b>50.00%</b>		<b>50.00%</b>	
7.01.06.2.01	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	26 dok	13 dok	26 dok	12.610.000	13 dok	6.730.000	13 dok	6.730.000
7.01.06.2.01.02	Sub Kegiatan: Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	26 lap	13 lap	26 lap	12.610.000	13 lap	6.730.000	13 lap	6.730.000
7.01.03	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	<b>1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi</b>	<b>100%</b>	<b>50.00%</b>	<b>100%</b>	<b>9.687.600</b>	<b>50.00%</b>	<b>7.074.400</b>	<b>50.00%</b>	<b>7.074.400</b>
		<b>2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif</b>	<b>26 lembaga</b>	<b>26 lembaga</b>	<b>26 lembaga</b>		<b>26 lembaga</b>		<b>26 lembaga</b>	
7.01.03.2.01	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu	26 dok	13 dok	26 dok	9.687.600	13 dok	7.074.400	13 dok	7.074.400
		2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	26 lembaga	26 lembaga	26 lembaga		26 lembaga		26 lembaga	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2022	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD pada Renja 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan Renja)	
					Target Renja 2022		Realisasi Triwulan II (sesuai SPD)			
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>7.01.03.2.01.01</b>	<b>Sub Kegiatan:</b> Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1. Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa	26 dok	<b>13 dok</b>	26 dok	<b>9.687.600</b>	<b>13 dok</b>	<b>7.074.400</b>	<b>13 dok</b>	<b>7.074.400</b>
		2. Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan	13 BUMDes	<b>13 BUMDes</b>	13 BUMDes		<b>13 BUMDes</b>		<b>13 BUMDes</b>	
		3. Jumlah TP PKK yang dikoordinasikan	13 TP PKK	<b>13 TP PKK</b>	13 TP PKK		<b>13 TP PKK</b>		<b>13 TP PKK</b>	
<b>JUMLAH</b>						<b>2.419.637.792</b>		<b>949.427.808</b>		<b>949.427.808</b>

**PENGUKURAN KINERJA  
TRIBUNAL IV TAHUN 2022**

1 NAMA : SUPARNO, SH  
 2 NIP : 19670510 199302 1 003  
 3 PANGKAT/GOL. RUANG : PENATA TK. I / III d  
 4 JABATAN : CAMAT  
 5 UNIT KERJA : KECAMATAN PLANDAAN

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI s.d TRIBUNAL IV	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN				PENJELASAN	ALTERNATIF/ UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN	BUKTI DUKUNG	
						NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)				% REALISASI
1	Pengimplementasian SAKIP yang membudaya di Kecamatan Plandaan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Plandaan	71.00	70.17	98.83%	1	Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	2,134,044,723.00	2,002,041,515.00	93.81%	<p>Tingkat keberhasilan dapat dinilai kurang berhasil namun masih dalam kategori BB. Indikator kinerja utama nilai evaluasi AKIP Kec. Plandaan belum berhasil mencapai target yang ditetapkan (target 71 terealisasi 70.17, tercapai 98,83%).</p> <p>Hambatan : Nilai AKIP belum maksimal karena belum mencapai target yang telah ditetapkan dimana pengumpulan kinerja dan pengukuran kinerja belum dilakukan menggunakan teknologi aplikasi serta hasil capaian kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian anggaran</p> <p>Rekomendasi perbaikan : Melakukan evaluasi atas mekanisme monitoring target jangka menengah, reward and punishment, perbaikan SOP pengumpulan data kinerja, Menggunakan teknologi informasi (aplikasi) untuk melakukan pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja, Meningkatkan kualitas evaluasi pengukuran kinerja, Melakukan evaluasi pada dokumen LKjIP, mengusulkan penggunaan teknologi informasi (aplikasi) dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal kepada Bagian Organisasi, Menambahkan informasi efisiensi atas SDM yang kompeten dan sarpras yang memadai dalam laporan kinerja dan Menjadikan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar penyesuaian aktivitas anggaran maupun perencanaan kinerja</p>	<p>Telah dilakukan rapat internal dan koordinasi dengan seluruh stakeholder untuk perbaikan dokumen AKIP</p> <p>Rencana Tindak Lanjut : Berkoordinasi dengan Tim AKIP Kabupaten untuk pendampingan dan segera dilakukan tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi AKIP tahun 2022 untuk perbaikan pada tahun 2023</p>	  
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat pengguna layanan Kecamatan Plandaan	IKM Kecamatan Plandaan	93.80	94.22	100.45%	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	4,733,000.00	4,733,000.00	100.00%	<p>Tingkat keberhasilan telah berhasil 100.45%. Indikator kinerja utama IKM Kec. Plandaan telah berhasil mencapai target yang ditetapkan (target 93.80 terealisasi 94.22, tercapai 100.45%).</p> <p>Hambatan : Nilai IKM belum maksimal meskipun telah mencapai target yang telah ditetapkan</p> <p>Rekomendasi perbaikan : Pengisian kuisioner survey kepuasan masyarakat agar terus dilanjutkan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat agar terus ditingkatkan. Percepatan penyerapan anggaran sesuai dengan rencana anggaran kas</p>	<p>Telah dilaksanakan koordinasi, menyela dan supervisi kepuasan pelayanan publik</p> <p>Rencana Tindak Lanjut : Berkoodinasi dengan Bagian Organisasi untuk monev survey IKM Kec</p>	
3	Meningkatnya pelayanan publik sesuai standart	IPP Kecamatan Plandaan	3.30	3.49	105.76%	3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	900,000.00	700,000.00	77.78%	<p>Tingkat keberhasilan telah berhasil 105.76%. Indikator kinerja utama IPP Kec. Plandaan telah berhasil mencapai target yang ditetapkan (target 3.30 terealisasi 3.49, tercapai 105.76%).</p>	<p>Telah dilaksanakan koordinasi, menyela dan supervisi kepuasan pelayanan publik</p>	

											<p>Hambatan : Sarana dan prasarana pelayanan PATEN masih belum lengkap seperti ruang pelayanan PATEN yang terpisah, playground, CCTV, penambahan petugas loket dll)</p> <p>Rekomendasi perbaikan : Melakukan perbaikan sarpras pelayanan dengan mengajukan tambahan anggaran untuk renovasi gedung PATEN, pengadaan playground, CCTV dan menambah petugas loket.</p>	<p>Rencana Tindak Lanjut : Berkoordinasi dengan Bappeda terkait usulan tambahan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana pelayanan</p> <p>Menindaklanjuti hasil evaluasi IPP 2022. Dilakukan perbaikan sarpras dan profesionalisme SDM agar penilaian IPP Tahun 2023 dapat lebih baik lagi.</p>	
4	Tindaklanjut pelanggaran perda dan trantibum tepat waktu	Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100.00%	100.00%	100.00%	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	4,766,700.00	4,754,000.00	99.73%	<p>Tingkat keberhasilan telah berhasil 100%. Indikator Kinerja Utama Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait telah berhasil dicapai sesuai dokumen perencanaan (target sd. TB IV adalah 12 laporan, realisasi 12 laporan rutin tiap bulan), tercapai 100%) Sehingga capaian kinerja tahunan telah tercapai 100% (target 12 laporan terealisasi 12 laporan)</p> <p>Hambatan : Pelanggaran Perda dan Trantibum memerlukan waktu untuk dilaporkan dan ditindaklanjuti</p> <p>Rekomendasi perbaikan : Setiap pelanggaran perda dan trantibum harus segera ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada instansi terkait. Percepatan penyerapan anggaran sesuai dengan rencana anggaran kas</p>	<p>Telah dilakukan koordinasi, menyelia dan supervisi Laporan kasus Pelanggaran Perda/Perkada dengan Instansi Terkait. Setiap kasus yang membutuhkan tindak lanjut instansi terkait selah dilaporkan dan dikoordinasikan tepat waktu untuk segera ditindaklanjuti.</p> <p>Rencana Tindak Lanjut : Setiap pelanggaran perda dan trantibum harus segera ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada instansi terkait. Berkoordinasi dengan Satpol PP Kabupaten untuk laporan pelanggaran perda/perkada dan trantibum yang perlu ditindaklanjuti instansi terkait</p>	
5	Pelaporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tepat waktu	Persentase laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100.00%	100.00%	100.00%	5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10,510,000.00	10,510,000.00	100.00%	<p>Tingkat keberhasilan telah berhasil 100%. Indikator Kinerja Utama Persentase laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu telah berhasil dicapai sesuai dokumen perencanaan (target sd. TB IV adalah 26 laporan, realisasi 26 laporan, tercapai 100%). Sehingga capaian kinerja tahunan telah tercapai 100% (target 26 laporan, terealisasi 26 laporan)</p> <p>Hambatan : laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes dari desa tidak segera dikirim ke Kecamatan</p> <p>Rekomendasi Perbaikan: Melakukan pembinaan dan evaluasi dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban APBDesa tepat waktu</p>	<p>Telah dilakukan koordinasi pendampingan penyusunan pertanggungjawaban APBDes TB IV (monev aset, produk hukum desa, LRA, penatausahaan keuangan, SPJ, fisik dan non fisik).</p> <p>Telah dilakukan koordinasi, menyelia, dan supervisi Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti</p> <p>Rencana Tindak Lanjut : Melakukan koordinasi dengan Desa dan memfasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban DD dan Jombang berkadang tepat waktu untuk pencairan anggaran tahap berikutnya</p>	

6	Evaluasi Raperdes APBDesa/ APB Desa Tepat waktu	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa tepat waktu	100.00%	100.00%	100.00%	6	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	18,356,000.00	16,353,400.00	89.09%	<p>Tingkat keberhasilan telah berhasil 100%. Indikator Kinerja Utama Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa tepat waktu telah berhasil dicapai sesuai dokumen perencanaan (target sd. TB IV adalah 26 dokumen, realisasi 26 dokumen, tercapai 100%). Sehingga capaian kinerja tahunan telah tercapai 100.00% (target 26 dokumen terealisasi 26 dokumen (Raperdes APBDes dan Raperdes P ABDes sejumlah 13 desa)</p> <p>Hambatan : Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa tidak segera dikirim ke Kecamatan</p> <p>Rekomendasi perbaikan : - Melaksanakan pembinaan dan evaluasi penyusunan Raperdes APBDes/Perubahan APBDes agar sesuai aturan dan tepat waktu -Melaksanakan koordinasi penyusunan Raperdes APBDes/ Perubahan APBDes dengan OPD terkait</p>	<p>Telah dilakukan koordinasi, menyelia, dan supervisi Perencanaan Pembangunan Desa Tingkat Kecamatan</p> <p>Rencana Tindak Lanjut : Menyelia pelaksanaan APBDes dan melakukan supervisi dalam penyusunan pelaksanaan APBDes yang sesuai aturan</p>	
<b>KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN</b>													
NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI s.d TRIBUNAL IV	CAPAIAN (%)	NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI	PENJELASAN	ALTERNATIF/ UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN	BUKTI DUKUNG
1	Meningkatnya kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100.00%	100.00%	100.00%	1	Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	2,134,044,723.00	2,002,041,515.00	93.81%	<p>Tingkat keberhasilan telah berhasil 100%. Indikator Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur telah berhasil dicapai sesuai dokumen perencanaan (target sd. TB IV adalah 100%, realisasi 100%, tercapai 100%). Sehingga capaian kinerja tahunan telah tercapai 100% (target 100% terealisasi 100%)</p> <p>Berdasarkan hasil perhitungan formulasi capaian kinerja dapat dikatakan kinerja pegawai Kecamatan Plandaan sangat baik dengan rata-rata capaian 101,53</p> <p>Hambatan : -Pengukuran capaian kinerja dilaksanakan tribulan dan tahunan pada saat penyusunan LKJIP masing-masing ASN</p> <p>Rekomendasi perbaikan : Kinerja aparatur perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan agar kinerja aparatur tidak sampai menurun. Percepatan penyerapan anggaran sesuai dengan rencana anggaran kas</p>	<p>-Telah dilakukan koordinasi, menyelia dan supervisi capaian kinerja aparatur Kecamatan Plandaan</p> <p>-Setiap triwulan dilaksanakan pengukuran kinerja tribulan untuk memonitoring kinerja setiap ASN agar target yang diperjanjikan pada PK dapat terpenuhi.</p> <p>-Laporan pengukuran kinerja dikirim ke Bagor untuk diverifikasi dan di entry dalam aplikasi TPP</p> <p>Rencana Tindak lanjut : -Memastikan laporan capaian kinerja disusun sesuai aturan dan tepat waktu</p> <p>Dilaksanakan monitoring capaian kinerja secara berkala melalui pengukuran kinerja tribulan dan monitoring rencana aksi untuk monitoring kinerja setiap ASN agar target dapat terpenuhi</p>	
2	Meningkatnya PATEN sesuai dengan standar	Nilai Paten Kecamatan	83.25	86.31	103.68%	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	4,733,000.00	4,733,000.00	100.00%	<p>Tingkat keberhasilan telah berhasil 103,68%. Indikator Nilai Paten Kecamatan telah berhasil dicapai sesuai dokumen perencanaan (target 83,25, realisasi 86,31, tercapai 103,68%). Sehingga capaian kinerja tahunan telah tercapai 103,68%</p>	<p>Telah dilakukan koordinasi menyelia dan supervisi kepuasan penyelenggaraan pelayanan publik</p>	

											<p>Hambatan : Sarana dan prasarana pelayanan PATEN masih belum lengkap seperti ruang pelayanan PATEN yang terpisah, playground, CCTV, penambahan petugas loket dll)</p> <p>Rekomendasi perbaikan : -Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat -Melakukan perbaikan sarpras pelayanan dengan mengajukan tambahan anggaran untuk renovasi gedung PATEN, pengadaan playground, CCTV dan menambah petugas loket. -Percepatan penyerapan anggaran sesuai dengan rencana anggaran kas</p>	<p>Rencana Tindak Lanjut : Berkoordinasi dengan Bagian Pemerintahan dan Bagian Organisasi untuk peningkatan nilai PATEN</p> <p>Berkoordinasi dengan Bappeda terkait usulan tambahan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana pelayanan PATEN</p>	
3	Pelaksanaan PHBN/PHBA sesuai standart	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100.00%	100.00%	100.00%	3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	900,000.00	700,000.00	77.78%	<p>Tingkat keberhasilan telah berhasil 100%. Indikator Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan telah berhasil dicapai sesuai dokumen perencanaan target sd. TB IV adalah 100%, realisasi 100%, tercapai 100%. Sehingga capaian kinerja tahunan telah tercapai 100% (target 100% terealisasi 100% yaitu Peringatan HUT RI)</p> <p>Hambatan : Kegiatan PHBN/PHBA memerlukan koordinasi dengan instansi terkait</p> <p>Rekomendasi perbaikan : -Melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar pelaksanaan kegiatan PHBN/PHBA dapat dilaksanakan sesuai aturan dan tepat waktu</p>	<p>-Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan peringatan HUT RI pada bulan Agustus dan pada TB IV telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan peringatan natal dan tahun baru</p> <p>Rencana Tindak Lanjut : Persiapan koordinasi pelaksanaan kegiatan peringatan bulan ramadhan dan idul fitri tahun 2023</p>	
4	Koordinasi forkopimcam secara rutin berkala	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100.00%	100.00%	100.00%						<p>Tingkat keberhasilan telah berhasil 100%. Indikator Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti telah berhasil dicapai sesuai dokumen perencanaan (target sd. TB IV adalah 100%, realisasi 100%, tercapai 100%). Sehingga capaian kinerja tahunan telah tercapai 100% (target 4 dokumen terealisasi 4 dokumen (kegiatan dilakukan rutin tiap tribulan)</p> <p>Hambatan : Kegiatan rapat koordinasi Forkopimcam memerlukan koordinasi dengan instansi terkait</p> <p>Rekomendasi perbaikan : -Melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi Forkopimcam dapat dilaksanakan sesuai aturan dan tepat waktu</p>	<p>Telah dilakukan koordinasi, menyelia, dan supervisi pelaksanaan rekomendasi forkopimcam yang ditindaklanjuti</p> <p>Memastikan kegiatan rapat koordinasi Forkopimcam dilaksanakan sesuai aturan dan tepat waktu</p>	
5	Koordinasi kegiatan sosial budaya secara periodik	Persentase kegiatan sosial budaya yang ditindaklanjuti	100.00%	100.00%	100.00%						<p>Tingkat keberhasilan telah berhasil 100%. Indikator Persentase kegiatan sosial budaya yang ditindaklanjuti telah berhasil dicapai sesuai dokumen perencanaan (target sd. TB IV adalah 100%, realisasi 100%, tercapai 100%). Sehingga capaian kinerja tahunan telah tercapai 100% (target 4 kegiatan terealisasi 4 kegiatan (kegiatan dilakukan rutin tiap tribulan)</p> <p>Hambatan : Kegiatan koordinasi sosial budaya yang ditindaklanjuti memerlukan koordinasi dengan instansi terkait</p>	<p>-Telah dilakukan tindaklanjut penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang sosial, kemiskinan, pendidikan dan kesehatan Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi penyaluran bansos dan hibah (BPNT, subsidi BBM, Bansos Perumahan, Dana hibah masjid dan musholla)</p> <p>Rencana Tindak Lanjut : Pelaksanaan kegiatan sosial budaya, bansos dan hibah dilaksanakan sesuai aturan dan tepat waktu</p>	

											Rekomendasi perbaikan : -Melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar pelaksanaan kegiatan sosial budaya dapat dilaksanakan sesuai aturan dan tepat waktu		
6	Koordinasi kasus pelanggaran perda/perkada dan trantibum tepat waktu	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100.00%	100.00%	100.00%	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Kertertiban Umum	4,766,700.00	4,754,000.00	99.73%	Tingkat keberhasilan telah berhasil 100%. Indikator Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait telah berhasil dicapai sesuai dokumen perencanaan (target sd. TB IV adalah 100% , realisasi 100% , tercapai 100%). Sehingga capaian kinerja tahunan telah tercapai 100% (target 12 laporan terealisasi 12 laporan)  Hambatan : Pelanggaran Perda dan Trantibum memerlukan waktu untuk dikoordinasikan dengan instansi terkait  Rekomendasi perbaikan : -Setiap pelanggaran perda dan trantibum harus segera dikoordinasikan kepada instansi terkait. -Percepatan penyerapan anggaran sesuai dengan rencana anggaran kas	- Telah dilakukan koordinasi, menyela, dan supervisi Laporan kasus Pelanggaran Perda/ Perkada dan trantibum dengan Perangkat Daerah atau Intansi Terkait -Telah tersusun laporan pelanggaran perda dan trantibum rutin tiap bulan yang dikoordinasikan dan sudah dikirim ke Satpol PP  Memastikan Laporan pelanggaran Perda/Perkada dan trantibum dikirim setiap bulan ke Satpol PP  Mengkoordinasikan dengan instansi terkait apabila laporan membutuhkan tindak lanjut secepatnya	
7	Koordinasi pertanggungjawaban realisasi APB Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100.00%	100.00%	100.00%	5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10,510,000.00	10,510,000.00	100.00%	Tingkat keberhasilan telah berhasil 100%. Indikator Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa telah berhasil dicapai sesuai dokumen perencanaan (target sd. TB IV adalah 100% , realisasi 100% , tercapai 100%). Sehingga capaian kinerja tahunan telah tercapai 100% (target 26 laporan terealisasi 26 laporan).  Hambatan : laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes dari desa tidak segera dikirim ke Kecamatan  Rekomendasi perbaikan : -Melakukan koordinasi dengan desa agar melaporkan pertanggungjawaban realisasi APBDes tepat waktu -Percepatan penyerapan anggaran sesuai dengan rencana anggaran kas	-Telah dilakukan koordinasi, menyela, dan supervisi desa yang melaporkan pertanggung jawaban realisasi APBDesa -13 Desa telah melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa tepat waktu dan sesuai aturan  Rencana Tindak Lanjut : Melakukan pembinaan dan evaluasi dalam penyusunan pertanggungjawaban APBDesa	 
8	Koordinasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APB Desa	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100.00%	100.00%	100.00%						Tingkat keberhasilan telah berhasil 100%. Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti telah berhasil dicapai sesuai dokumen perencanaan (target sd. TB IV adalah 100% , realisasi 100% , tercapai 100%). Sehingga capaian kinerja tahunan telah tercapai 100% (target 26 laporan terealisasi 26 laporan).  Hambatan : rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa tidak segera ditindaklanjuti oleh desa  Rekomendasi perbaikan : -Melakukan koordinasi dengan desa agar rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa segera ditindaklanjuti	Telah dilakukan koordinasi, menyela, dan supervisi Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa  Rencana Tindak Lanjut : laporan LRA dari desa diverifikasi dan dicocokkan dengan data yang ada di Siskeudes.	

9	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan raperdes sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100.00%	100.00%	100.00%	6	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	18,356,000.00	16,353,400.00	89.09%	<p>Tingkat keberhasilan telah berhasil 100%. Indikator Persentase Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa yang dievaluasi telah berhasil dicapai sesuai dokumen perencanaan (target sd. TB IV adalah 100%, realisasi 100%, tercapai 100%). Sehingga capaian kinerja tahunan telah tercapai 100% (target 26 dokumen terealisasi 26 dokumen). Sampai dengan TB IV Raperdes APBDesa yang dievaluasi sebanyak 26 dokumen (Raperdes APBDes dan Raperdes P APBDes)</p> <p>Hambatan : Evaluasi Raperdes APBDes/Perubahan APBDes memerlukan koordinasi dengan instansi terkait</p> <p>Rekomendasi perbaikan : -Melakukan koordinasi dengan instansi terkait - Percepatan penyerapan anggaran sesuai dengan rencana anggaran kas</p>	<p>-Telah dilakukan koordinasi, menyelia, dan supervisi Perencanaan Pembangunan Desa Tingkat Kecamatan</p> <p>-Telah dilakukan koordinasi pembinaan dan evaluasi penyusunan Perubahan APBDes tahun 2022</p> <p>-Telah dilakukan koordinasi pelaksanaan monitoring Musdes Penetapan Perubahan APBDes tahun 2022</p> <p>Telah dilakukan koordinasi kegiatan monev APBDes 2022 (monev LRA, penatausahaan keuangan, SPJ, fisik dan non fisik)</p> <p>Rencana Tindak Lanjut : Persiapan koordinasi penyusunan laporan hasil verifikasi APBDesa tahun 2022</p>	   
10	Koordinasi dan pembinaan lembaga/ badan usaha Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	26 lembaga	26 lembaga	100.00%						<p>Tingkat keberhasilan telah berhasil 100%. Indikator Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif telah berhasil dicapai sesuai dokumen perencanaan (target sd. TB IV adalah 26 lembaga, realisasi 26 lembaga, tercapai 100%). Sehingga capaian kinerja tahunan telah tercapai 100.00% (target 26 lembaga terealisasi 26 lembaga). Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan yang aktif sebanyak 26 lembaga (13 BUMDes dan 13 TP PKK)</p> <p>Hambatan : Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan memerlukan koordinasi dengan instansi terkait</p> <p>Rekomendasi perbaikan : Melakukan koordinasi dengan instansi terkait</p>	<p>Telah dilakukan koordinasi, menyelia, dan supervisi Pembinaan TP PKK Desa</p> <p>Rencana Tindak Lanjut : -Melakukan pembinaan administrasi kelembagaan BUMDes dan TP-PKK Desa -Mengkoordinasikan dengan TPP PKK Kabupaten terkait pembinaan PKK. Mengkoordinasikan dengan</p>	  

Jombang, 30 Desember 2022

BUPATI JOMBANG

Hj. MUNDJIDAH WAHAB





# PROBIS KECAMATAN PLANDAAN

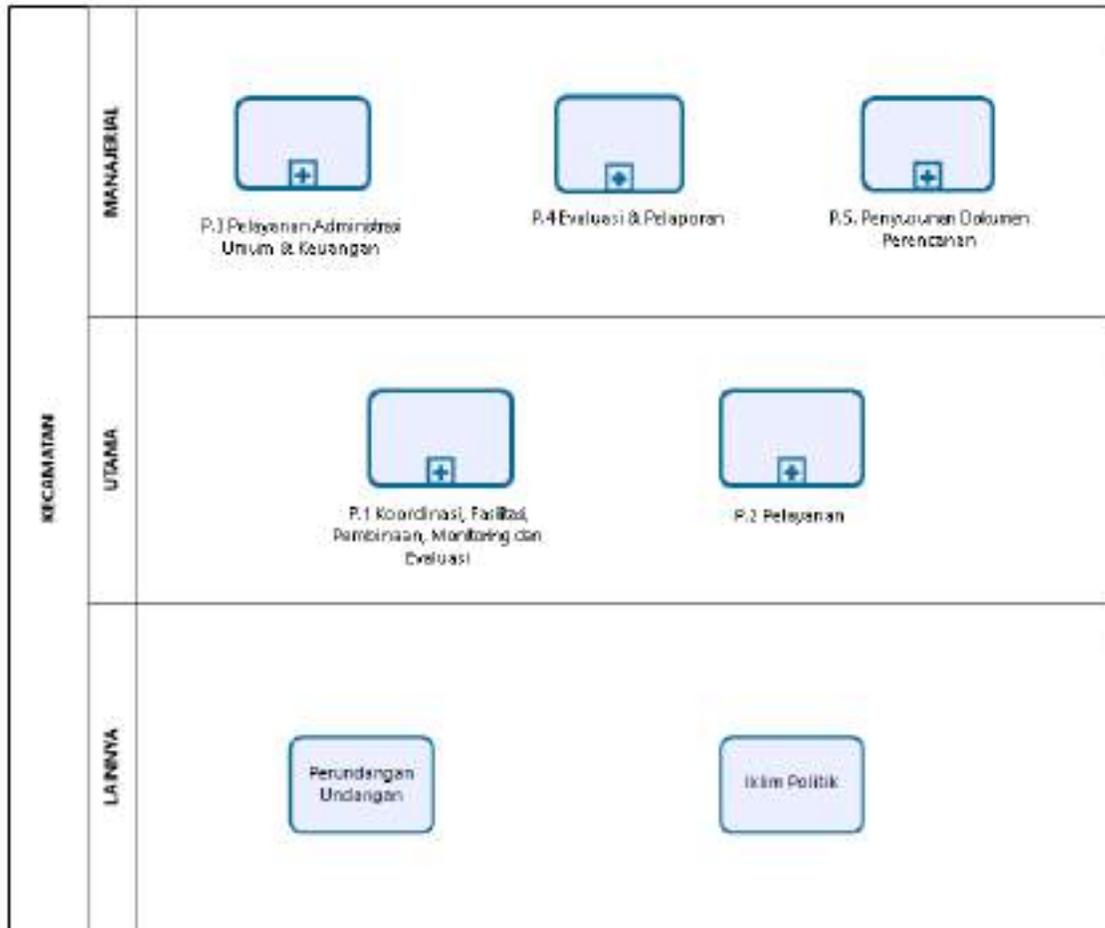
Bizagi Modeler

PROBIS KECAMATAN	1
BIZAGI MODELER	1
1	5
1.1	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.1.1	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2	6
2.1	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1.1	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.1	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.1.1	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.1	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.1.1	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.1	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.1.1	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
6	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
6.1	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
6.1.1	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
7	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
7.1	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
7.1.1	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
8	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
8.1	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
8.1.1	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
9	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
9.1	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
9.1.1	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
10	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
10.1	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
10.1.1	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
11	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
11.1	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
11.1.1	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
12	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
12.1	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
12.1.1	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
13	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
13.1	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
13.1.1	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
14	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
14.1	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
14.1.1	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

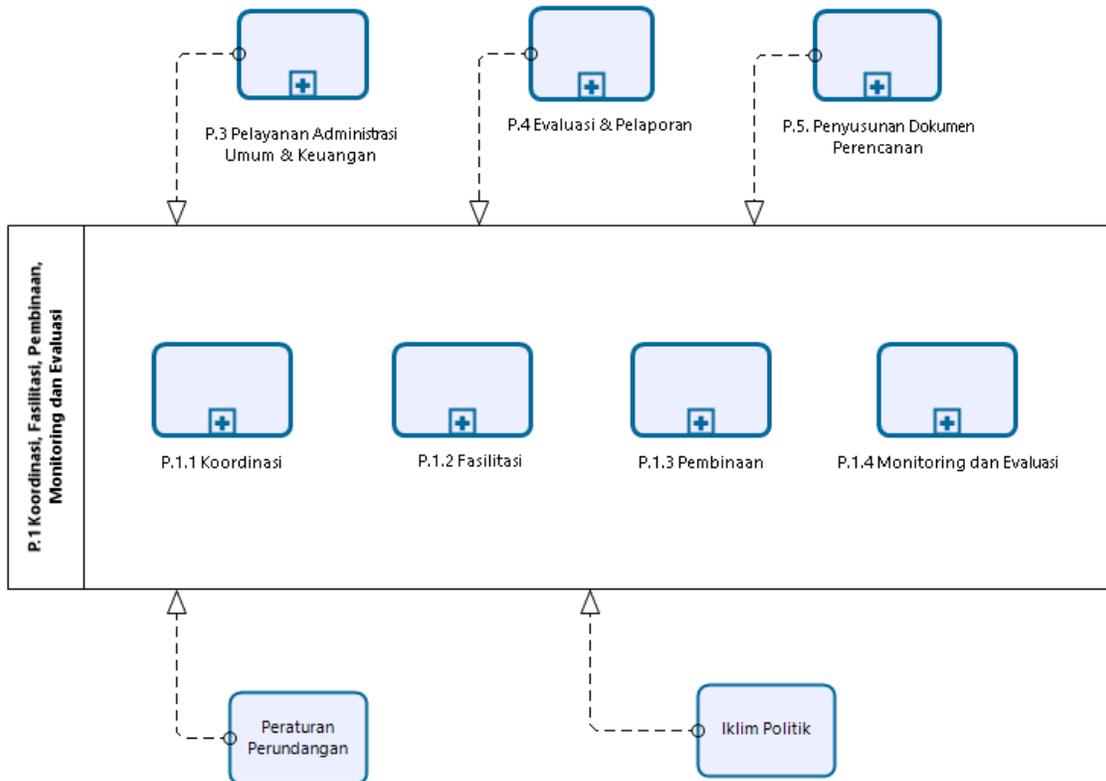
15	Error! Bookmark not defined.	
15.1		Error! Bookmark not defined.
15.1.1	Error! Bookmark not defined.	
16	Error! Bookmark not defined.	
16.1		Error! Bookmark not defined.
16.1.1	Error! Bookmark not defined.	
17	33	
17.1		Error! Bookmark not defined.
17.1.1	Error! Bookmark not defined.	
18	35	
18.1		Error! Bookmark not defined.
18.1.1	Error! Bookmark not defined.	
19	36	
19.1		Error! Bookmark not defined.
19.1.1	Error! Bookmark not defined.	
20	37	
20.1		Error! Bookmark not defined.
20.1.1	Error! Bookmark not defined.	
21	39	
21.1		Error! Bookmark not defined.
21.1.1	Error! Bookmark not defined.	
22	41	
22.1		Error! Bookmark not defined.
22.1.1	Error! Bookmark not defined.	
23	43	
23.1		Error! Bookmark not defined.
23.1.1	Error! Bookmark not defined.	
24	44	
24.1		Error! Bookmark not defined.
24.1.1	Error! Bookmark not defined.	
25	45	
25.1		Error! Bookmark not defined.
25.1.1	Error! Bookmark not defined.	
26	46	
26.1		Error! Bookmark not defined.
26.1.1	Error! Bookmark not defined.	
27	47	
27.1		Error! Bookmark not defined.
27.1.1	Error! Bookmark not defined.	
28	49	
28.1		Error! Bookmark not defined.
28.1.1	Error! Bookmark not defined.	
29	50	
29.1		Error! Bookmark not defined.
29.1.1	Error! Bookmark not defined.	
30	51	
30.1		Error! Bookmark not defined.

30.1.1	<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
31	52	
31.1		<b>Error! Bookmark not defined.</b>
31.1.1	<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
32	53	
32.1		<b>Error! Bookmark not defined.</b>
32.1.1	<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
33	54	
33.1		<b>Error! Bookmark not defined.</b>
33.1.1	<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
34	55	
34.1		<b>Error! Bookmark not defined.</b>
34.1.1	<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
35	57	
35.1		<b>Error! Bookmark not defined.</b>
35.1.1	<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
36	59	
36.1		<b>Error! Bookmark not defined.</b>
36.1.1	<b>Error! Bookmark not defined.</b>	

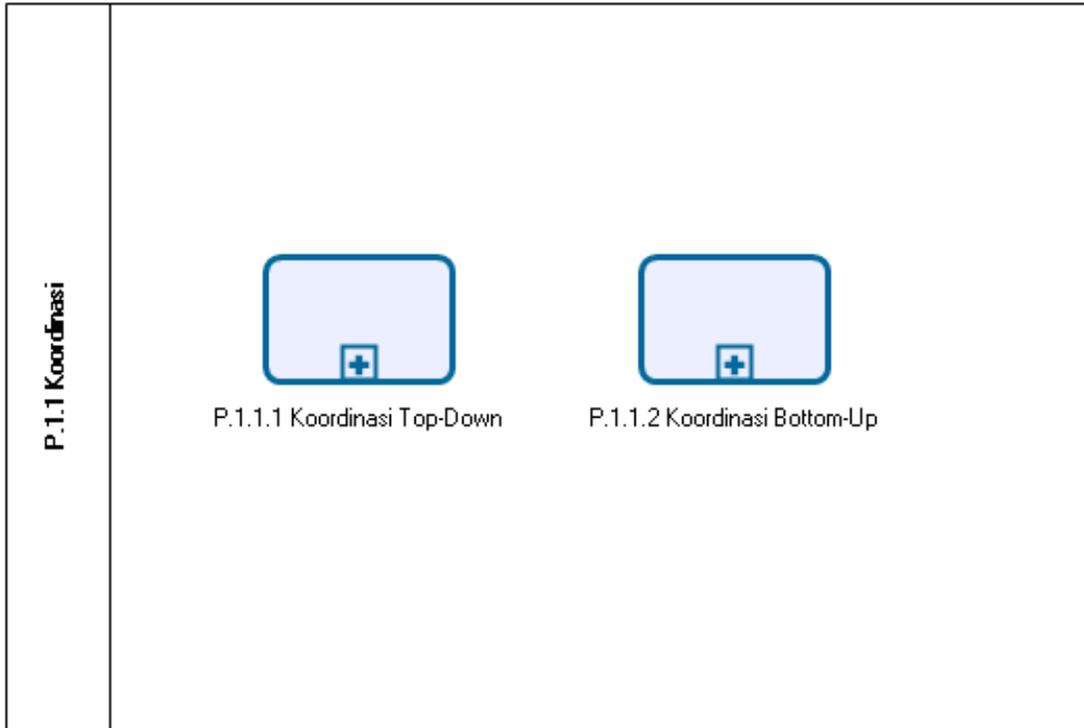
# 1 P.0 PROSES UTAMA KECAMATAN



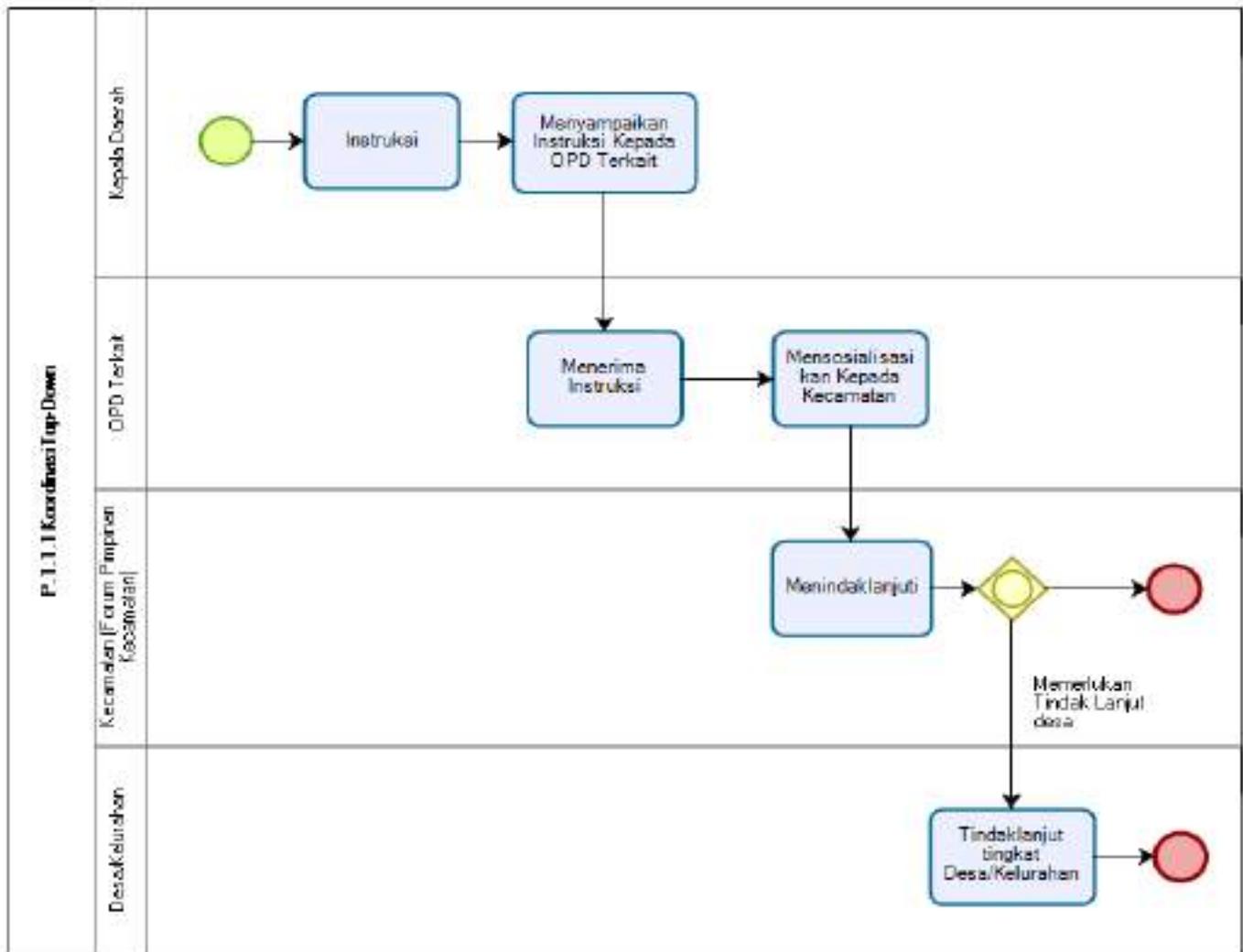
## 2 P.1 Koordinasi, Fasilitasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi



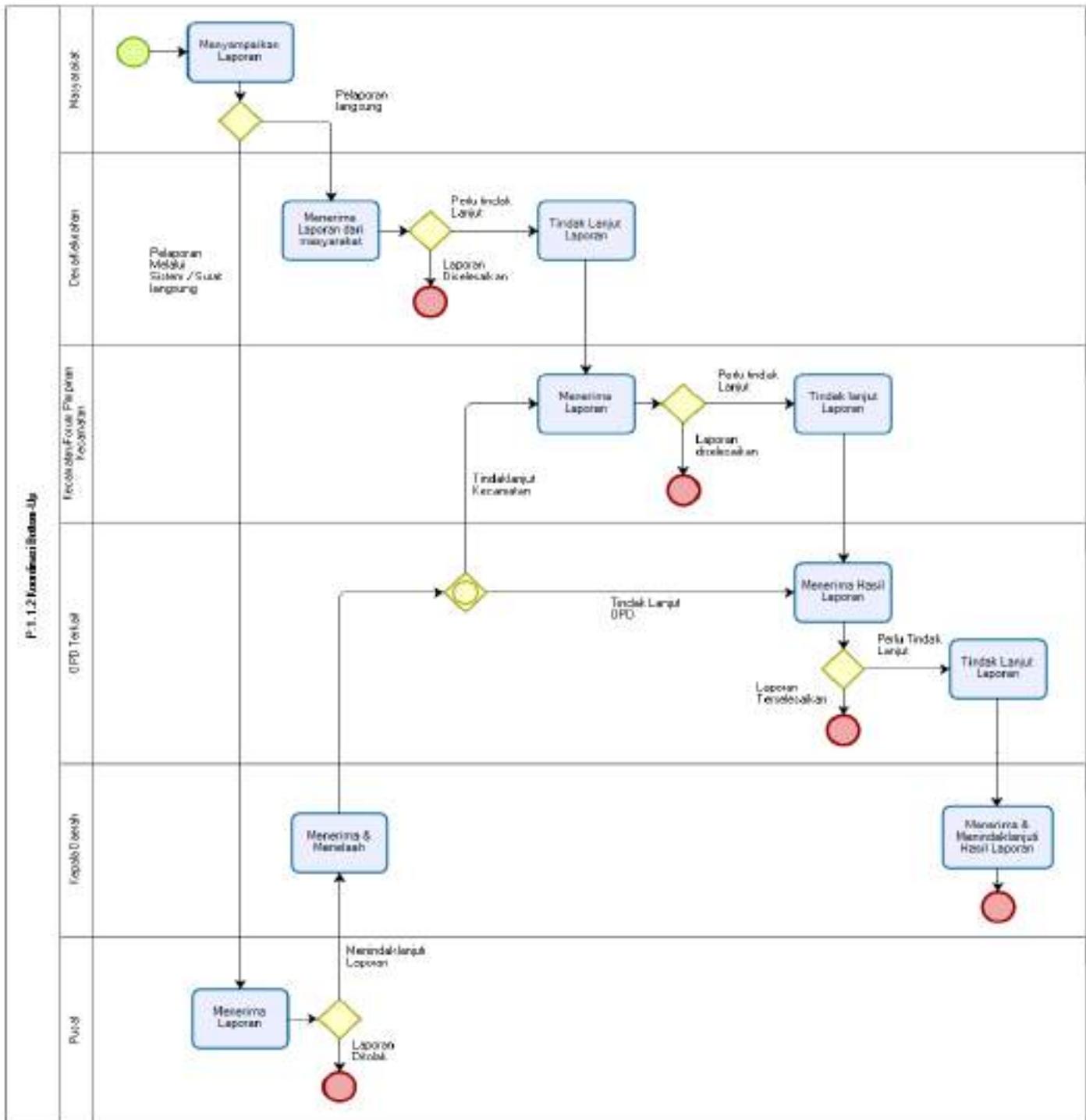
### 3 P.1.1 Koordinasi



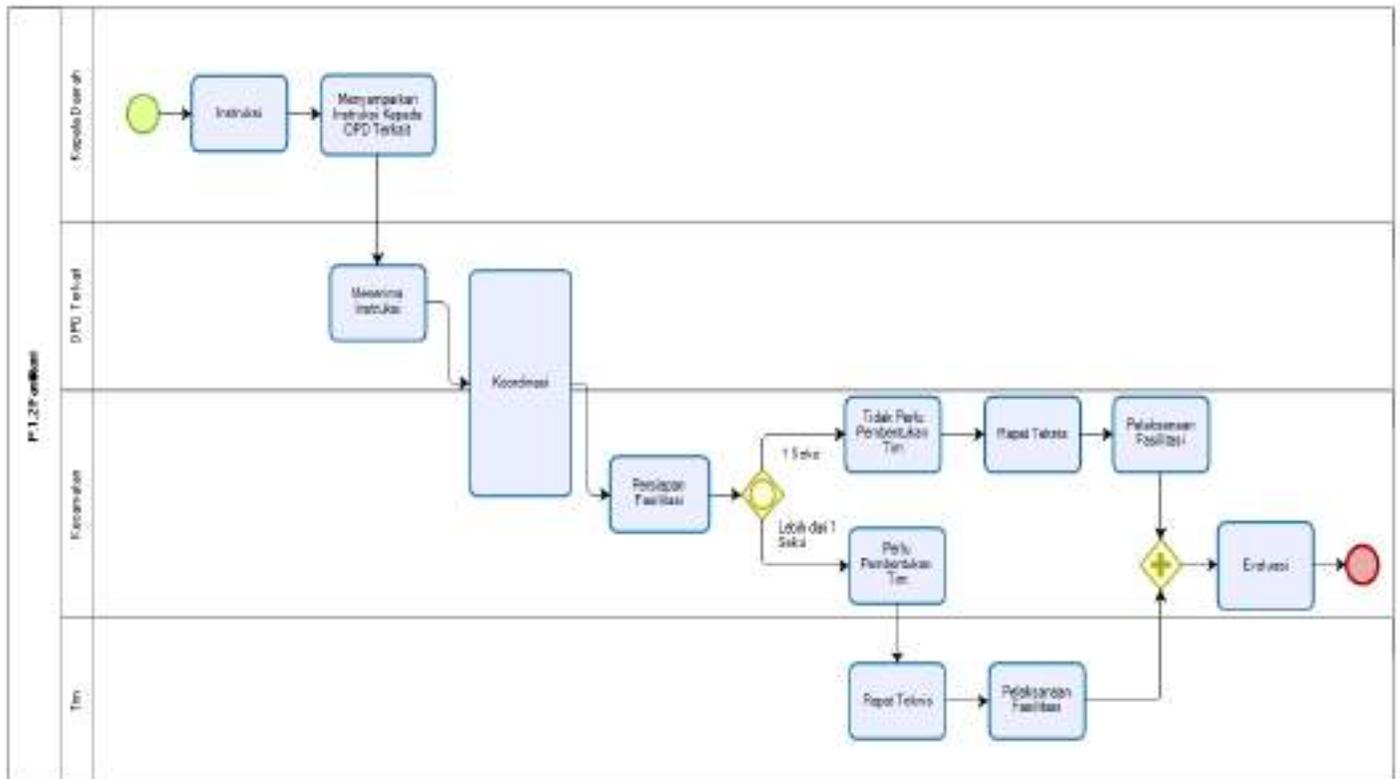
#### 4 P.1.1.1 Koordinasi Top-Down



## 5 P.1.1.2 Koordinasi Bottom-Up



## 6 P.1.2 Fasilitasi

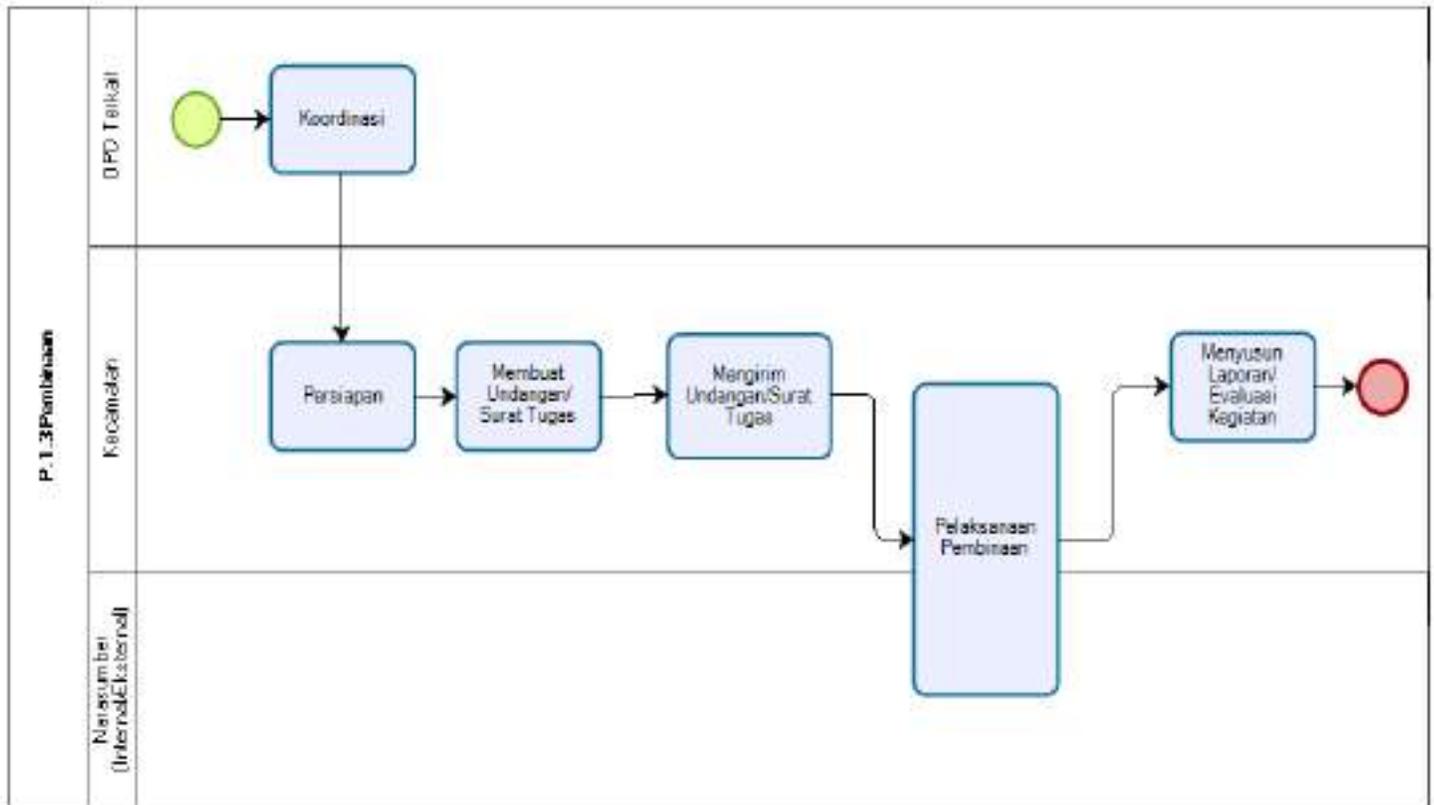


P.1.2 Fasilitasi, sebagaimana tercantum pada gambar proses tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Kepala Daerah mengintruksikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Terkait sesuai yang membidangi untuk menindaklanjuti intruksi Kepala Daerah
- Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menerima intruksi Kepala daerah terkait suatu hal
- Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait melakukan koordinasi dengan Kecamatan atau Camat untuk memfasilitasi intruksi Kepala Daerah

- d. Camat mendisposisikan Leading Sektor Fasilitasi kepada Seksi sesuai dengan jenis fasilitasi
- e. Fasilitasi bisa melibatkan hanya 1 (satu) Seksi atau lebih dari 1 (satu) Seksi di Kecamatan
- f. Ketika kegiatan fasilitasi hanya melibatkan hanya 1 (satu) Seksi maka Seksi/Kasi melaksanakan Rapat teknis dengan Camat dan menyampaikan rencana fasilitasi dengan mengidentifikasi persoalan atau masalah yang akan muncul
- g. Kasi memfasilitasi kegiatan yang diinstruksikan oleh Kepala Daerah
- h. Kemudian apabila kegiatan fasilitasi hanya melibatkan Lebih dari 1 (satu) Seksi maka Seksi/Kasi maka Camat membentuk Tim Fasilitasi agar fasilitasi berjalan sinkron dari masing-masing seksi kemudian Camat beserta Tim melaksanakan Rapat teknis dengan merencanakan dan mengidentifikasi persoalan atau masalah yang akan muncul
- i. Tim memfasilitasi kegiatan yang diinstruksikan oleh Kepala Daerah
- j. Hasil dari memfasilitasi kegiatan kemudian dievaluasi oleh Camat.

## 7 P.1.3 Pembinaan

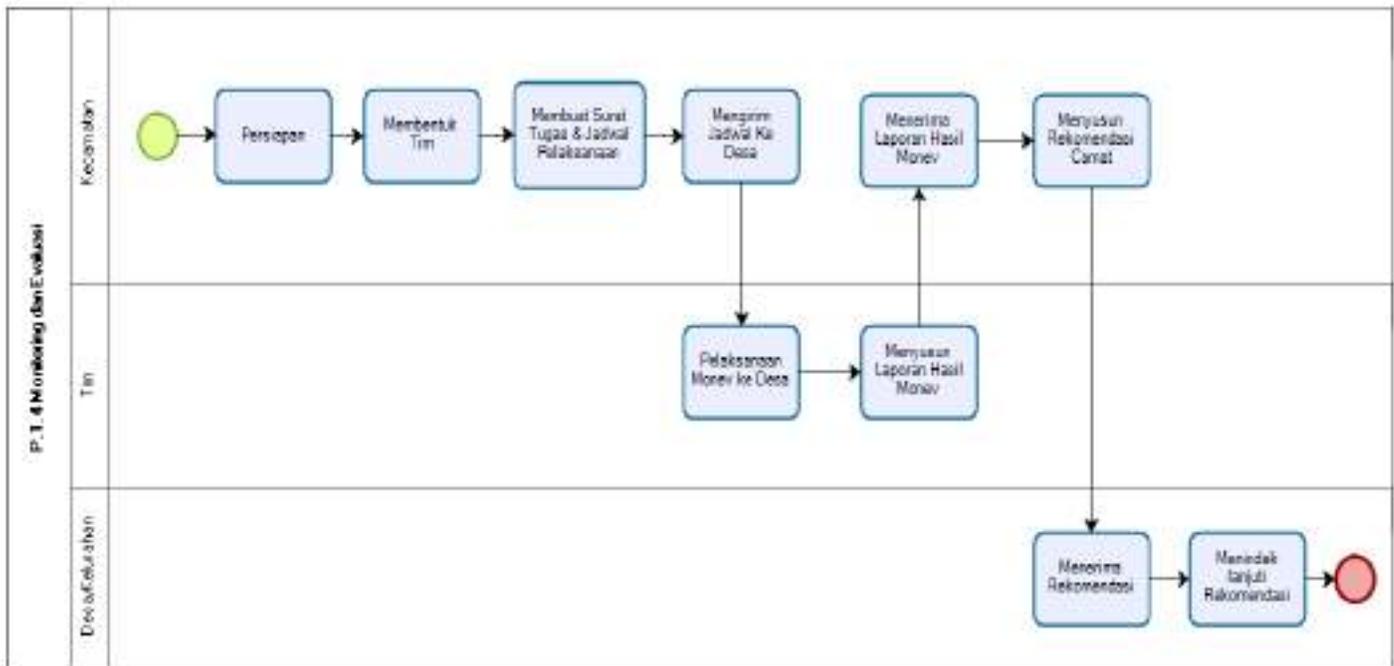


Proses P.1.3 Pembinaan sebagaimana tercantum pada gambar proses tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. OPD terkait melakukan koordinasi dengan Kecamatan untuk melakukan pembinaan terkait program dan kegiatan Kecamatan;
- b. Kecamatan melakukan persiapan untuk melakukan pembinaan:
  1. Rapat pembinaan: persiapan terkait pelaksanaan baik itu undangan, tanggal, tempat, konsumsi peserta rapat dll;
  2. Pembinaan ke desa: persiapan terkait pembuatan surat tugas dan pelaksanaan kegiatan Musdes RKPDes, Musdes APBDes, Musdes Realisasi APBDes dan Monev APBDes.

- Kecamatan melakukan pengiriman undangan untuk rapat pembinaan;
- Pelaksanaan pembinaan:
  1. Rapat pembinaan menghadirkan narasumber dari instansi terkait;
  2. Pembinaan kunjungan ke desa.
- Kecamatan menyusun laporan:
  1. Rapat pembinaan: menyusun notulen rapat pembinaan;
  2. Pembinaan ke desa: menyusun laporan evaluasi kegiatan.

## 8 P.1.4 Monitoring dan Evaluasi

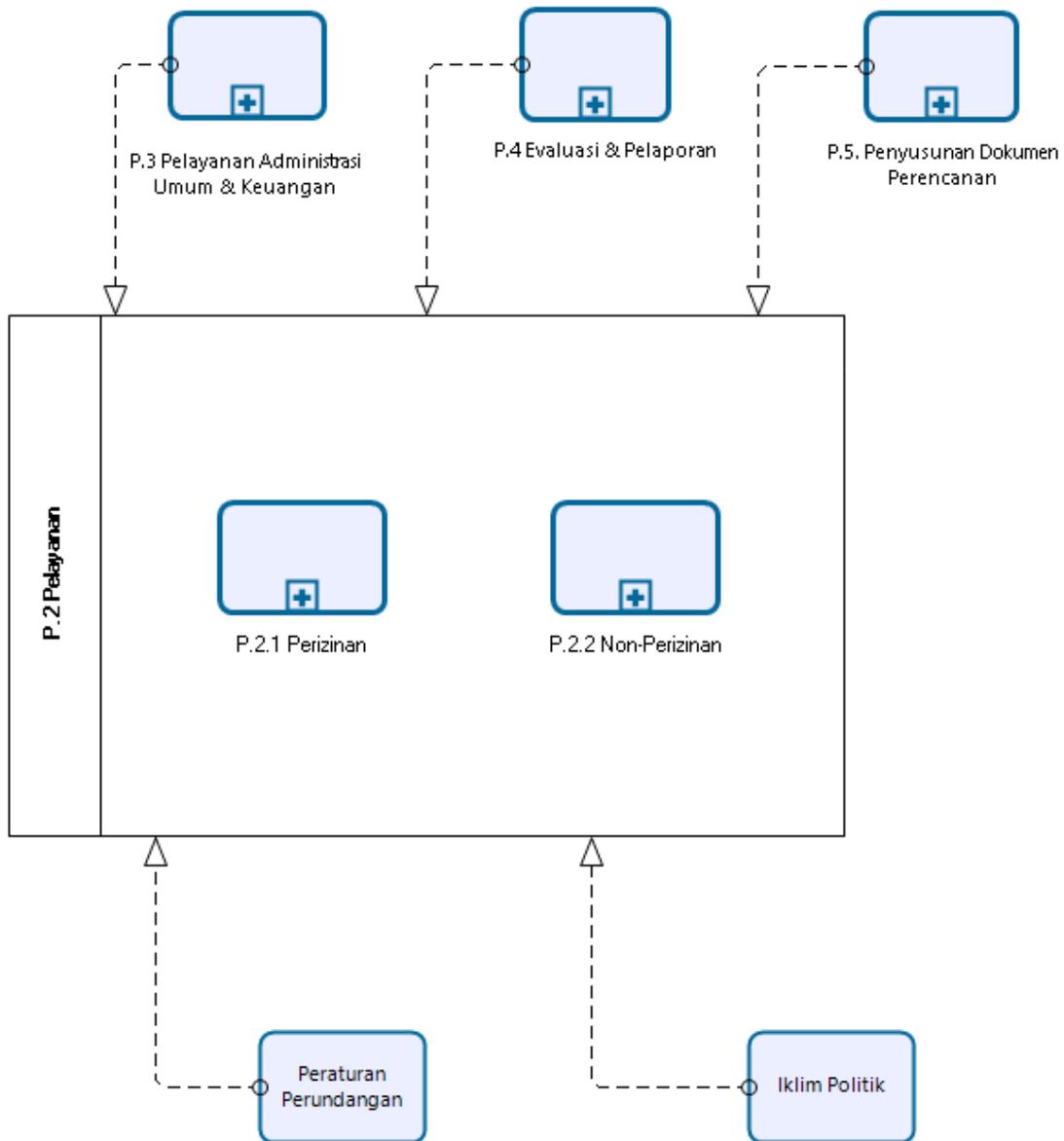


P.1.4 Monitoring dan Evaluasi, sebagaimana tercantum pada gambar proses tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

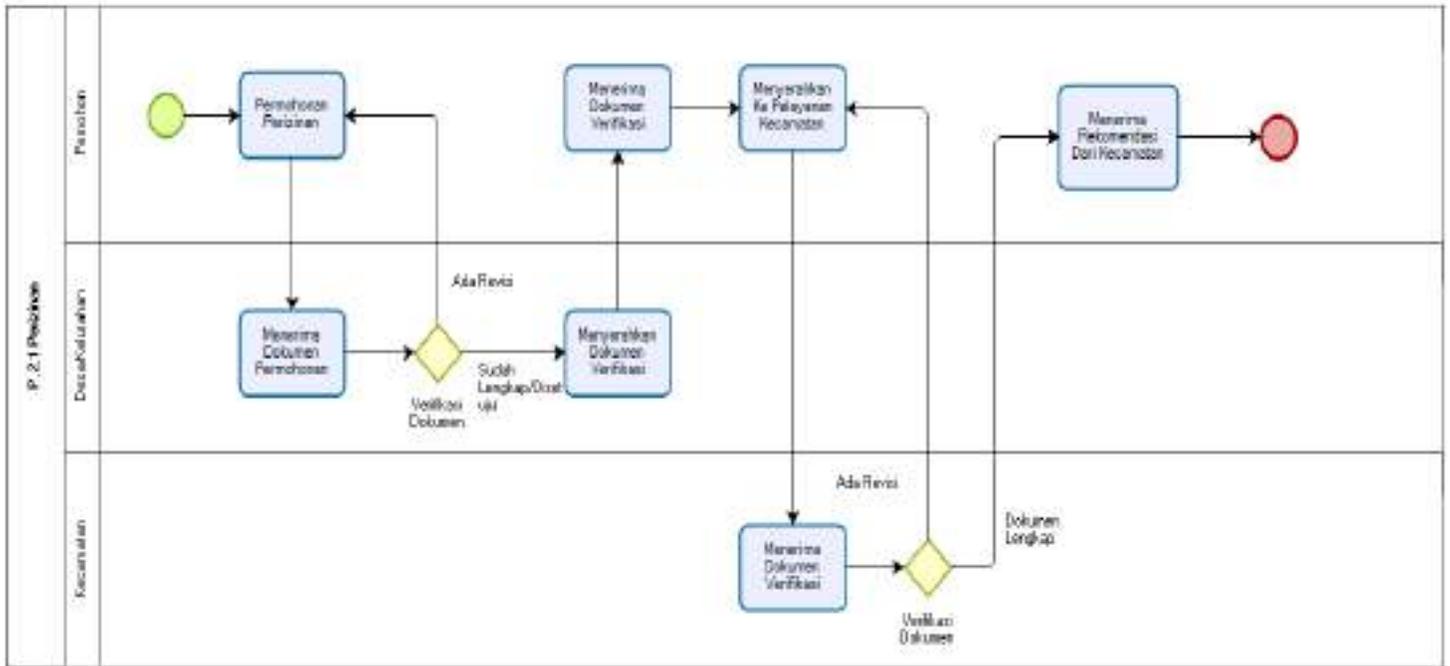
- Camat, Kasi beserta Staf mempersiapkan rencana monitoring kepada desa berdasarkan agenda rutin, baik itu Mingguan, Bulanan, Tribulan atau Semester dengan memperhatikan beban kerja dan jumlah Desa/Kelurahan yang akan diMonev serta mengidentifikasi kegiatan hambatan atau masalah yang ada di Desa/Kelurahan
- Camat beserta Kasi mencermati hasil persiapan dengan membentuk Tim Monitoring dan membagi Jumlah Tim sesuai dengan bidang atau keahlian masing-masing.
- Camat membuat Surat tugas dan Rancangan jadwal pelaksanaan Monev.

- d. Sekretariat Membuat Surat Jadwal Monev yang ditujukan kepada Desa/Kelurahan
- e. Tim monitoring melaksanakan monev ke Desa
- f. Tim Menyusun Laporan Hasil Monitoring yang akan dilaporkan kepada Camat
- g. Camat Menerima Hasil Monitoring dan mengevaluasi hasil laporan
- h. Kasi menyusun Rekomendasi hasil Evaluasi Camat yang akan ditindaklanjuti oleh Desa/Kelurahan
- i. Sekretariat Mengirim Surat Hasil Rekomendasi Camat Kepada Desa/Kelurahan
- j. Desa/Kelurahan Menerima surat Hasil Rekomendasi hasil Monitoring
- k. Desa/Kelurahan Menindaklanjuti Rekomendasi Camat untuk diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

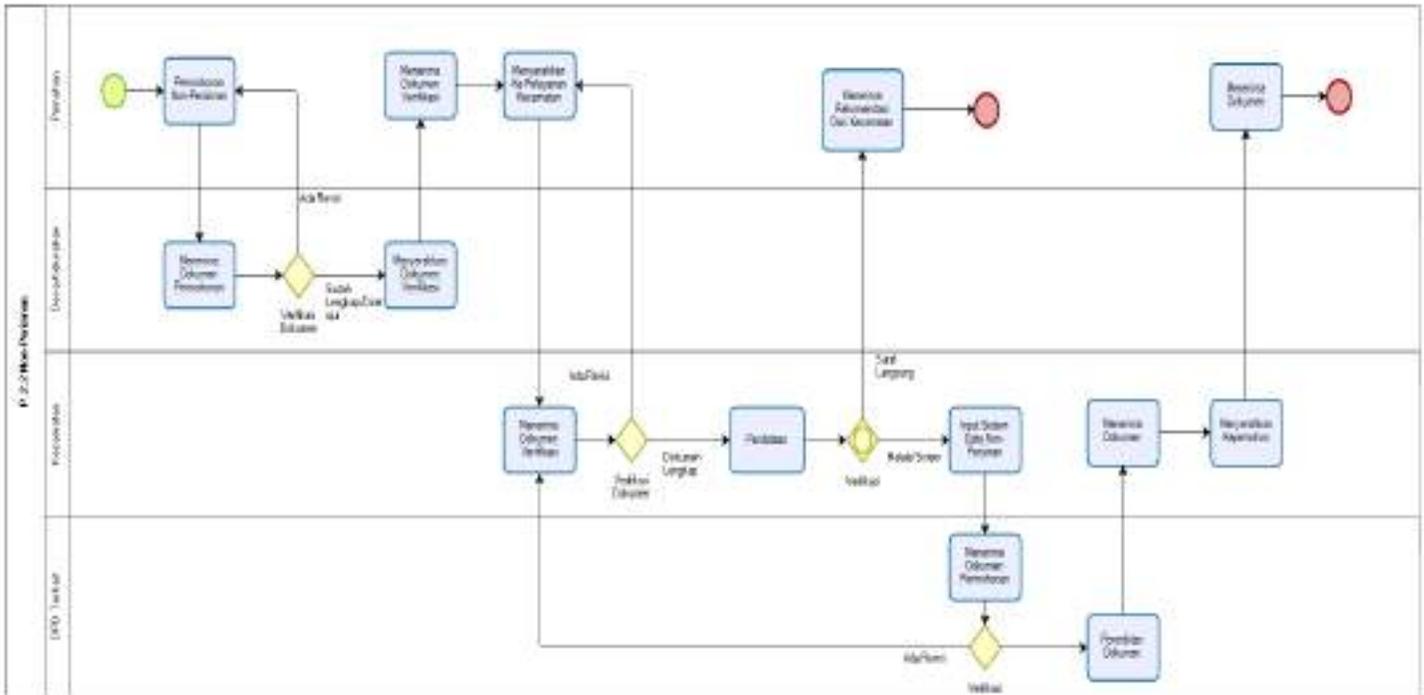
## 9 P.2 Pelayanan



## 10 P.2.1 Perizinan



## 11 P.2.2 Non-Perizinan

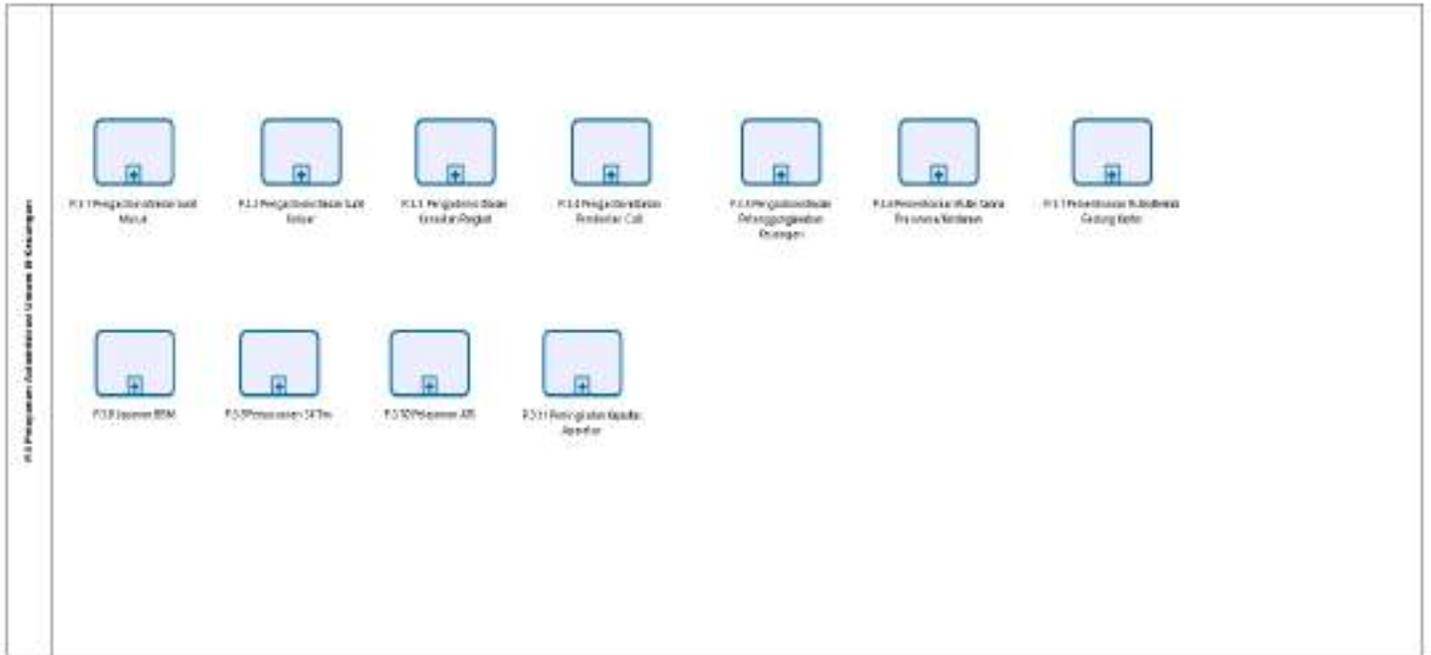


P.2.2 Non-Perizinan, sebagaimana tercantum pada gambar proses tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pemohon melakukan permohonan non perizinan ke desa
- Desa menerima permohonan non perizinan, kemudian melakukan verifikasi berkas pemohon apabila ada revisi dikembalikan ke pemohon, sebaliknya apabila berkas lengkap ditanda tangani kepala desa, kemudian dikembalikan ke pemohon
- Setelah berkas ditanda tangani kepala desa dan dikembalikan ke pemohon kemudian dilanjutkan pemohon menyerahkan berkas ke pelayanan paten kecamatan.

- d. Dilakukan verifikasi di pelayanan paten, apabila ada revisi dikembalikan ke pemohon, sebaliknya apabila berkas lengkap di proses input melalui sistem data non perijinan.
- e. Proses input melalui sistem data non perijinan.  
Pemohon akan menerima bukti rekomendasi dari kecamatan
- f. Opd terkait akan menerima dokumen permohonan melalui proses input sistem data non perijinan dan akan dilakukan verifikasi lanjutan di opd terkait
- g. Hasil verifikasi opd terkait, apabila ada revisi akan dikembalikan ke pelayanan paten kecamatan.
- h. Hasil verifikasi opd terkait, apabila tidak ada revisi akan dilanjutkan untuk penerbitan dokumen.
- i. Bukti penerbitan dokumen akan diserahkan ke paten kecamatan lanjut diberikan kepada pemohon

## 12 P.3 Pelayanan Administrasi Umum & Keuangan



P.3 pelayanan administrasi umum & keuangan meliputi:

### P.3.1 pengadministrasian surat masuk

- Menerima dan meneliti surat dan mengembalikan surat yang salah alamat
- Mencatat surat masuk ke dalam buku agenda surat masuk dan memilah surat berdasarkan sifatnya, rahasia, penting atau biasa.
- Mencatat surat masuk ke dalam lembar disposisi pada surat tersebut untuk selanjutnya disampaikan ke kepala sub. Bagian umum dan keuangan

### P.3.2 pengadministrasian surat keluar

- Pengelola surat menyurat menyerahkan surat masuk kepada kasi/kasubsi sesuai arah disposisi.

- b. Kasi/kasubsi menindaklanjuti arah disposisi surat dan menyusun konsep surat keluar
- c. Pengelola surat menyurat mengolah surat keluar. Menyerahkan kepada kasi/kasubsi
- d. Kasi/kasubsi memeriksa dan mengoreksi surat keluar. Menyerahkan kepada sekretaris camat.
- e. Sekretaris camat memberi paraf surat keluar. Menyerahkan kepada camat.
- f. Camat menandatangani surat keluar.
- g. Pengelola surat menyurat membubuhkan stempel, mengagenda, mengarsip dan mengirim surat keluar.

#### P.3.3 pengadministrasian kenaikan pangkat

- a. Camat menugaskan sekretaris camat untuk menyusun usul kenaikan pangkat
- b. Sekretaris camat menugaskankasubsi pengelolaan administrasi kepegawaian untuk menyusun usul kenaikan pangkat
- c. Kasubag pengelolaan administrasi kepegawaian menyusundraft usul kenaikan pangkat dan menugaskan pengelolaurusan kepegawaian untuk menyiapkan bahan penyusunan usul kenaikan pangkat
- d. Pengelola urusan kepegawaian menyiapkan bahan penyusunan usul kenaikan pangkat
- e. Kasubag pengelolaan administrasi kepegawaian memeriksabahan penyusunan usul kenaikan pangkat dan menyusun usul kenaikan pangkat serta menyerahkan kepada sekretaris camat
- f. Sekretaris camat mengoreksi usul kenaikan pangkat dan menyerahkan kepada camat
- g. Camat menandatangani usul kenaikan pangkat
- h. Pengelola urusan kepegawaian menyetor berkas usul kenaikan pangkat ke bkdpp

#### P.3.4 pengadministrasian pemberian cuti

- a. Pengelola urusan kepegawaian menerima dan mencatat surat permohonan cuti dari pegawai
- b. Kasubsi pengelolaan administrasi kepegawaian memberikan catatan kepegawaian dan menyampaikan surat permohonan izin cuti tersebut kepada atasan langsungnya dan pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk didisposisi
- c. Pengelola urusan kepegawaian menyiapkan bahan penerbitan cuti tahunan
- d. Kasubsi pengelolaan administrasi kepegawaian memeriksa bahan penerbitan cuti dan mengoreksi draft cuti tahunan serta menyerahkan kepada sekretaris camat
- e. Sekretaris camat mengoreksi dan memberikan paraf lembar cuti tahunan dan menyerahkan kepada camat
- f. Camat menandatangani cuti tahunan
- g. Pengelola urusan kepegawaian mengarsipkan dan
- h. Menyampaikan surat cuti kepada pns yang bersangkutan

#### P.3.5 pengadministrasian petanggung jawaban keuangan

- a. Melaksanakan pengkoordinasian pengelolaan keuangan belanja rutin dan pembayaran keperluan dinas;
- b. Melaksanakan pengkoordinasian pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan daerah;
- c. Melaksanakan pengkoordinasian pengelolaan bukti bukti kas dan surat-surat berharga lainnya;
- d. Menyusun laporan hasil kegiatan di bidang administrasi keuangan;

#### P.3.6 pemeliharaan rutin sarana prasarana / kendaraan

- a. Membuat rencana perbaikan service kendaraan

- b. Menyetujui perbaikan kendaraan
- c. Membuat permintaan perawatan kendaraan
- d. Menandatangani permintaan perawatan kendaraan
- e. Melakukan perawatan dan perbaikan kendaraan
- f. Meminta kuitansi dari toko dan menyerahkan kepada bendahara keuangan
- g. Mengarsipkan permintaan perawatan dan perbaikan kendaraan serta kuitansi
- h. Membayar pajak dan mengurus perpanjangan pajak kendaraan yang telah habis masa berlakunya

#### P.3.7 pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

- a. Mengajukan permintaan perawatan/pemeliharaan peralatan gedung kantor kepada atasan
- b. Meminta persetujuan kepada atasan
- c. Atasan menyetujui permintaan perawatan/ pemeliharaan peralatan gedung kantor
- d. Kasubbag menyampaikan biaya pemeliharaan peralatan gedung kantor kepada pptk
- e. Pptk menyetujui pengajuan biaya pemeliharaan peralatan gedung kantor
- f. Kasubbag mengajukan permintaan biaya pemeliharaan peralatan gedung kantor kepada bendahara
- g. Bendahara memproses permintaan biaya tersebut
- h. Kasubbag menunjuk stafnya sebagai pelaksana kegiatan dan dalam proses pengerjaannya staf bekerjasama dengan pihak ke-3
- i. Pihak ke-3 melakukan proses kegiatan pemeliharaan peralatan gedung kantor
- j. Pihak ke 3 membuat laporan hasil pekerjaannya berupa data2 perbaikan kepada kasubbag

- k. Kasubbag menyerahkan hasil laporan pemeliharaan peralatan gedung kantor kepada pemohon

#### P.3.8 layanan bbm

- a. Membuat rencana kebutuhan bbm untuk kendaraan
- b. Menyetujui kebutuhan bbm untuk kendaraan
- c. Membuat permintaan kebutuhan bbm untuk kendaraan
- d. Menandatangani permintaan kebutuhan bbm untuk kendaraan
- e. Melakukan kebutuhan bbm untuk kendaraan
- f. Meminta bukti pembelian dari spbu dan menyerahkan kepada bendahara keuangan

#### P.3.9 penyusunan sk tim

- a. Membuat konsep surat keputusan tim
- b. Mengetik konsep surat keputusan tim
- c. Koreksi dan paraf dari surat keputusan tim
- d. Menandatangani surat keputusan tim
- e. Memberi nomor surat keputusan tim
- f. Mengarsipkan surat keputusan tim

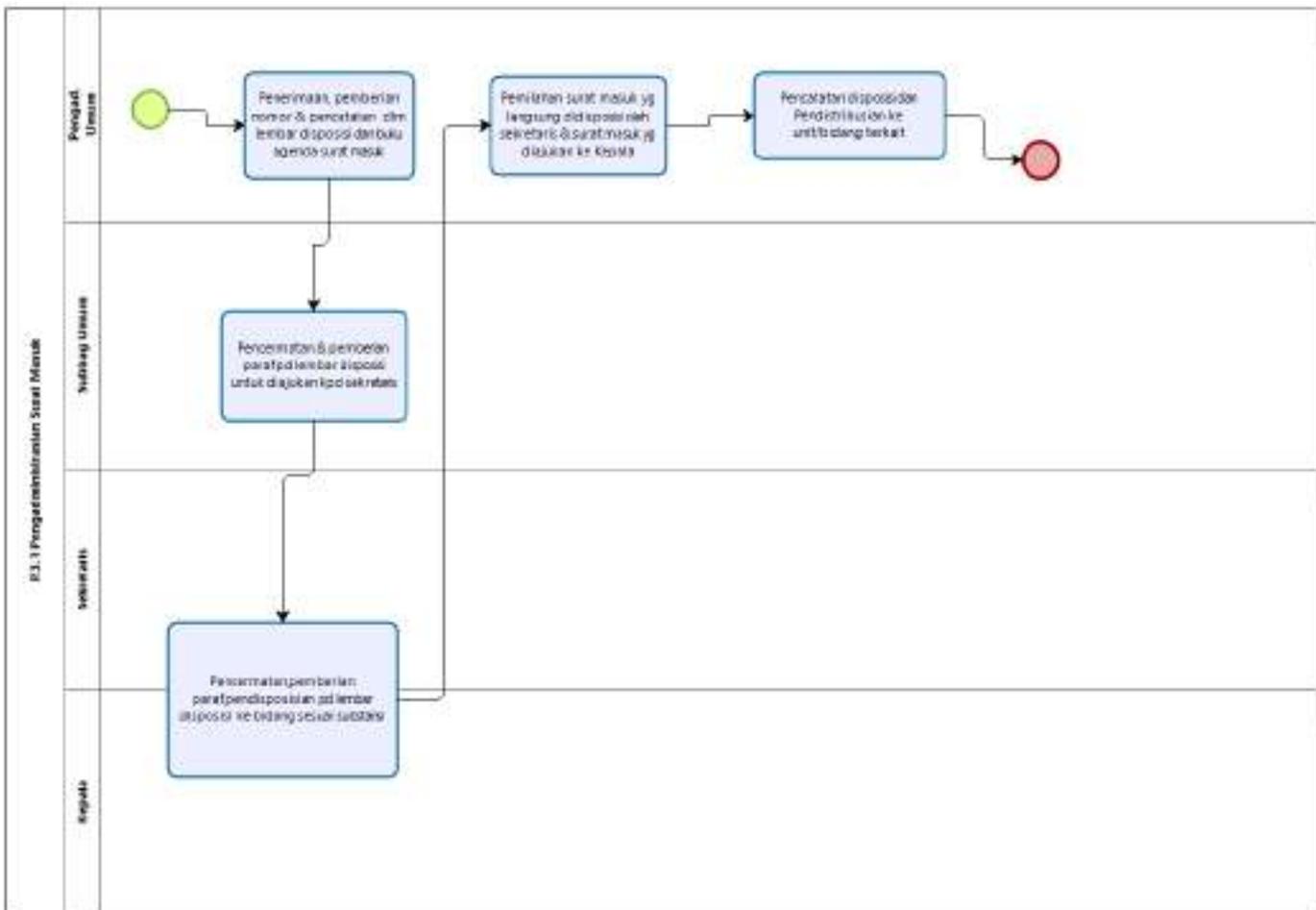
#### P.3.10 pelayanan atk

- a. Menyusun perencanaan keperluan Alat tulis kantor dan menyusun petunjuk pelaksanaannya
- b. Menyetujui kebutuhan alat-alat tulis kantor
- c. Membuat permintaan kebutuhan alat-alat tulis kantor
- d. Melakukan pengecekan persediaan alat-alat tulis kantor
- e. Menandatangani permintaan kebutuhan alat-alat tulis kantor
- f. Melakukan pembelian kebutuhan alat-alat tulis kantor untuk
- g. Meminta bukti pembelian dari spbu dan menyerahkan kepada bendahara keuangan

#### P.3.11 peningkatan kapasitas aparatur

- a. Melalui pelatihan dan sarasehan yang dikemas dalam forum pimpinan daerah yang merupakan sarana diskusi program pembangunan disegala bidang dengan pemerintah dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

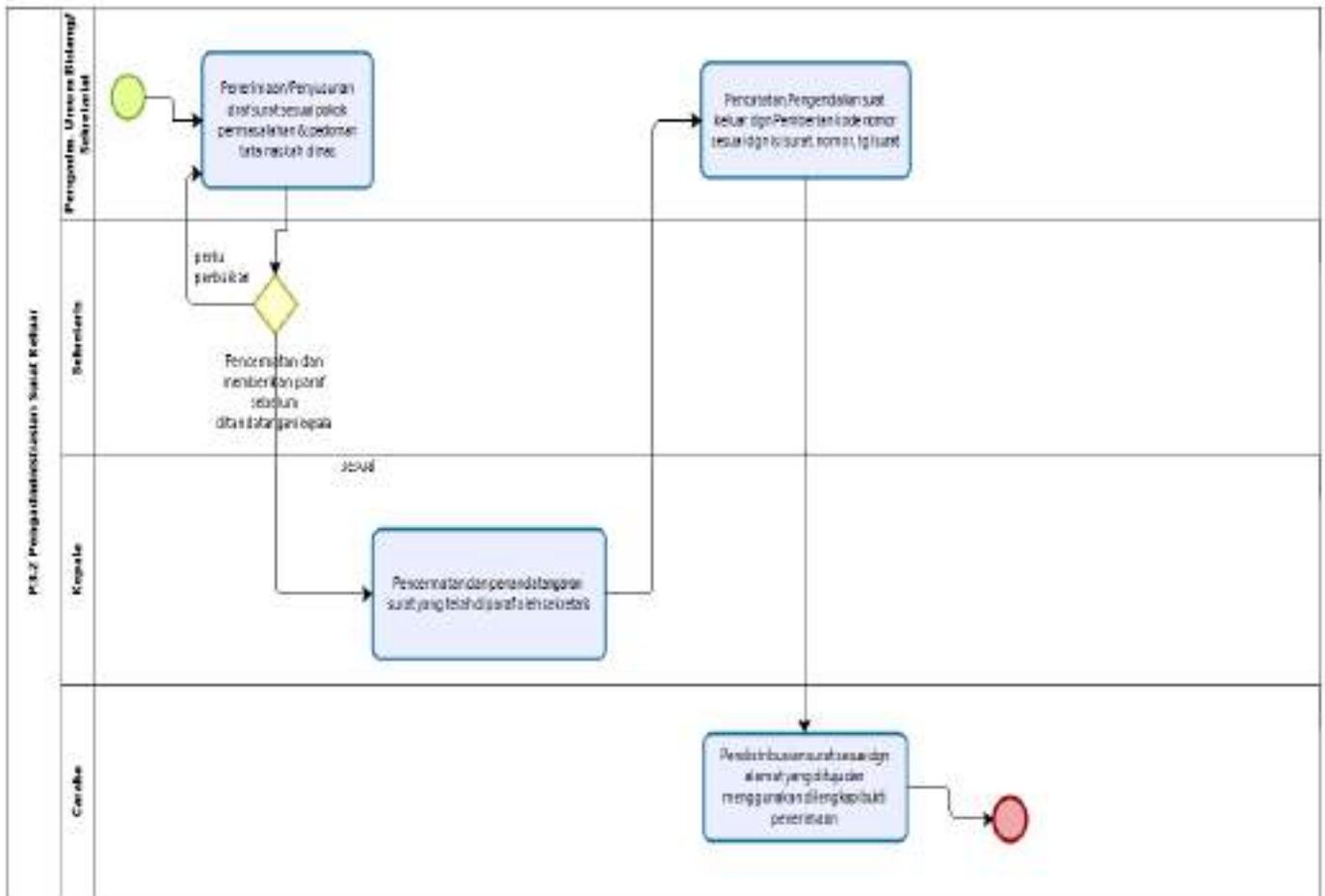
### 13 P.3.1 Pengadministrasian Surat Masuk



P.3.1 Pengadministrasian Surat Masuk, sebagaimana tercantum pada gambar proses tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengadministrasi umum menerima surat kemudian mencatat pada buku agenda surat masuk untuk selanjutnya dibuatkan nomor surat dan mencatatnya pada lembar disposisi
- b. Kasubag Umum dan Kepegawaian mencermati isi surat dan memberikan paraf pada lembar disposisi untuk kemudian diteruskan kepada sekretaris
- c. Camat dan Sekretaris mencermati substansi isi surat dan mendisposisikan pada bagian dan kasi terkait.
- d. Pemilahan surat yang telah disposisi camat dan surat yang telah disposisi sekretaris camat.
- e. Pencacatan disposisi dan pendistribusian surat pada bagian dan seksi terkait.

## 14 P.3.2 Pengadministrasian Surat Keluar



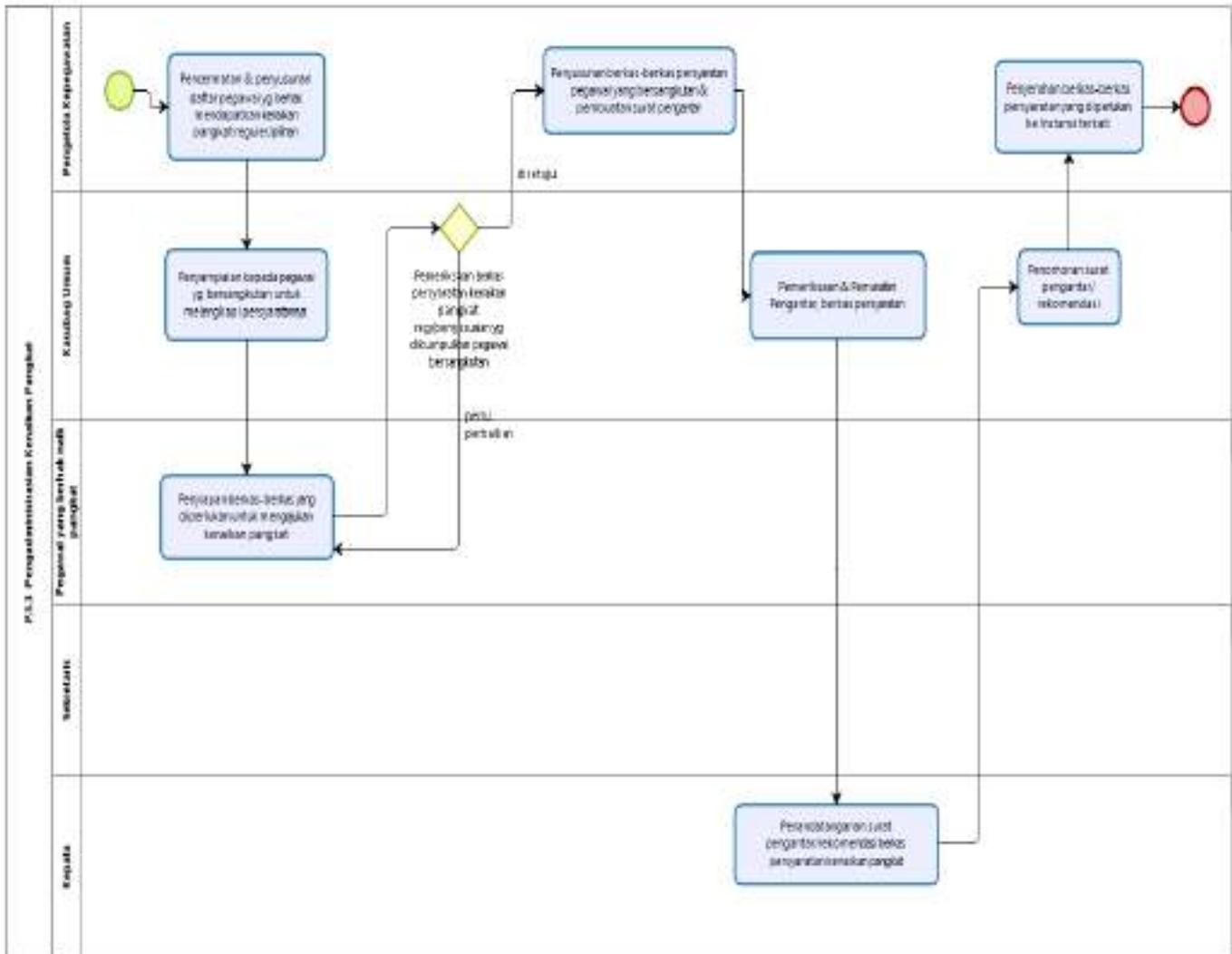
P.3.2 Pengadministrasian Surat Keluar, sebagaimana tercantum pada gambar proses tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pengadministrasi umum menerima draft surat sesuai permasalahan dari seksi dan bagian, kemudian menyusun surat berdasarkan pedoman tata naskah dinas
- Sekretaris mencermati substansi isi surat apabila ada perbaikan dikembalikan kepada pengadministrasi umum untuk dilakukan

perbaikan, apabila sudah sesuai diberikan paraf untuk di tanda tangani oleh Camat.

- c. Camat mencermati isi surat dan menanda tangani surat yang telah diparaf sekretaris.
- d. Pencatatan surat dan pemberian nomor dan tanggal surat keluar oleh Pengadministrasi Umum.
- e. Caraka melakukan pendistribusian surat sesuai dengan alamat dilengkapi dengan surat kendali tanda terima surat.

### 15 P.3.3 Pengadministrasian Kenaikan Pangkat

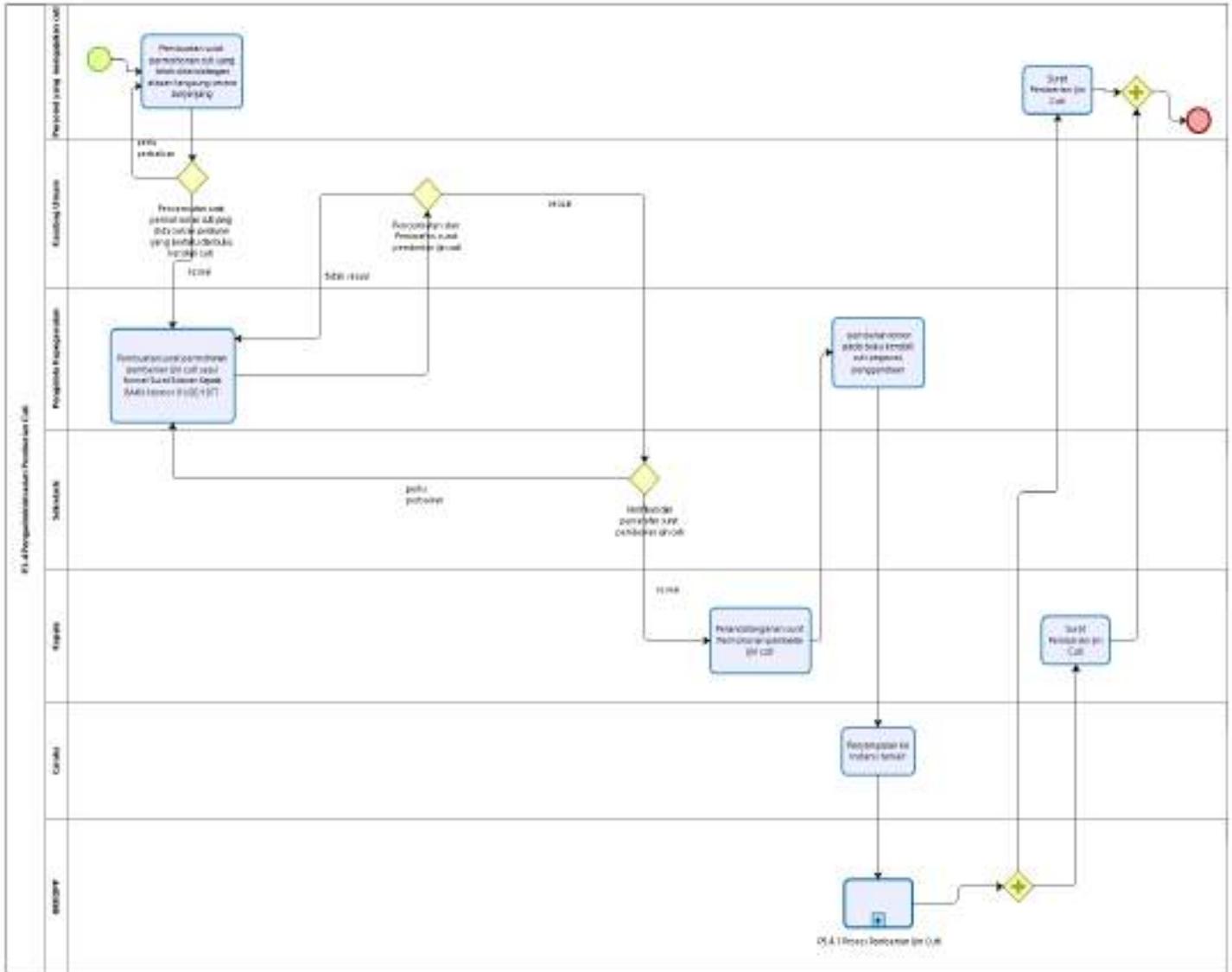


P.3.3 Pengadministrasian Kenaikan Pangkat, sebagaimana tercantum pada gambar proses tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengelola Kepegawaian melakukan Pendataan ASN di lingkungan tempat bekerja ASN yang akan mengusulkan Kenaikan pangkat

- b. Kasubag Umum dan Kepegawaian menyampaikan kepada ASN yang bersangkutan untuk mempersiapkan berkas – berkas kelengkapan kenaikan pangkat.
- c. ASN tersebut segera mempersiapkan pemberkasan dan segera memenuhi persyaratan usulan kenaikan pangkat.
- d. Pengelola Kepegawaian menerima berkas usulan kenaikan pangkat ASN dan menyerahkan kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian.
- e. Kasubag Umum dan Kepegawaian memverifikasinya berkas kenaikan pangkat apabila ada yang kurang segera dikembalikan berkas persyaratannya, kalau sudah lengkap dan benar maka dibuatkan surat pengantar pengajuannya
- f. Camat menandatangani surat pengantar pengajuan kenaikan pangkat
- g. Surat pengantar pengajuan kenaikan pangkat yang telah ditanda tangani camat dikirim ke BKDPP
- h. BKDPP menerima surat pengantar dan berkas kenaikan pangkat yang ditanda tangani Camat dan memprosesnya

## 16 P.3.4 Pengadministrasian Pemberian Cuti

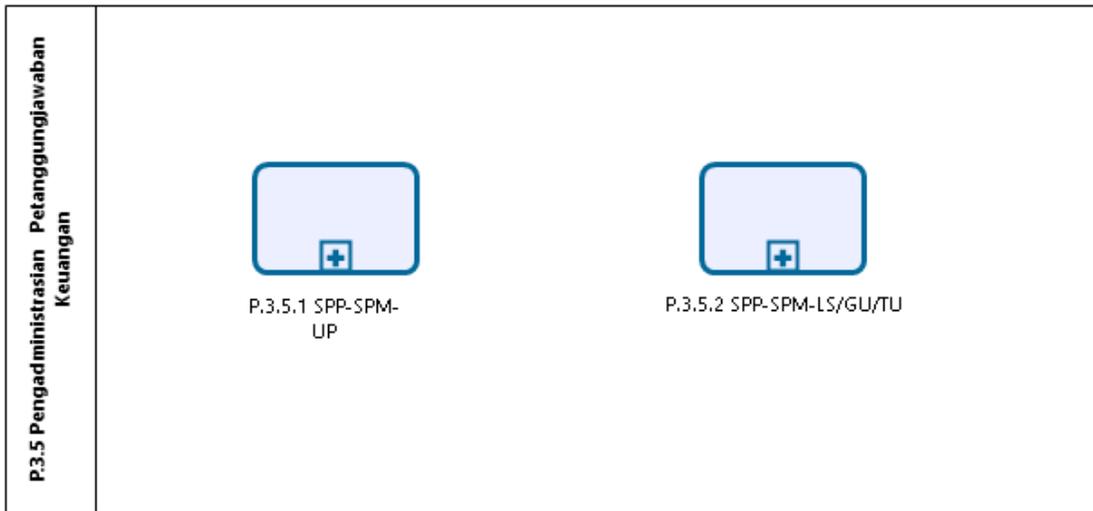


P.3.4 Pengadministrasian Pemberian Cuti tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pemohon/ ASN yang bersangkutan mengajukan surat permohonan cuti ke atasan langsung untuk meminta persetujuan.

- b. Apabila Surat telah disetujui atasan akan diteruskan ke kasubag umum, atau apabila terdapat kesalahan akan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki
- c. Kasubag umum kemudian akan meneruskan surat permohonan cuti tersebut ke pengelola kepegawaian untuk diproses lebih lanjut apabila semua persyaratan sudah sesuai, namun apabila terdapat kekurangan akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- d. Setelah persyaratan telah dipenuhi akan di ajukan kepada sekeretaris untuk meminta rekomendasi kepada kepala instansi.
- e. Apabila sudah disetujui oleh kepala instansi, surat akan dikembalikan kepada pengelola kepegawaian untuk diberikan penomoran surat keluar.
- f. Surat permohonan cuti dikirimkan kepada Badan Kepegawaianb Daerah untuk proses lebih lanjut
- g. BKD akan memverifikasi dan akan mengeluarkan surat cuti kepada yang bersangkutan serta surat tembusan untuk kepala instansi tersebut

## 17 P.3.5 Pengadministrasian Petanggungjawaban Keuangan



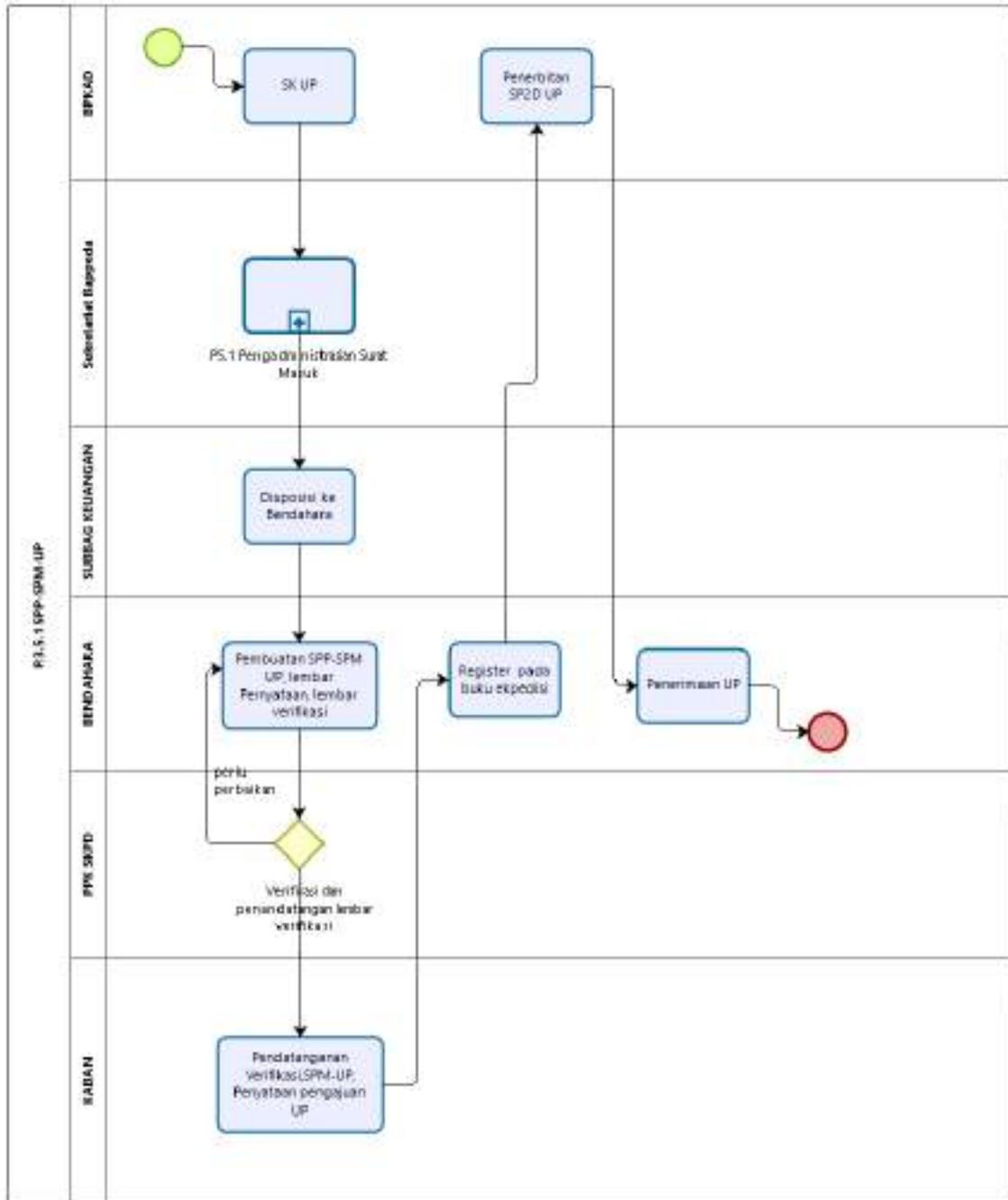
P.3.5 Pengadministrasian Pertanggungjawaban tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dalam pertanggung jawaban keuangan terdapat dua main core yang utama pertanggung jawaban untuk Belanja Operasional (Langsung) dan Belanja Gaji (Tak Langsung)
- b. Main core yang pertama pengajuan Uang Persediaan (UP) merupakan mekanisme OPD untuk pengajuan uang persediaan guna pembelian kebutuhan operasional pada awal tahun
- c. Untuk main core yang kedua pertanggung jawaban Ganti uang (GU), LS/ belanja operasional merupakan pertanggungjawaban semua biaya yang dikeluarkan untuk belanja opsional seperti pembelian ATK, tagihan listrik, telepon dan lain-lain selama satu bulan untuk selanjutnya bukti-bukti pembelian akan di jadikan



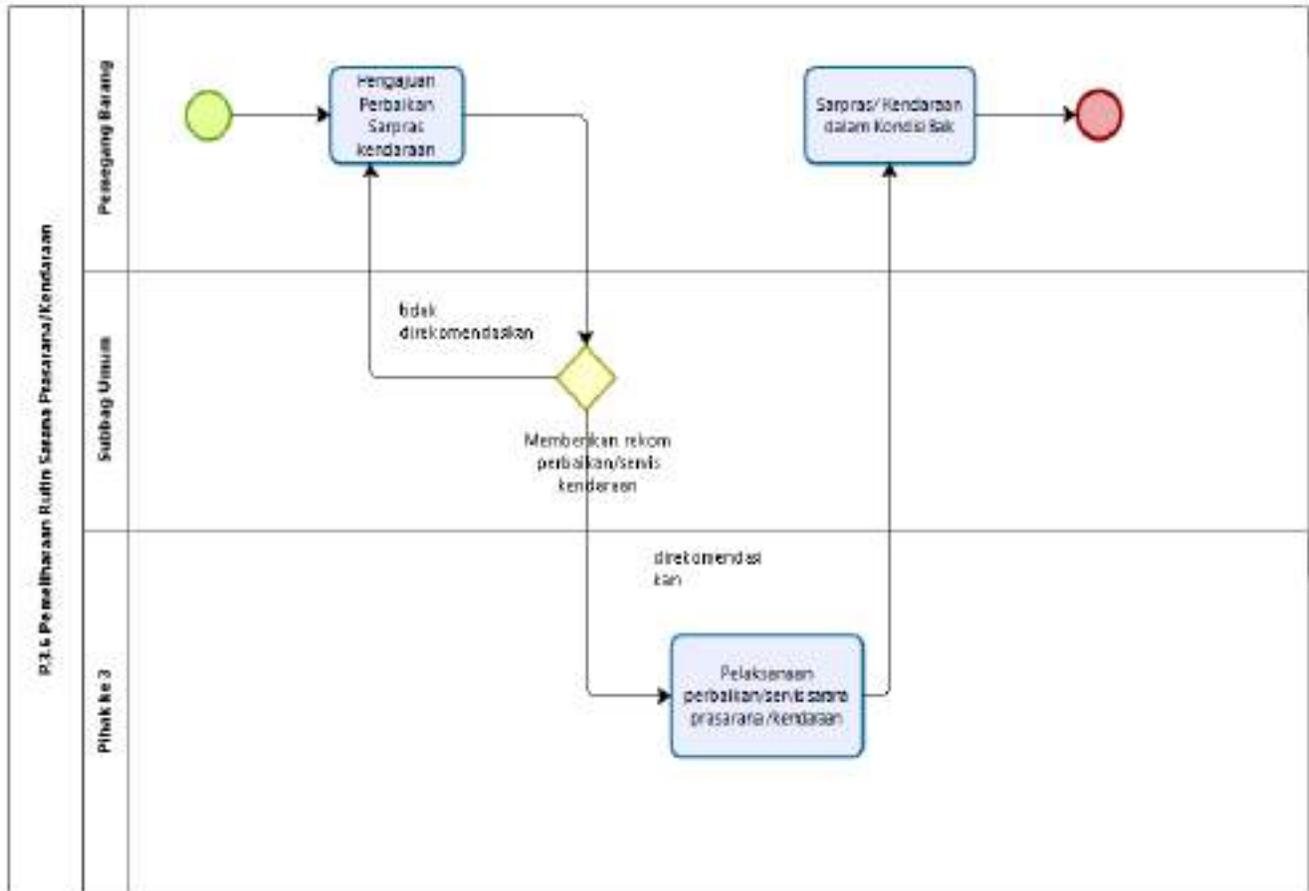
satu untuk dijadikan Surat Pertanggungjawaban selama satu bulan berjalan

18 P.3.5.1 SPP-SPM-UP





## 20 P.3.6 Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana Kendaraan



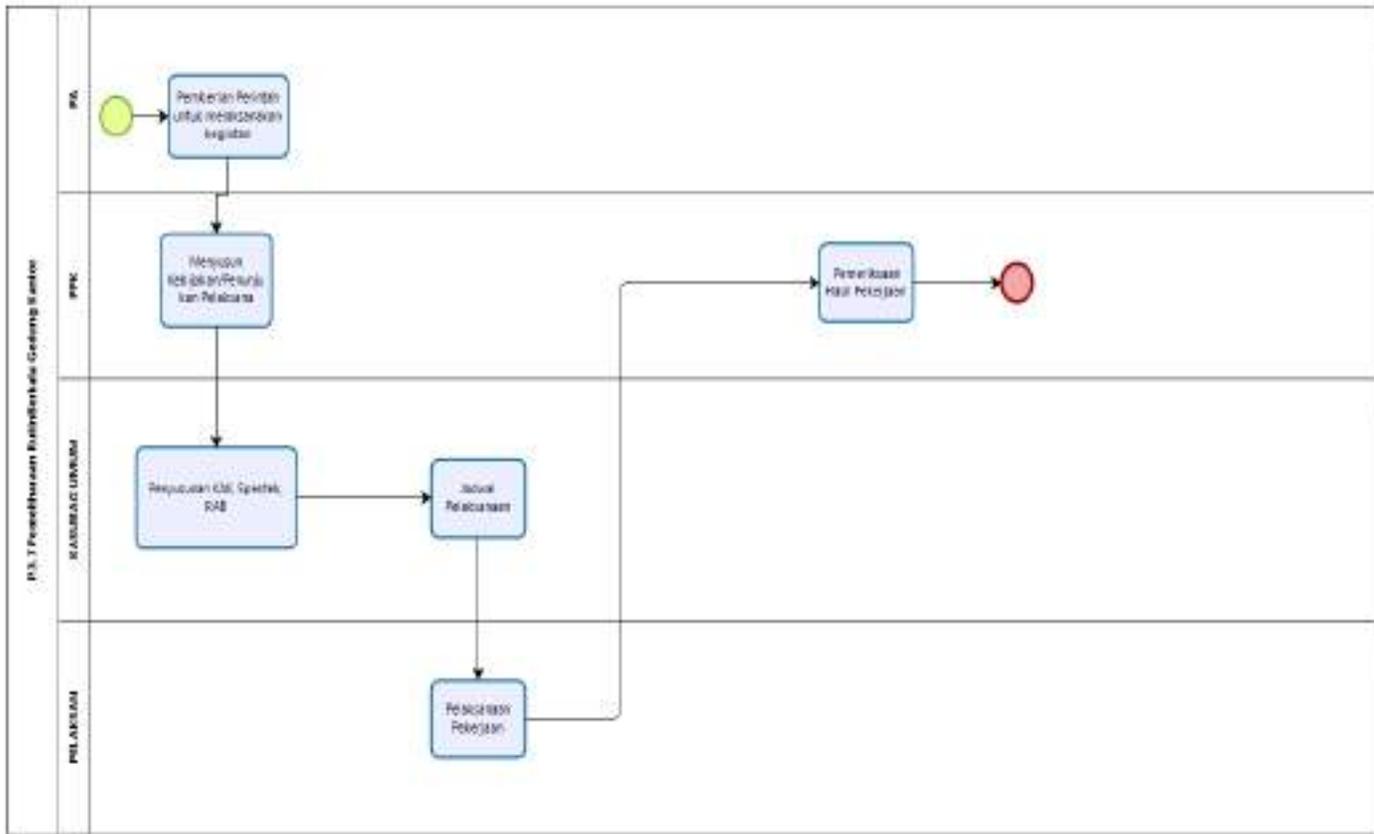
P.3.6 Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana Kendaraan, sebagaimana tercantum pada gambar proses tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut

- Pemegang kendaraan dinas mengajukan usulan ke Subag Umum,
- Subag Umum memberikan rekom perbaikan / servis kendaraan , Apabila direkomendasikan , maka perbaikan/ servis kendaraan dapat dilaksanakan untuk dibawa ke pihak ke tiga . Namun apabila Subag

Umum tidak memberikan rekomendasi , kendaraan tersebut belum dapat dilaksanakan pemeliharaan .

- c. Setelah pelaksanaan pemeliharaan/servis kendaraan dilaksanakan , output nya kendaraan sudah dalam keadaan baik.

## 21 P.3.7 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor



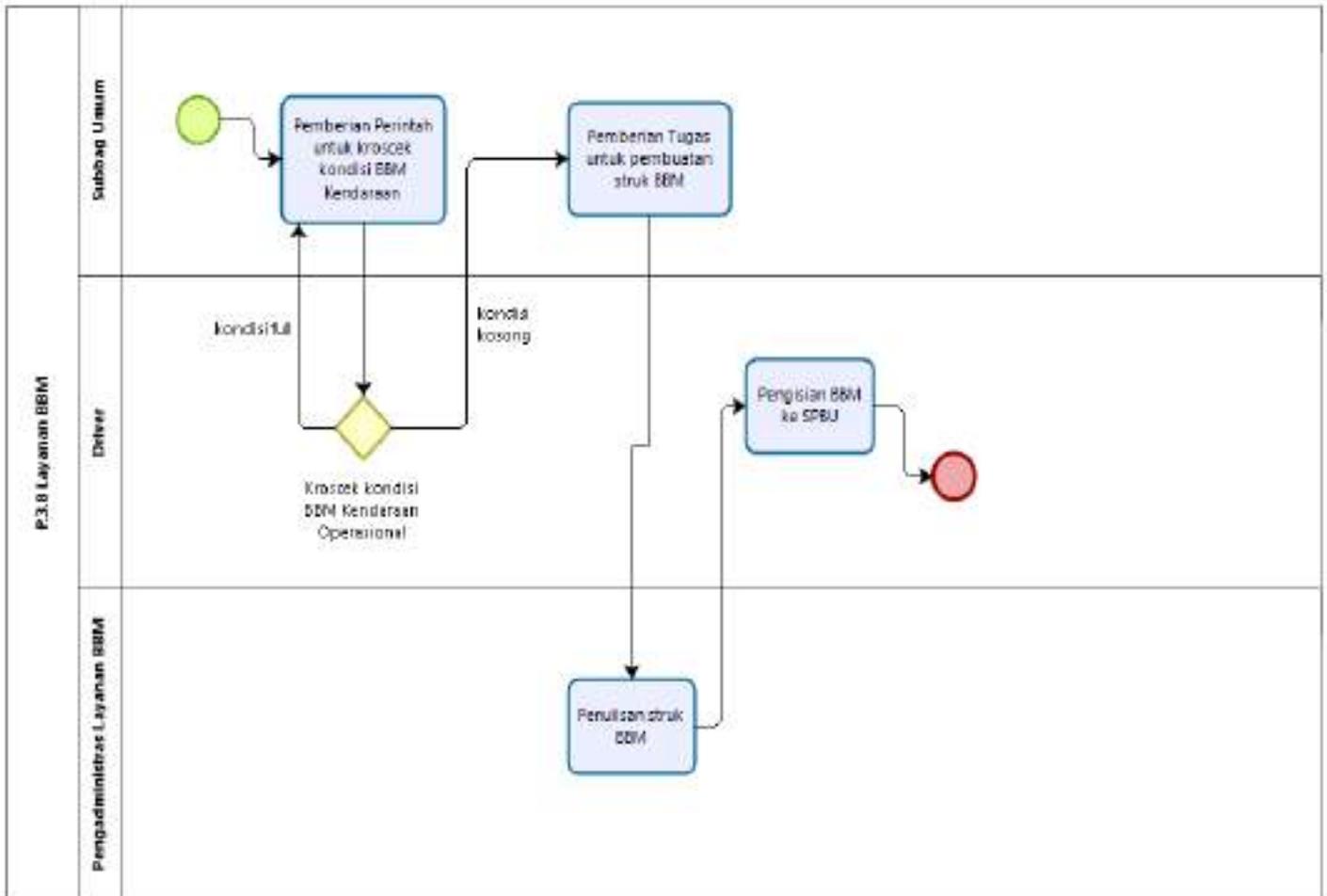
P.3.7 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor, sebagaimana tercantum pada gambar proses tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut

- a. Pengguna Anggaran dalam hal ini Camat memberikan perintah untuk melaksanakan kegiatan.
- b. PPK / Pejabat Pembuat Komitmen atau apabila dalam OPD tidak terdapat pejabat yang ditunjuk, maka PA bisa merangkap sebagai PPK, menyusun kebijakan (KAK, Spesifikasi teknis, RAB) dan menunjuk pelaksana kegiatan tersebut.
- c. Pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam hal ini Subag Umum selaku pejabat pengampu kegiatan, melakukan penyusunan jadwal teknis

pelaksanaan kegiatan untuk selanjutnya dapat dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Pelaksana sampai dengan kegiatan selesai

- d. Setelah pekerjaan selesai dilaksanakan oleh pelaksana , maka PPTK beserta tim yang ditunjuk , melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan untuk dievaluasi apakah sudah sesuai/belum. Apabila sudah sesuai, maka pekerjaan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor , dinyatakan selesai

## 22 P.3.8 Layanan BBM

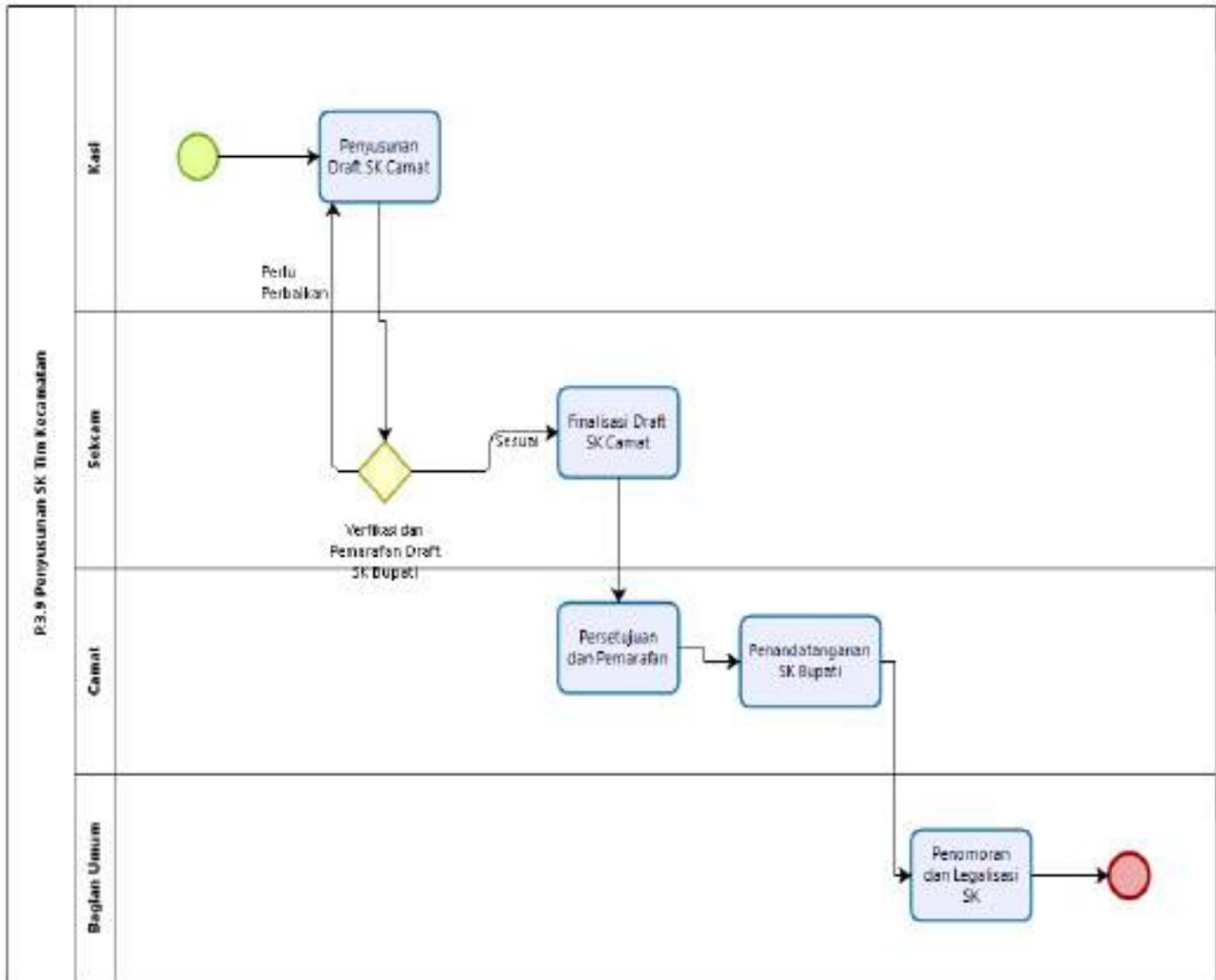


P.3.8 Layanan BBM, sebagaimana tercantum pada gambar proses tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut

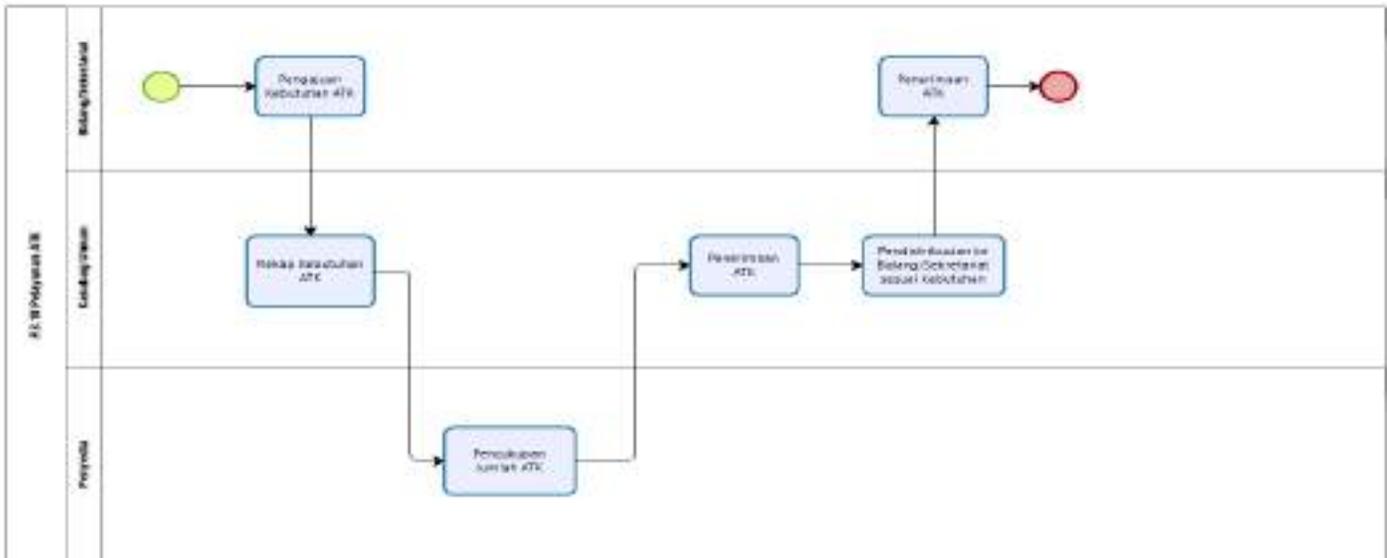
- Subbag Umum dalam hal ini selaku pejabat pengampu kegiatan pelayanan administrasi kantor, memberikan perintah kepada staf untuk kroscek kondisi BBM kendaraan operasional apakah dalam kondisi full / kosong.

- b. Apabila BBM kendaraan dalam kondisi kosong, Subag Umum memberikan tugas kepada staf untuk pembuatan struk BBM dan penulisan struk BBM untuk diserahkan kepada driver .
- c. Driver melakukan pengisian BBM di SPBU , dan kegiatan telah selesai dilaksanakan

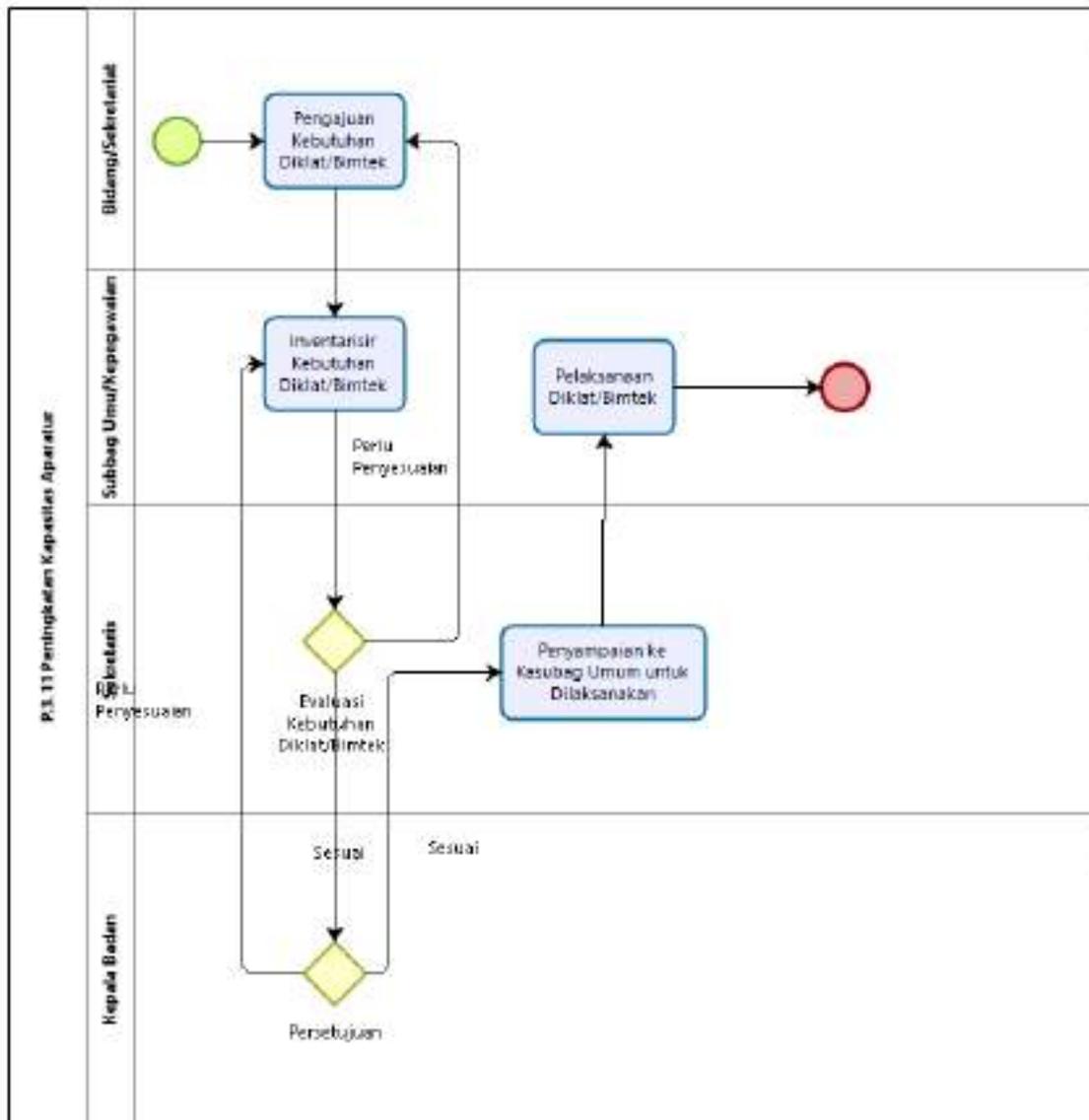
## 23 P.3.9 Penyusunan SK Tim Kecamatan



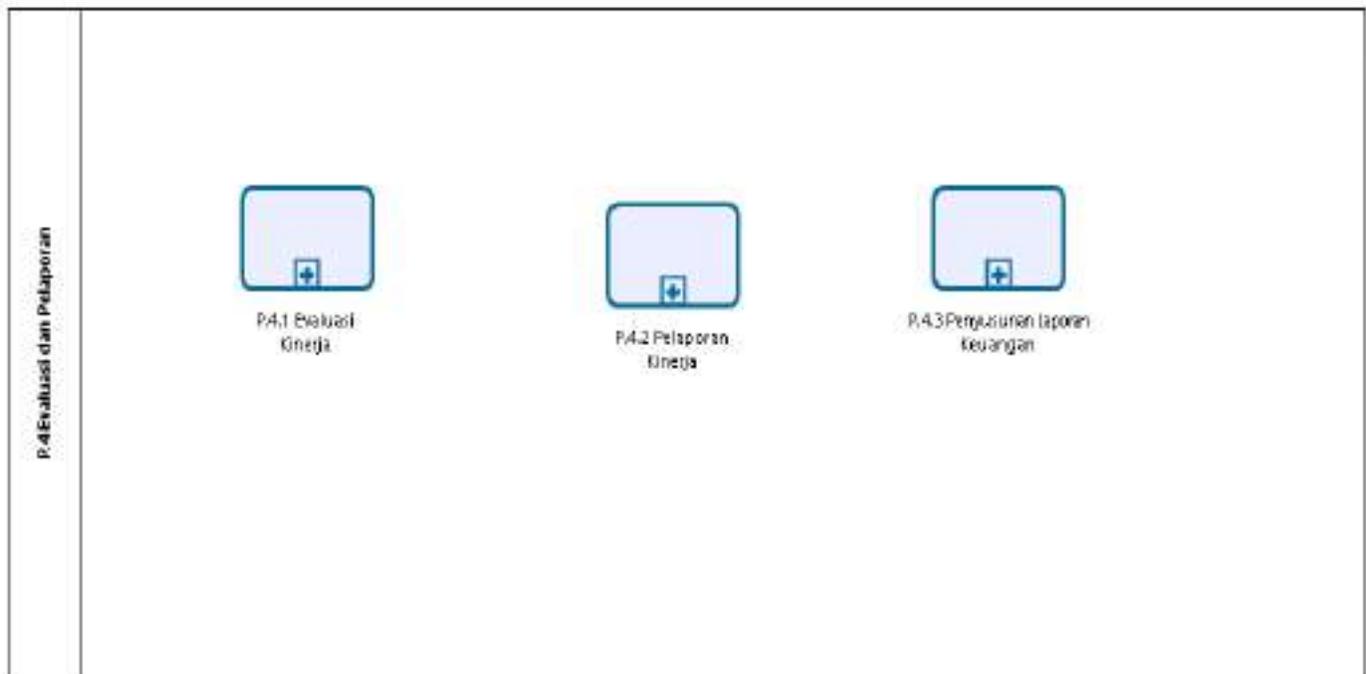
## 24 P.3.10 Pelayanan ATK



## 25 P.3.11 Peningkatan Kapasitas Aparatur



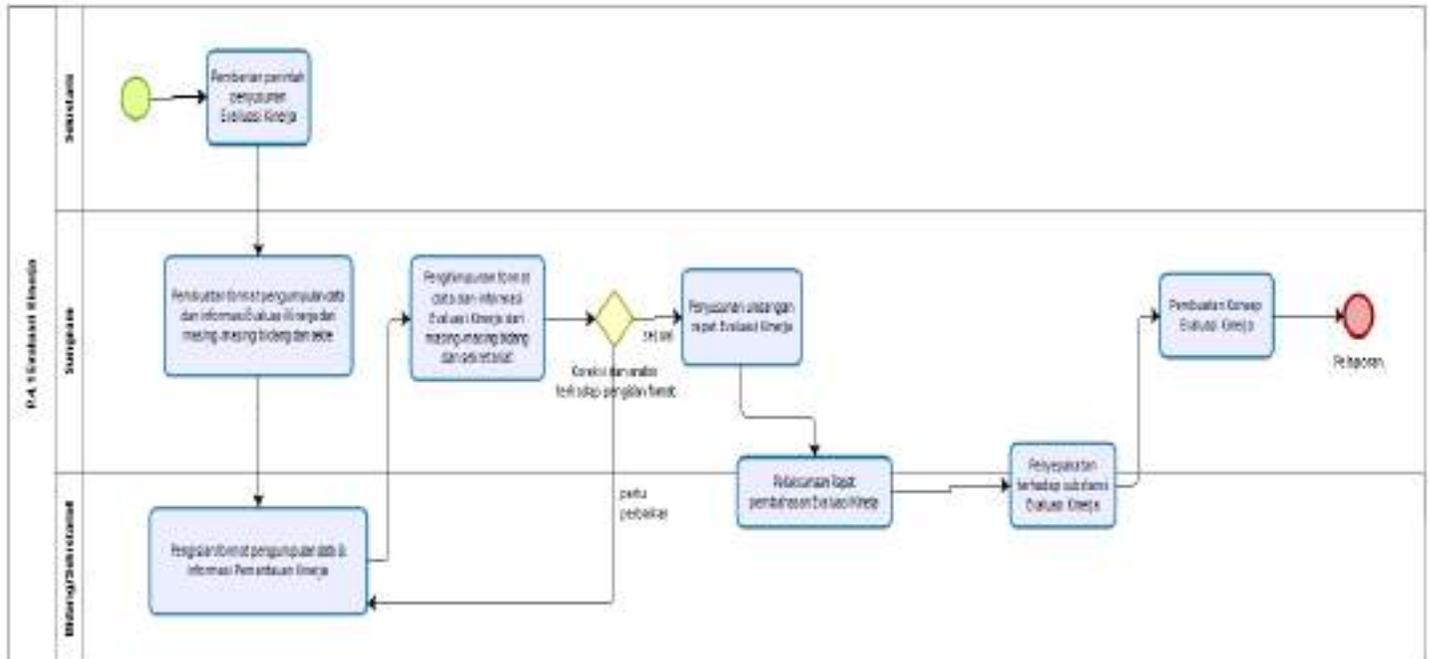
## 26 P.4 Evaluasi dan Pelaporan



Evaluasi dan Pelaporan (Kode P.4) sebagaimana tercantum pada gambar diatas merupakan salah satu proses manajerial dalam proses bisnis Kecamatan. Evaluasi dan Pelaporan (Kode P.4) terdiri dari 3 sub proses antara lain :

- a. Evaluasi Kinerja (Kode P.4.1)
- b. Pelaporan Kinerja (Kode P.4.2)
- c. Penyusunan Laporan Keuangan (Kode P.4.3)

## 27 P.4.1 Evaluasi Kinerja



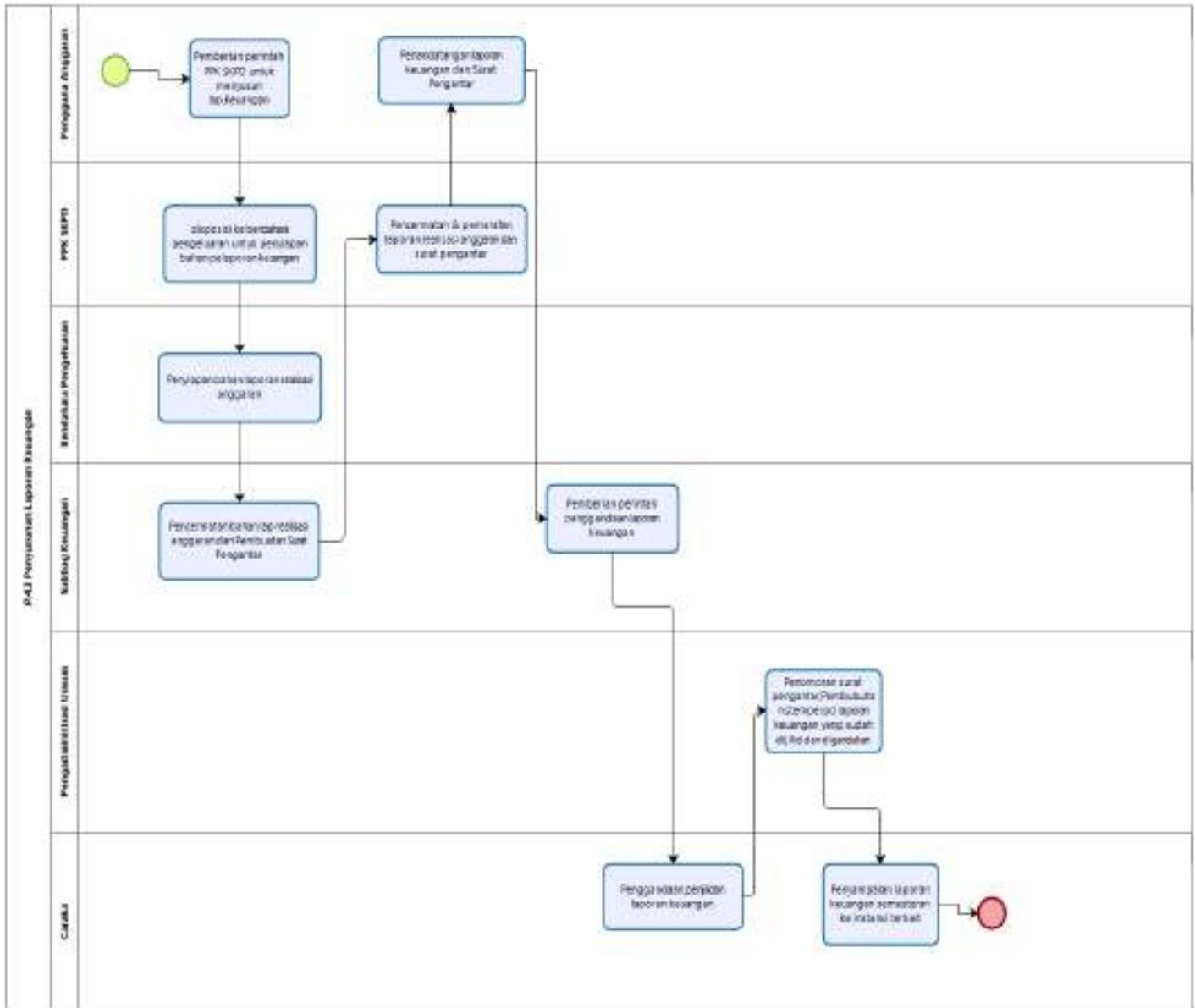
Evaluasi Kinerja (Kode P.4.1) merupakan Sub Proses Evaluasi dan Pelaporan (Kode P.4) yang alur prosesnya sebagaimana tercantum pada gambar diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Langkah pertama dalam proses ini adalah Sekretaris Kecamatan memberikan perintah untuk penyusunan evaluasi kinerja
- Selanjutnya Sub bagian keuangan, penyusunan program dan evaluasi membuat format pengumpulan data dan informasi evaluasi kinerja dari masing – masing bidang dan kesekretariatan.
- Setelah format jadi dan diserahkan, masing – masing bidang dan kesekretariatan mengisi format terkait kinerja masing-masing bidang selama tribulanan maupun penyerapan anggaran masing-masing bidang dan sekretariatan.

- d) Setelah proses pengisian selesai Sub bagian keuangan, penyusunan program dan evaluasi menghimpun data dari masing – masing bidang dan sekretariat untuk dikoreksi dan dianalisa. Jika perlu perbaikan maka akan dikembalikan kepada masing – masing bidang dan sekretariat, tetapi jika sudah sesuai akan menuju langkah selanjutnya yaitu membuat undangan rapat.
- e) Dalam langkah pembuatan undangan rapat ini akan dilakukan jika seluruh bidang dan sekretariat telah merampungkan pengisian data evaluasi kinerja dengan benar.
- f) Dalam pelaksanaan rapat evaluasi kinerja yang membahas capaian kinerja maupaun penyerapan anggaran yang melibatkan seluruh pegawai. Dan hasil rapat yang disepakati ini dijadikan dasar untuk pembuatan laporan evaluasi kinerja.
- g) Langkah terakhir ialah menyusun laporan hasil evaluasi kinerja yang telah di bahas dalam rapat. Format hasil pelaporan evaluasi kinerja dan anggaran dari masing-masing bidang dibuat sebagai dasar pembuatan Laporan Capaian Kinerja Kecamatan agar bisa mengetahui sejauh mana keselarasan antara Kinerja dan Anggaran Kecamatan.



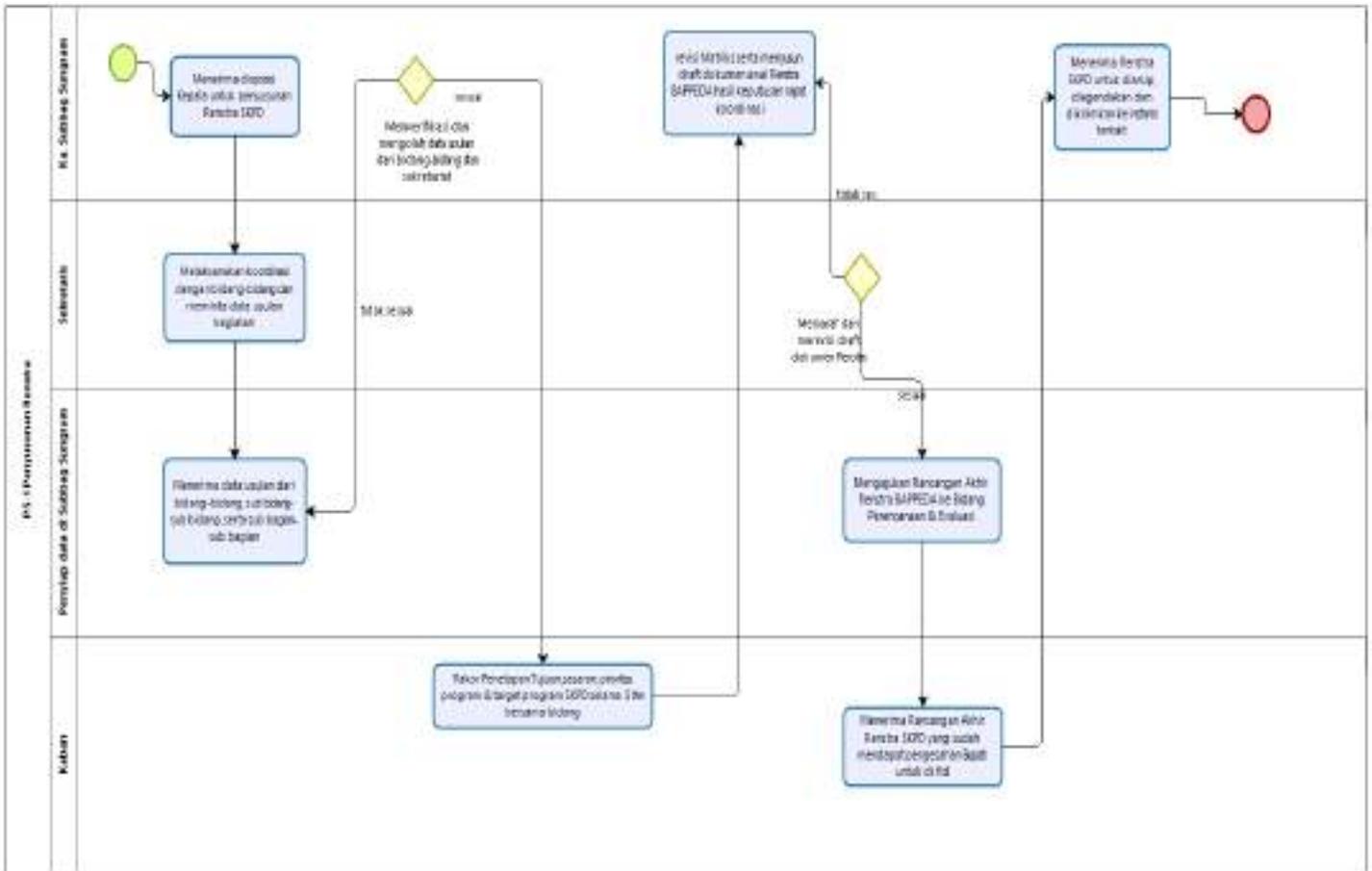
## 29 P.4.3 Penyusunan Laporan Keuangan



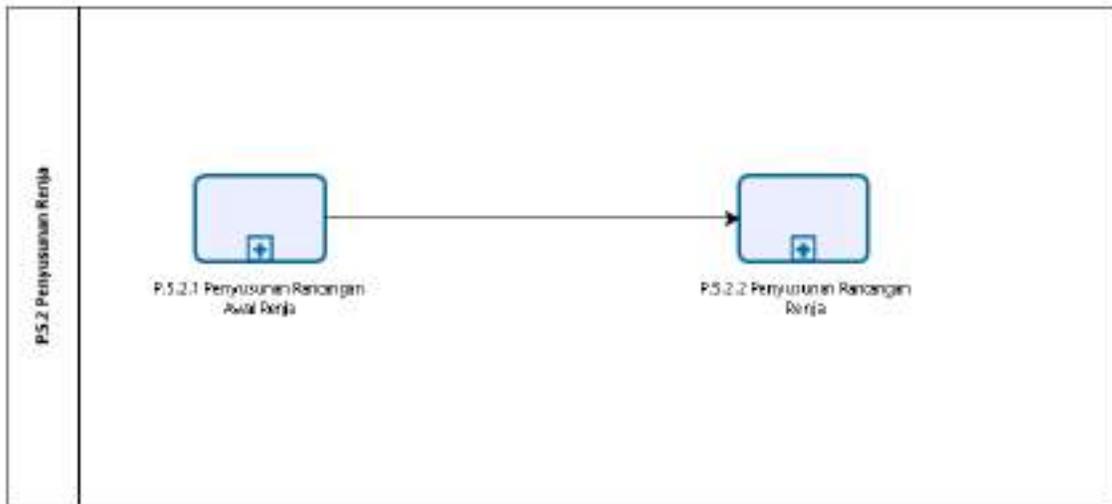
## 30 P.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan



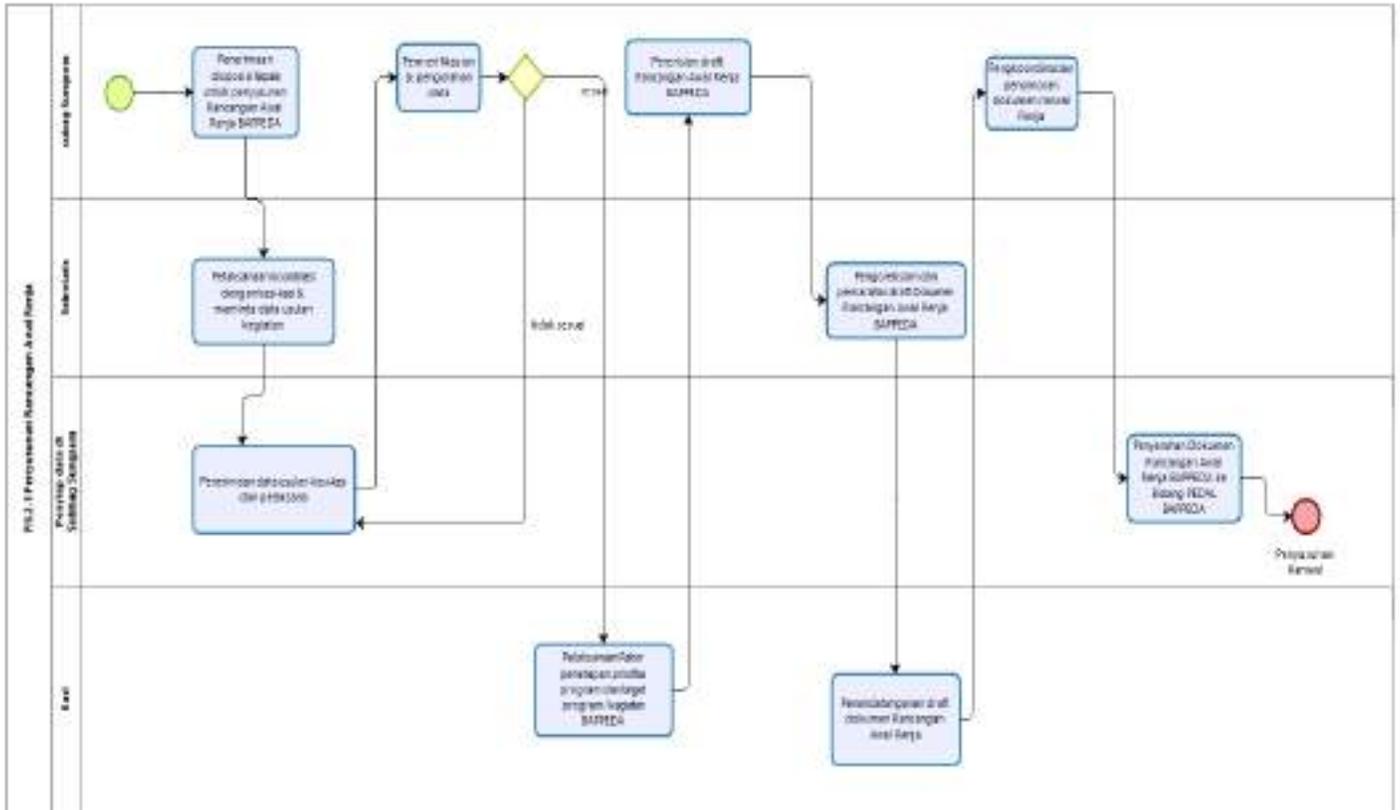
### 31 P.5.1 Penyusunan Renstra



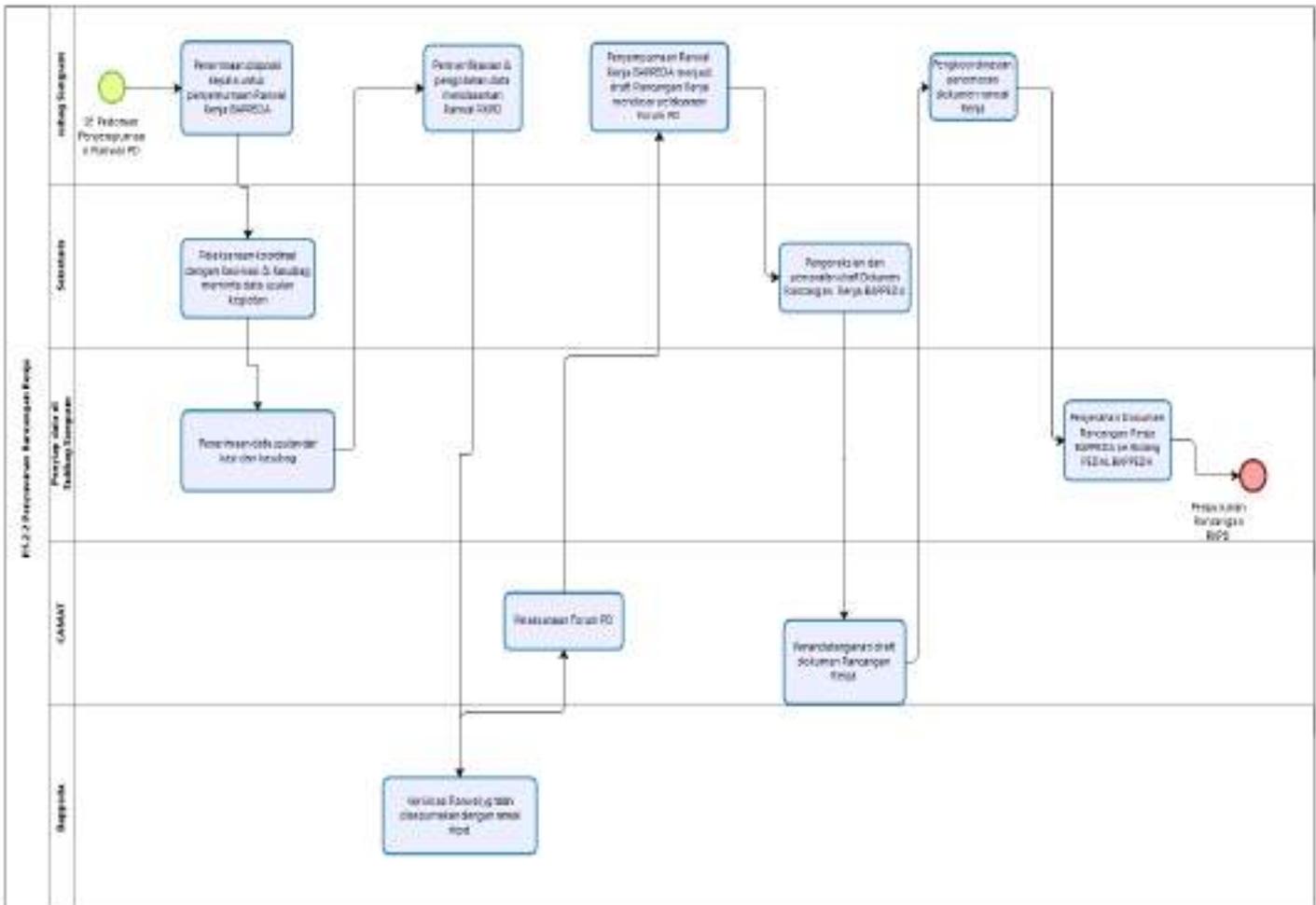
## 32 P.5.2 Penyusunan Renja



### 33 P.5.2.1 Penyusunan Rancangan Awal Renja



### 34 P.5.2.2 Penyusunan Rancangan Renja



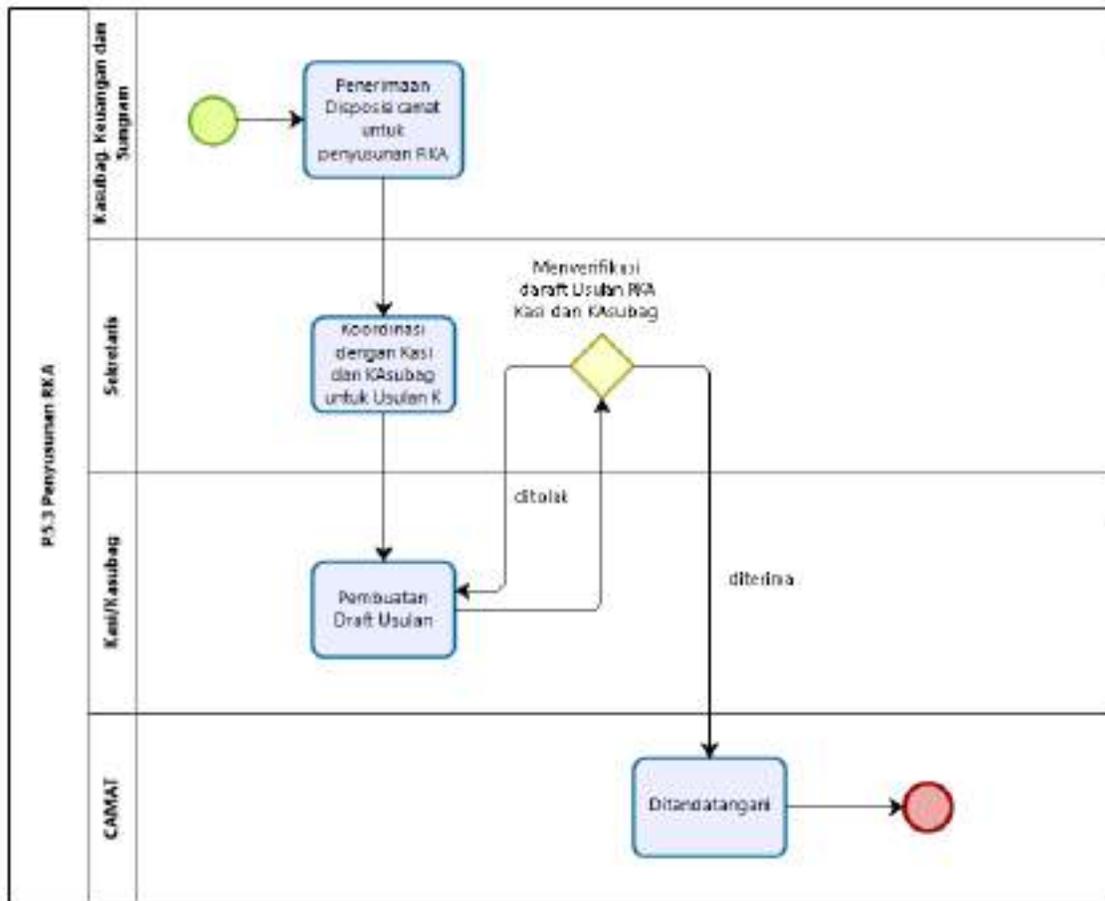
P.5.2.2. Penyusunan Rancangan Renja, sebagaimana tercantum pada gambar proses tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Penerimaan Disposisi Camat dimana surat yang masuk dari Bapedda tentang penyusunan Rancangan Renja SKPD di registrasi oleh Kasubagumum lalu diteliti dan didisposisikan ke Kasubagsunggram untuk di laksanakan.
- Melaksanakan koordinasi dengan kasi-kasi (Kasi PMD, Pemerintahan, SOSBUD dan Trantib) dimana semua kasi membuat

usulan kegiatan sesuai dengan komponen yang diampuh yang dituangkan dalam satu draft usulan

- c. Pembuatan Draft usulan kegiatan perKasi dan direvisi oleh Tim Renja SKPD sesuai dengan komponen yang diampuh dan menyesuaikan DPA Kabupaten setelah itu dilaksanakan Forum PD (Rapat Koordinasi antara kecamatan dan pihak terkait) dan setelah direvisi maka di tanda tangani berkas rancangan renja SKPD oleh Camat.
- d. Pengiriman Rancangan SKPD Kecamatan ke Bappeda bagaian Delev.

### 35 P.5.3 Penyusunan RKA



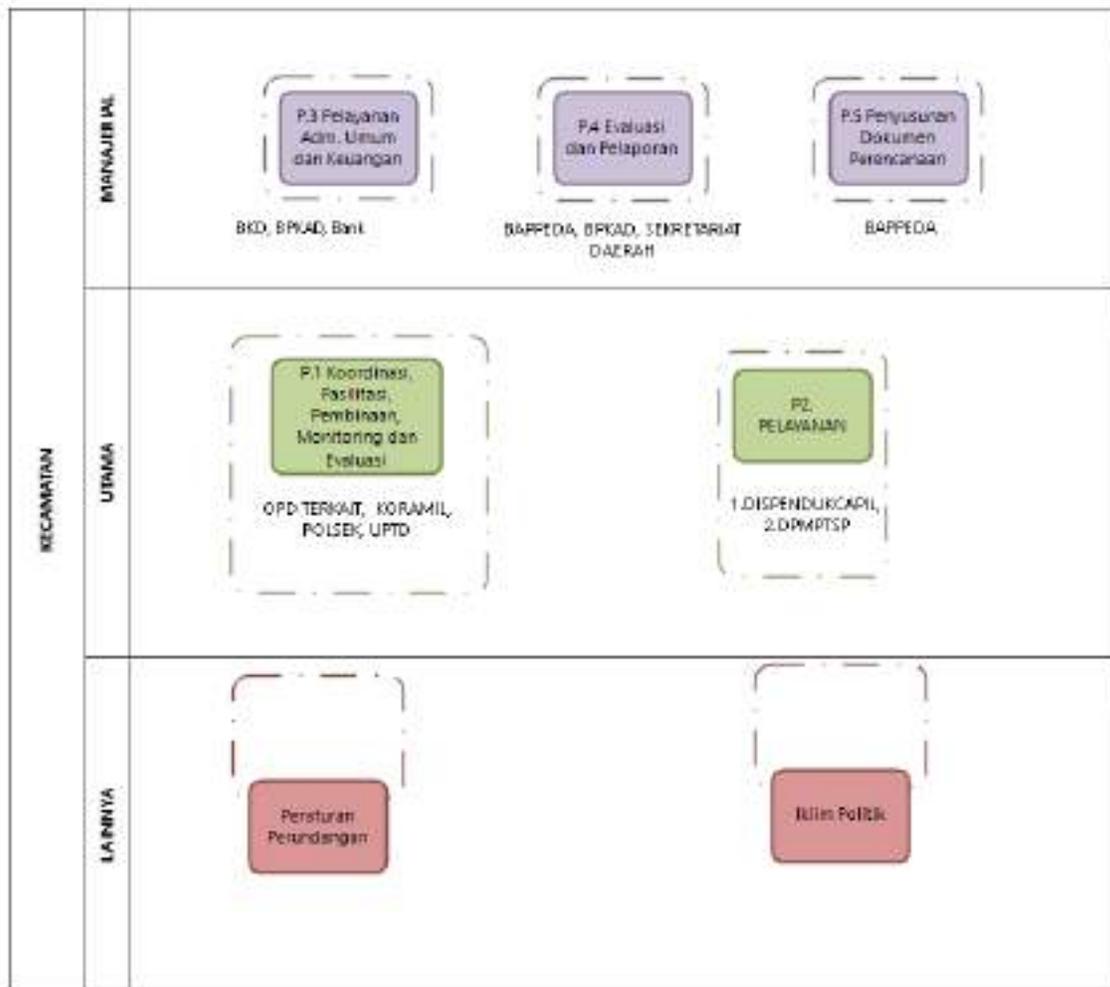
P.5.3 Penyusunan RKA, sebagaimana tercantum pada gambar proses tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Penerimaan Disposisi Camat dimana surat yang masuk dari Bapedda tentang penyusunan RKA SKPD di registrasi oleh Kasubagumum lalu diteliti dan didisposisikan ke Kasubagsungram untuk di laksanakan.
- Melaksanakan koordinasi dengan kasi-kasi (Kasi PMD, Pemerintahan, SOSBUD dan Trantib) dimana semua kasi membuat

usulan kegiatan sesuai dengan komponen yang diampuh yang ditauangkan dalam satu draft usulan.

- c. Pembuatan Draft usulan kegiatan perKasi dan direvisi sesuai dengan komponen yang diampuh oleh Kasubagsungram.
- d. Penandatanganan berkas RKA yang sudah tersusun sesuai kegiatan perKasi dan menyesuaikan Komponen serta DPA dari Kabupaten.

## 36 PETA RELASI



Peta Relasi sebagaimana tercantum pada gambar proses tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja kecamatan.

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah tipe A yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Kecamatan adalah *Meningkatkan Kualitas Layanan Publik*, dengan indikator tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat.

Sedangkan sasaran Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.  
Indikator kinerjanya: Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan minimal baik
2. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
Indikator kinerjanya: Nilai Evaluasi SAKIP

Dengan berdasarkan pada tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi dapat didefinisikan peta relasi utama Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi, Fasilitasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi (kode P.1)  
Kecamatan mempunyai hubungan relasi dengan OPD terkait, Koramil, Polsek dan UPTD terkait fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang dilakukan desa/kelurahan.
2. Pelayanan (kode P.2)  
Kecamatan mempunyai hubungan relasi dengan Dispendukcapil terkait Pelayanan dokumen administrasi kependudukan seperti KTP-El, Kartu Keluarga, KIA dan pindah penduduk. Kecamatan mempunyai hubungan relasi dengan DPMPTSP terkait pelayanan perizinan seperti penerbitan izin usaha.

Untuk mendukung peta relasi utama, maka diperlukan juga peta relasi manajerial yang terdiri dari:

1. Pelayanan Adm. Umum dan Keuangan (kode P.3)  
Kecamatan mempunyai hubungan relasi dengan BKD terkait pelayanan umum dan kepegawaian seperti analisa jabatan dan mutasi pegawai. Kecamatan mempunyai hubungan relasi dengan BPKAD dan Bank terkait anggaran dan keuangan.
2. Evaluasi dan Pelaporan (kode P.4)  
Kecamatan mempunyai hubungan relasi dengan Bappeda,

BPKAD dan Sekretariat Daerah terkait evaluasi dan pelaporan.

### 3. Penyusunan Dokumen Perencanaan (kode P.5)

Kecamatan mempunyai hubungan relasi dengan Bappeda terkait dokumen perencanaan seperti Renstra, Renja dan RKA

Dalam menjalankan peta realasi utama dan peta relasi manajerial untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan, diidentifikasi juga proses lain yang berasal dari luar organisasi yang berpengaruh signifikan, yaitu:

1. Perubahan regulasi/peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah;
2. Iklim politik yang terkait dengan pelaksanaan tugas Kecamatan;